

BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SURABAYA



LAPORAN KINERJA

2024

DIREKTORAT JENDERAL INFRASTRUKTUR DIGITAL







RINGKASAN EKSEKUTIF

Tugas Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya adalah melaksanakan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti; monitoring, pengukuran, inspeksi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, juga penanganan gangguan frekuensi radio. Hal ini dilakukan untuk mendukung ketersediaan layanan telekomunikasi yang berkualitas yang dapat dinikmati oleh masyarakat pengguna frekuensi radio khususnya, dan juga dapat membawa dampak ekonomi positif bagi masyarakat pada umumnya.

Untuk dapat melihat performa apakah pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi yang ada telah dilakukan dengan baik, diperlukan suatu mekanisme evaluasi tahunan yang berisi catatan yang mengurai apa saja yang menjadi target dan apakah realisasi yang dilakukan sudah memenuhi target yang ditentukan dengan Menyusun Buku Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun Anggaran 2024.

Laporan Kinerja (LAKIN) adalah suatu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan / disclosure secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

LAKIN Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (SFR) Kelas I Surabaya Tahun 2024 ini disusun untuk melengkapi Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (Ditjen Infrastruktur Digital), Kementerian Komunikasi dan Digital guna memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat yaitu masyarakat atas kinerja yang telah dicapai. Laporan Kinerja ini juga sebagai acuan upaya perbaikan berkesinambungan (*Continous Improvement*) bagi unit kerja Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), transparan, efisien, efektif dan akuntabel.

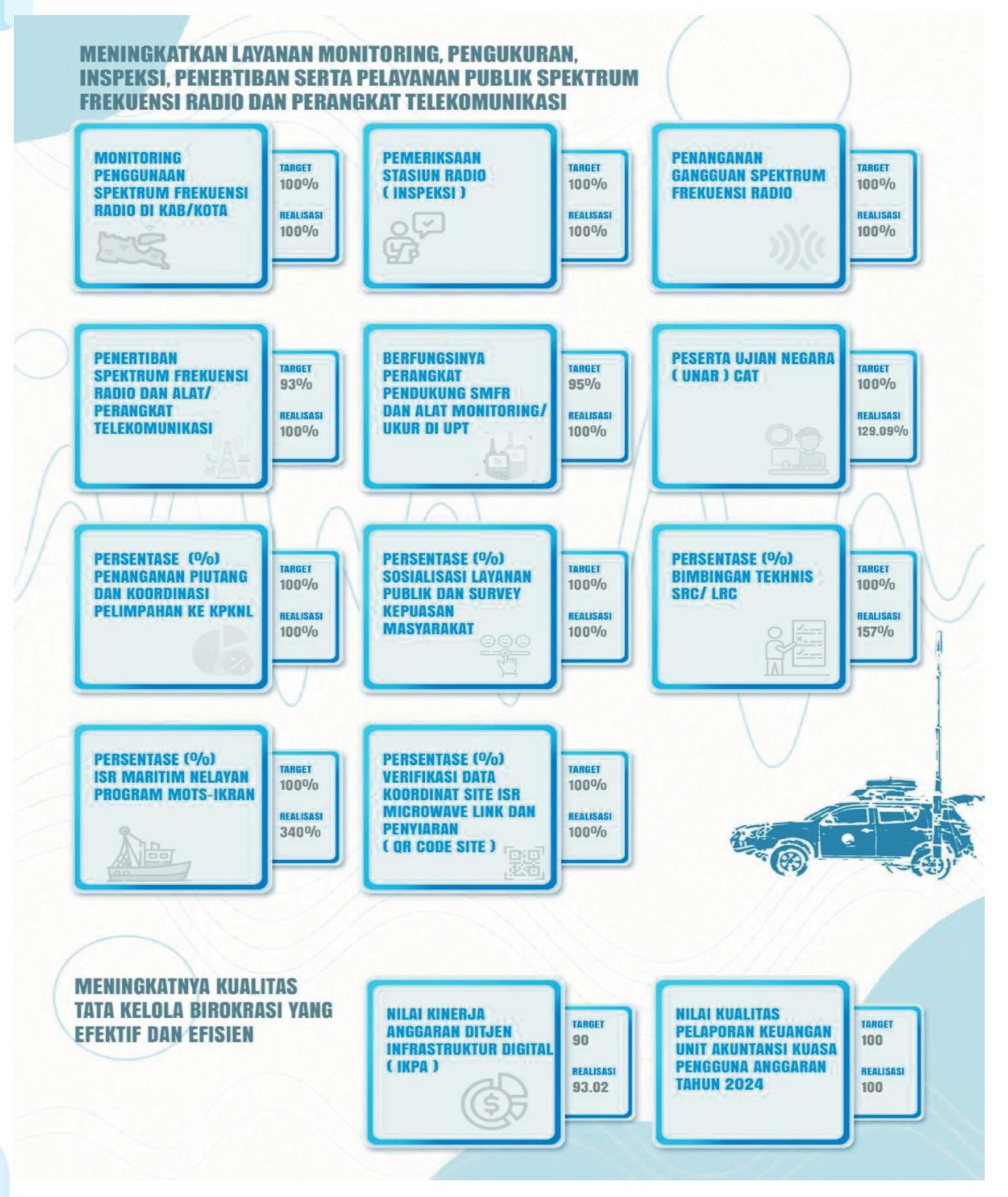
Laporan Kinerja ini berisikan laporan capaian kinerja yang mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya Tahun 2024 yang telah disepakati antara Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dengan Direktur Jenderal Infrastruktur Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital.

Pada tahun 2024, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya memliki 2 Sasaran Kinerja yang menjadi tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya. Adapun persentase target tahunan dan persentase hasil realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dapat dirangkum sebagaimana tabel berikut ini:

Gambar 1. Sasaran Kinerja 🕨







Sasaran kegiatan tersebut di atas adalah merupakan tolak ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan kegiatan

untuk satu tahun perencanaan. Adapun untuk penjelasan secara lengkap diuraikan lebih jauh pada BAB III.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2024. Laporan ini merupakan wujud akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dalam mendukung transformasi digital nasional, memperkuat ekosistem komunikasi, serta memastikan penggunaan spektrum frekuensi radio yang inklusif dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya di wilayah Jawa Timur.

Melalui laporan ini, kami menyampaikan capaian strategis, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan guna menjaga keteraturan penggunaan spektrum frekuensi radio di Jawa Timur, yang menjadi sumber daya terbatas namun sangat vital bagi berbagai sektor diantaranya telekomunikasi, penyiaran, kebencanaan dan pertahanan.

Kami menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya, termasuk jajaran pemerintah, mitra kerja, pemangku kepentingan, serta masyarakat luas. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi yang transparan dan konstruktif dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai bangsa digital yang maju dan berdaya saing.

Akhir kata, kami mengundang kritik dan masukan yang membangun demi penyempurnaan kebijakan dan program yang lebih baik di masa mendatang. Semoga

laporan ini memberikan manfaat dan inspirasi bagi semua pihak yang berkepentingan

Wassalaamuálaikum Wr.Wb

Surabaya, Januari 2025

PLT.Kepala Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya



Adi Nugroho, S.T., M.MT.





DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIFii	IK.1.3 Persentase Penanganan Gangguan
KATA PENGANTAR vi	Spektrum Frekuensi Radio 29
DAFTAR ISIviii	IK.1.4 Persentase Penertiban Spektrum
DAFTAR TABEL ix	Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat
DAFTAR GAMBAR x	Telekomunikasi35
DAFTAR GRAFIK xii	IK.1.5 Berfungsinya Perangkat Pendukung
	SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di
BABIPENDAHULUAN	UPT39
1.1 Latar Belakang02	IK.1.6. Persentase (%) Pelaksanaan Ujian
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan	Negara Amatir Radio Berbasis CAT 42
LAKIN	IK.1.7. Persentase (%) Penanganan Piutang
1.3 Struktur Organisasi & Komposisi	dan Koordinasi Pelimpahan ke
Pegawai04	KPKNL (SPP BHP)
1.4 Sarana dan Prasarana 06	IK.1.8 Persentase (%) Sosialisasi Layanan
1.5 Tema dan Peran Strategis07	Publik dan Survey Kepuasan
1.6 Sistematika Pelaporan LAKIN 08	Masyarakat
	IK.1.9 Persentase (%) Bimbingan Teknis
BAB II PERENCANAAN KINERJA	SRC/LRC50
2.1 Rencana Strategis	IK.1.10Persentase (%) ISR Maritim Nelayan
2.1.1 Pengelolaan Spektrum Frekuensi	Program MOTS-IKRAN 52
Radio	IK.1.11Persentase (%) Verifikasi Data
2.1.2 Penyelenggaraan Layanan Publik	Koordinat Site ISR Microwave Link
Bidang Spektrum Frekuensi	dan Penyiaran (QR Code Site)
Radio dan APT11	Program Prima Aksi Loket Pelayanan 55
2.1.3 Pengelolaan Keuangan, BMN,	
dan Umum11	Sasaran 2:
2.2.Perjanjian Kinerja Balai Monitor SFR	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi
Kelas I Surabaya (2024)	yang Efektif dan Efisien58
	2.1. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Infrastruktur Digital (IKPA)
Sasaran 1:	2.2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan
Meningkatnya Layanan Monitoring,	UAKPA Tahun 2024
Pengukuran, Inspeksi, Penertiban, Serta	
Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio	KEGIATAN PENTING LAINNYA
dan Perangkat Telekomunikasi	
	BAB IV PENUTUP
IK.1.1 Monitoring Penggunaan Spektrum	4.1 Dampak
Frekuensi Radio di Kab/Kota 16	4.2 Kesimpulan
IK. 1.2 Persentase Pemeriksaan Stasiun	4.3 Saran
Radio (Inspeksi)	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	SMFR Station dan Transportable	Tabel 20	Hasil kalibrasi Tahun 2024 41
	Station Balai Monitor SFR Kelas I	Tabel 21	Perbandingan Target dan Realisasi
	Surabaya06		Tahun 2021-2024
Tabel 2	Kendaraan Operasional Balai Monitor	Tabel 22	Persentase Pelaksanaan UNAR Tahun
	SFR Kelas I Surabaya Tahun 202407		2024
Tabel 3	Pengadaan BMN Perangkat	Tabel 23	Target dan Realisasi Penanganan
	Penunjang Radio Monitoring Tahun		Piutang dan Koordinasi Pelimpahan
	202407		ke KPKNL (SPP BHP)
Tabel 4	Perangkat Rusak selama Tahun 2024 07	Tabel 24	Koordinasi Piutang ke KPKNL di
Tabel 5	Hasil Pelaksanaan PK 202412		Wilayah Jawa Timur 2024
Tabel 6	Sasaran, Indikator, Target dan	Tabel 25	Persentase Target dan Realisasi
	Realisasi Monitoring Penggunaan SFR		Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun
	di Kab/Kota		2024
Tabel 7	Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio	Tabel 26	Persentase Target dan Realisasi
	(Inspeksi)		Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun
Tabel 8	Persentase Capaian Pemeriksaan		2021-202347
	Stasiun Radio Tahun 2020-2021	Tabel 27	Persentase Target dan Realisasi Survei
Tabel 9	Persentase Capaian Pemeriksaan		Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 48
	Stasiun Radio Periode 2022-202425	Tabel 28	Persentase Peserta Bimtek dan atau
Tabel 10	Persentase Capaian Pengukuran		SRC/LRC Nelayan Program MOTS
	Stasiun Siaran Tahun 2020 - 2024		Tahun 2024 50
Tabel 11	Persentase Capaian Monitoring APT	Tabel 29	Persentase ISR Marine/IKRAN
	Tahun 2020 s/d Tahun 2024		Program MOTS Tahun 2024 52
Tabel 12	Target dan Realisasi Pemeriksaan	Tabel 30	Target Lokasi Verifikasi Data
	Stasiun Radio Tahun 2022 – 2024 27		Koordinat Site 202455
Tabel 13	Capaian Target dan Realisasi	Tabel 31	Target dan Realisasi Verifikasi Data
	Penanganan Gangguan 2022-202430		Koordinat Site ISR Microwave Link
Tabel 14	Wilayah Gangguan SFR Dinas		dan Penyiaran (QR Code) Program
	Keselamatan		Prima Aksi Tahun 2024
Tabel 15	Persentase Target dan Realisasi	Tabel 32	Target dan Realisasi Verifikasi Data
	Penertiban SFR dan Alat/Perangkat		Koordinat Site ISR Microwave Link
	Telekomunikasi Tahun 202435		dan Penyiaran (QR Code) Program
Tabel 16	Persentase Target dan Realisasi		Prima Aksi Tahun 2022-202455
	Penertiban SFR dan Alat/Perangkat	Tabel 33	Tabel Realisasi Prima Aksi Per
	Telekomunikasi Tahun 2020-2024 35		Kab/Kota
Tabel 17	14 SMFR Balai Monitor SFR Kelas I	Tabel 34	Pelayanan kepada pengguna frekuensi
	Surabaya39		radio
Tabel 18	Target dan Realisasi Berfungsinya	Tabel 35	Deviasi Bulanan Perjenis Belanja Balai
	Perangkat Pendukung SMFR dan Alat		Monitor SFR Kelas I Surabaya Tahun
friends of a second	Monitoring/Ukur 2024		2024 58
Tabel 19	Perbaikan Perangkat SMFR 40	Tabel 36	Penyerapan Anggaran 58

DAFTAR TABEL

Tabel 37 Indeks Komposit Belanja Kontraktual 59	Tabel 43 Hasil Nilai Kualitas Pelaporan		
Tabel 38 Laporan Indikator Kinerja	Keuangan Tingkat Satuan Kerja 62		
Penyelesaian Tagihan Balai Monitor	Tabel 44 SHR (Hasil Rekonsiliasi SAKTI -SPAN)		
Kelas I Surabaya Tahun 202459	sampai dengan periode 31 Desember		
Tabel 39 Indikator UP dan TUP Balai Monitor	2024 dengan hasil yang bersih/ clear		
SFR Kelas I Surabaya Tahun 2024 59	tanpa selisih 64		
Tabel 40 Indikator Capaian Output Balai	Tabel 45 Benchmarking Balai Monitor SFR		
Monitor SFR Kelas I Surabaya Tahun	Kelas I Surabaya dan Balai Monitor		
2024	SFR Kelas I Yogyakarta Terkait		
Tabel 41 NKA Balai Monitor SFR Kelas I	Capaian Kinerja 2024		
Surabaya 202459			
Tabel 42 Indikator Pelaksanaan Anggaran			
(IKPA) Balai Monitor Kelas I Surabaya			
Tahun 2024			

DAFTAR GAMBAR

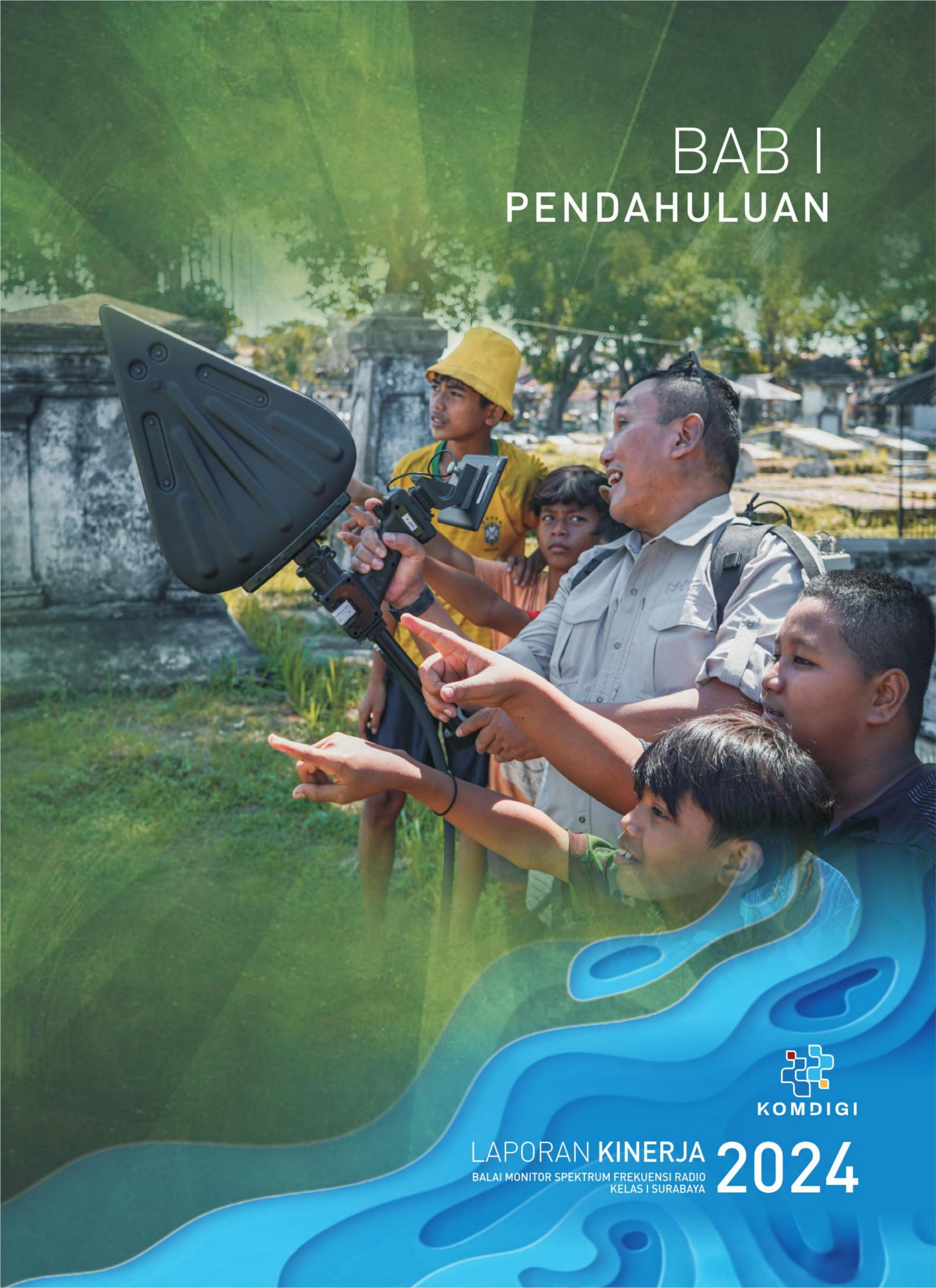
Gambar 1	Sasaran Kinerja, Indikator Kinerja,	Gambar 12 Kegiatan Penanganan Gangguan
Gumbur	Target dan Realisasi PK Balai	2024
	Monitor SFR Kelas I Surabaya iv	Gambar 13 Pemeriksaan azimuth antenna dan
	gg. 692 ggs	
Gambar 2	Peta Wilayah Kerja Balai Monitor	power pemancar LPP TVRI Gn.
	SFR Kelas I Surabaya	Gading
Gambar 3	Struktur Organisasi Balai Monitor	Gambar 14 Melakukan observasi, monitoring,
	SFR Kelas I Surabaya 2024 04	pengukuran dalam rangka
Gambar 4	Komposisi Pegawai Balai Monitor 08	penanganan gangguan frekuensi
	SFR Kelas I Surabaya Tahun 2024 08	radio 853.6625 MHz PT.PLN Unit
Gambar 5	Sistematika Pelaporan LAKIN 2024 08	Pelaksana Pengatur Distribusi
Gambar 6	Kegiatan Monitoring Spektrum	(UP2D) Jatim
	Frekuensi Radio Tahun202423	Gambar 15 Timeline Penertiban Jawa Timur
Gambar 7	Hasil Pengukuran Stasiun Siaran	2024
	Radio FM Tahun 2024 4825	Gambar 16 Kegiatan Penertiban Tahun 2024 37
Gambar 8	Kepatuhan Hasil Pengukuran Partek	Gambar 17 Penempatan Stasiun SMFR Tetap &
	TV Digital Tahun 2024	Transportable di Jawa Timur 39
Gambar 9	Kegiatan Inspeksi 202427	Gambar 18 Mobile Stasiun SMFR Balai Monitor
Gambar 10) Kegiatan Pemeriksaan dan	SFR Kelas I Surabaya
	Pengukuran Stasiun Siaran 28	
Gambar 11	Kegiatan Monitoring Alat/Perangkat	

Telekomunikasi 29

Gambar 19 Realisasi kegiatan mendukung	Gambar 33 Hukum di Tengah Kita bersama JTV
berfungsinya perangkat pendukung	Tahun 2024
SMFR dan alat monitoring/ukur	Gambar 34 Sosialisasi bersama JTV Tahun 2024 74
tahun 2024	Gambar 35 Sosialisasi Peran Balmon Dalam
Gambar 20 Rekapitulasi penyelenggaraan	Pengawasan Frekuensi Radio75
UNAR 2024	Gambar 36 Sosialisasi dengan Tema Era
Gambar 21 Pelaksanaan UNAR CAT 2024	Penyiaran Digital yang Aman dan
Gambar 22 Pendistribusian SPP-BHP dan	Bersih
Koordinasi dengan KPKNL	Gambar 37 Sosialisasi Peran Balmon Dalam
Gambar 23 Sosialisasi Pelayanan Publik 49	Pengawasan Frekuensi Radio76
Gambar 24 Pelaksanaan Kegiatan	Gambar 38 Pelaksanaan Kegiatan Ujian REOR
Bimtek/Sosilisasi SRC/LRC Tahun	2024
2024	Gambar 39 Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut
Gambar 25 Pelaksanaan Loket Pelayanan ISR	Penertiban77
Maritim Tahun 2024	Gambar 40 Suasana Upacara Bendera
Gambar 26 Dokumentasi Kegiatan Verifikasi	Peringatan HUT RI Ke-79
Koordinat Site Bersamaan Dengan	Gambar 41 Suasana Inventarisasi Arsip Inaktif 79
Kegiatan Inspeksi MW Link Seluler 56	Gambar 42 Peringatan Hari Bhakti Postel ke
Gambar 27 Kegiatan Pelayanan di Loket Balai	-79
Monitor SFR Kelas I Surabaya57	Gambar 43 Situasi Audit Eksternal ISO
Gambar 28 Pelaksanaan Kegiatan Terkait	9001:2015 Tahun 2024
Pengelolaan Anggaran Tahun 2024 61	Gambar 44 Evaluasi Capaian Kinerja Tahun
Gambar 29 Kegiatan kegiatan penyusunan LK	2024
Semester II Unaudited TA 2024	Gambar 45 Pemusnahan Alat/Perangkat
yang dilaksanakan di Depok Jawa	Telekomunikasi Hasil Operasi
Barat	Penertiban83
Gambar 30 Peremajaan Interior Kantor Sebelum	Gambar 46 Dokumentasi Kegiatan
dan Sesudah65	Benchmarking
Gambar 31 Kegiatan Pengamanan Natal dan	Gambar 47 Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya
Tahun Baru di Jawa Timur 72	Peringkat 1 Satker Terbaik atas
Gambar 32 Pelaksanaan Medical Check-Up	Laporan Keuangan Semester I
Tahun 2024	Tahun 202488

DAFTAR GRAFIK

	Grafik 1	Monitoring Pita Frekuensi Radio di	Grafik 15	Realisasi Jangka Menengah	
		Kabupaten/Kota 2024		Penanganan Gangguan	
	Grafik 2	Monitoring Rutin Pita Frekuensi	Grafik 16	Target dan Realisasi PK tahun 2020	
		Marabahaya 2024		s.d 2024	
	Grafik 3	Capaian Penggunaan Spektrum	Grafik 17	Hasil Penertiban 202436	
		Frekuensi Radio Kurun Waktu 5	Grafik 18	Alat/Perangkat Telekomunikasi 36	
		Tahun	Grafik 19	Tindakan Penertiban	
	Grafik 4	Target dan Capaian Monitoring SFR	Grafik 20	Rekapitulasi Denda Administratif 37	
		Tahun 2020 s.d 2024	Grafik 21	Perbandingan Jumlah Peserta UNAR	
	Grafik 5	Jumlah Stasiun Siaran Radio FM		2023-2024	
		Terukur Tahun 2024	Grafik 22	Status IAR Tahun 2023 dan 2024 43	
	Grafik 6	Hasil Pengukuran Stasiun Siaran TV	Grafik 23	Jumlah Penyampaian SPP-BHP	
		Digital Tahun 2024		Frekuensi	
	Grafik 7	Jumlah Penyelenggara Mux dan	Grafik 24	Target dan Realisasi Penanganan	
		Penyelenggara Program Siar		Piutang dan Koordinasi Pelimpahan	
	Grafik 8	Hasil Monitoring Alat/Perangkat		ke KPKNL	
		Telekomunikasi Tahun 2024 26	Grafik 25	Capaian Bimtek / Sosialisasi SRC/LRC	
	Gratik 9	Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio		Tahun 202450	
	C (1 10	Tahun 2020 - 2024		Capaian ISR MOTS Tahun 2024 53	
	Grafik 10	Wilayah Gangguan SFR di Jawa	Grafik 27	Perbandingan Capaian ISR MOTS	
	Cuefil, 11	Conserver CER Pardeseden Comics 30	C ("I oo	Tahun 2023-2024	
		Gangguan SFR Berdasarkan Service 31		Jumlah tamu di loket pelayanan 57	
	Grank 12	Capaian Target Renstra 5 Tahun Terakhir	Grafik 29	Rekapitulasi Pelaksanaan REOR 76	
	Crafik 13	Penanganan Gangguan Periode 5		The state of the s	
	Grank 13	Tahun			
	Grafik 14	Status Gangguan Tahun 202432	The same of the sa		
	A Grank 14	Status Gangguan Tanun 2024			
A. F.					
Y11 XX					
M					
	AP.				
	THE WATER				A TOP OF THE PROPERTY OF THE P
			W X		
1					
*					
	F				
	I FAKIN TAHUN 20	24 - BALMON SER KELAS ISLIBATIVA			
× 1	LANCIN ZO		A PA		



PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada tahun 2024, dinamika ekonomi, politik, serta sosial budaya di Indonesia terus mengalami perubahan signifikan, seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat.

Digitalisasi di berbagai sektor, termasuk industri, pemerintahan, dan layanan publik, semakin mendorong kebutuhan akan spektrum frekuensi radio yang optimal dan tertata dengan baik. Dalam konteks ini, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Kelas I Surabaya memiliki peran strategis dalam memastikan penggunaan spektrum frekuensi yang tertib, efisien, dan bebas dari gangguan, demi mendukung kelancaran komunikasi nasional.

Tahun 2024 merupakan tahun yang luar biasa jika dipandang dari aspek ekonomi, politik, sosial budaya. Dari sudut pandang ekonomi, perekonomian Indonesia di tahun 2024 menunjukkan pemulihan dan pertumbuhan yang stabil setelah melalui berbagai tantangan global. Sektor telekomunikasi menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital, dengan meningkatnya investasi di bidang infrastruktur jaringan 5G, IoT (Internet of Things), dan teknologi nirkabel lainnya. Seiring dengan ekspansi layanan digital, kebutuhan akan spektrum frekuensi radio semakin meningkat, baik untuk keperluan komersial maupun publik. Balmon Kelas I Surabaya berperan dalam mengawasi dan memastikan penggunaan spektrum yang sesuai regulasi agar tidak terjadi gangguan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi berbasis digital.

Tahun 2024 juga merupakan tahun yang penting dalam lanskap politik nasional, dengan berbagai kebijakan strategis yang dikeluarkan pemerintah untuk mendukung transformasi digital. Pemerintah terus memperkuat regulasi terkait pengelolaan spektrum frekuensi, termasuk pengawasan terhadap penyalahgunaan dan potensi interferensi yang dapat mengganggu layanan telekomunikasi dan penyiaran. Balmon Kelas I Surabaya memiliki tanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini, termasuk pengawasan frekuensi, penindakan terhadap pelanggaran, serta koordinasi dengan

berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan lingkungan komunikasi yang aman dan andal.

Perubahan sosial budaya yang dipicu oleh digitalisasi juga mempengaruhi pola komunikasi masyarakat. Penggunaan perangkat komunikasi berbasis frekuensi, seperti telepon seluler, internet broadband, serta sistem penyiaran digital, semakin meningkat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Namun, peningkatan ini juga berpotensi menimbulkan permasalahan, seperti gangguan sinyal, penggunaan frekuensi ilegal, dan penyalahgunaan spektrum untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Berbagai perubahan dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya tersebut di atas mendorong Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk melakukan penatakelolaan spektrum frekuensi radio secara efisien, efektif, dinamis dan lebih optimal melalui kegiatan penataan, perencanaan juga pengawasan penggunaannya. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditjen Infrastruktur Digital memiliki perpanjangan tangan di setiap daerah, salah satunya yaitu Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya (Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya) yang memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio. Tugas dimaksud yaitu melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penggunaan spektrum frekuensi radio serta memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana program;
- Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, dan pemantauan spektrum frekuensi radio;
- Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio dan standard perangkat pos dan informatika;
- d. Pelaksanaan pengukuran dan validasi data dan pengguna spektrum frekuensi radio;
- e. Penyampaian Ijin Stasiun Radio (ISR) dan Surat Pemberitahuan Pembayaran Biaya Hak Pengguna (SPP-BHP) Frekuensi serta pendampingan penyelesaian piutang Biaya Hak Pengguna frekuensi radio;
- f. Pelayanan pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;

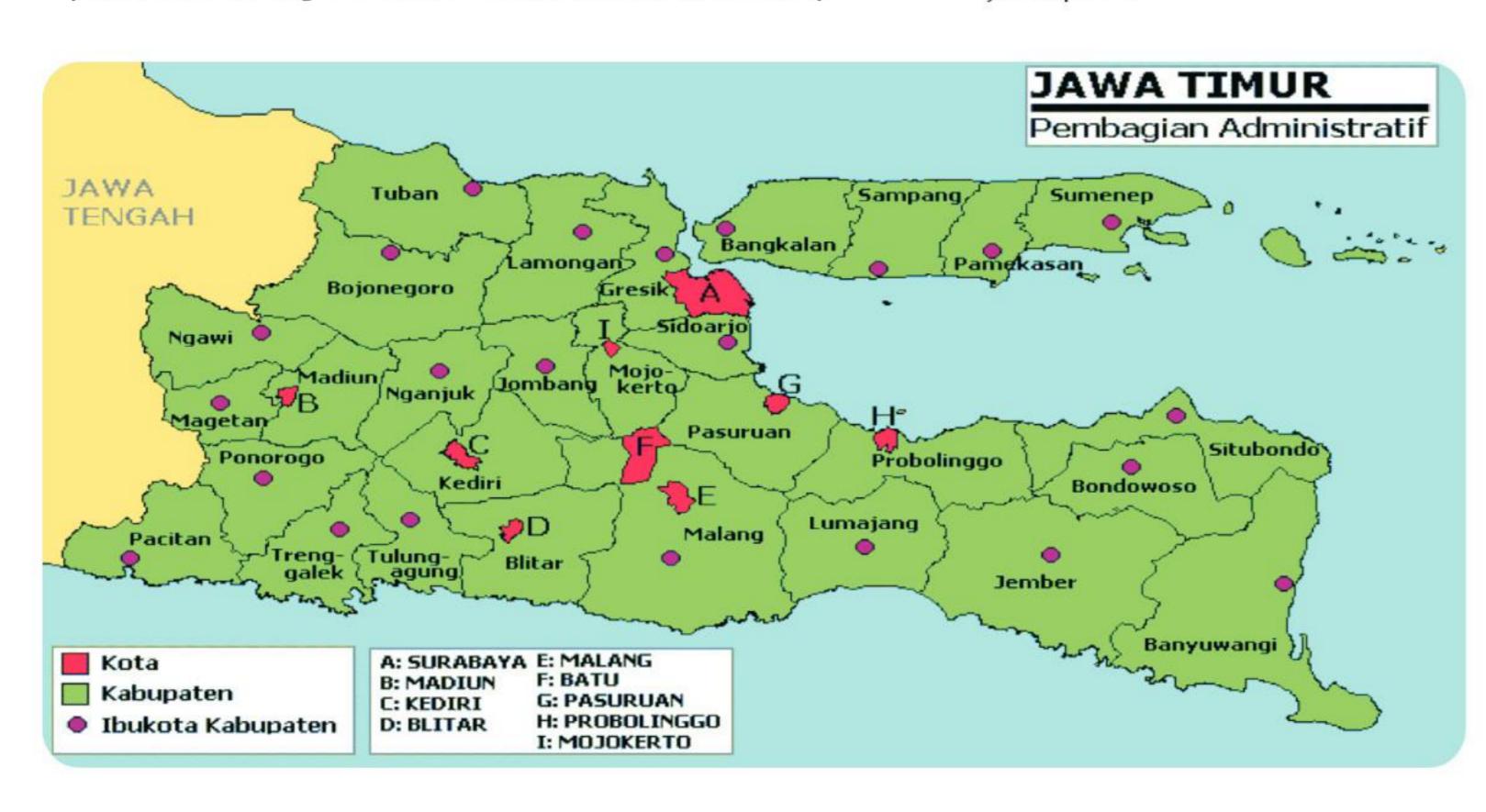
- g. Pelaksanaan, perbaikan, dan pemeliharaan perangkat monitor frekuensi radio;
- h. Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio;
- i. Pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio

Di tengah tantangan dan peluang yang dihadapi pada tahun 2024, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya terus berkomitmen untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengawasi, mengendalikan, dan mengoptimalkan penggunaan spektrum frekuensi radio. Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas selama tahun 2024, mencakup

capaian, tantangan, serta langkah-langkah strategis yang telah diambil untuk mendukung ekosistem komunikasi dan informasi yang lebih baik di wilayah kerja Jawa Timur.

Gambaran Umum Wilayah Jawa Timur

Provinsi Jawa Timur secara catatan geografisnya terletak pada 11100 Bujur Timur – 11404' Bujur Timur dan 70 12'Lintang Selatan – 8048"Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 47.963 km2 yang meliputi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur daratan dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 88,70 persen atau 42.541 km2, sementara luas Kepulauan Madura memiliki luas 11.30 persen atau sebesar 5.422 km2 (Sumber: jatimprov)



Gambar 2. Peta Wilayah Kerja Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya

Secara wilayah Jawa Timur terbagi ke dalam 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan Kota Surabaya sebagai Ibukota Provinsi dan menjadikannya sebagai Provinsi yang memiliki jumlah Kabupaten/Kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur terbagi dalam 4 Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil), sebagai berikut:

- Bakorwil I Madiun meliputi Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Ngawi, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kota Blitar, Kab. Blitar, dan Kab. Nganjuk.
- Bakorwil II Bojonegoro meliputi Kab. Bojonegoro, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kota Kediri, kab. Kediri, Kab. Jombang, dan Kab. Lamongan.
- Bakorwil III Malang, meliputi Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu, Kota Pasuruan, Kab. Pasuruan, Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Bondowoso, Kab. Situbondo dan Kab. Banyuwangi.
- 4. Bakorwil IV Pamekasan meliputi, Kota Surabaya, Kab. Sidoarajo, Kab. Gresik, Kab. Bangkalan,

Kab. Sampang, Kab. Pamekasan, dan Kab Sumenep.

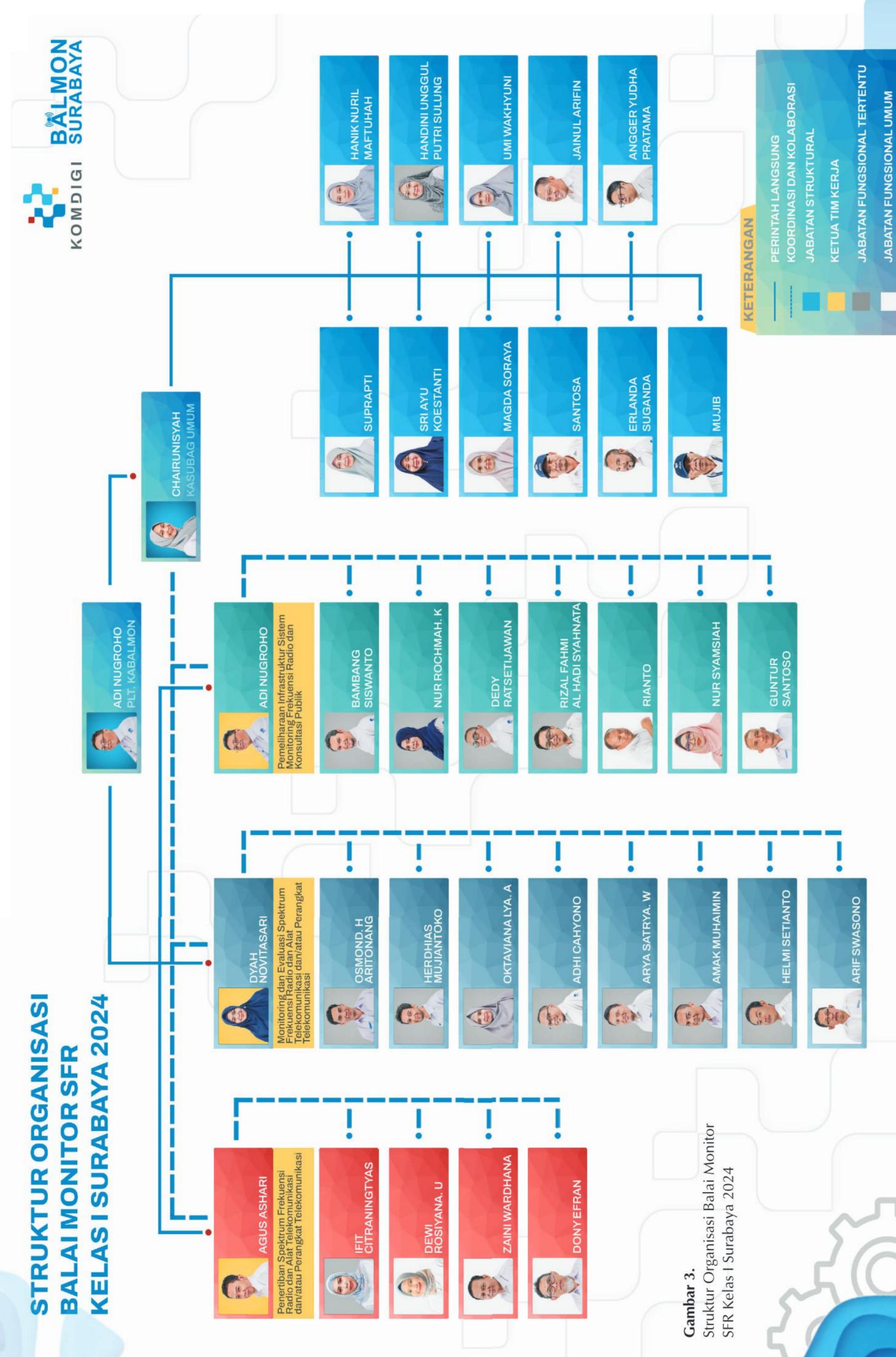
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIN

MAKSUD

Penyusunan LAKIN 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya kepada Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dalam melaksanakan tugas, pokok, dan fungsi serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai target/sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024

TUJUAN

Tujuan dari penyusunan LAKIN 2024 ini untuk melakukan penilaian dan evaluasi kinerja terhadap Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dalam upaya meningkatkan kinerja di waktu yang akan datang.



1.3. Struktur Organisasi dan Komposisi Pegawai

Susunan Organisasi Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya terdiri atas:

- a. Subbagian Umum Memiliki tugas melakukan perencanaan dan program, urusan keuangan, kepegawaian, k e t a t a u s a h a a n , p e r l e n g k a p a n , kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan
- b. Tim Kerja Teknis Tim Kerja di Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya terdiri dari:
 - Tim Kerja Monitoring dan Evaluasi Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi
 - Tim Kerja Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat Telekomunikasi dan/atau Perangkat Telekomunikasi

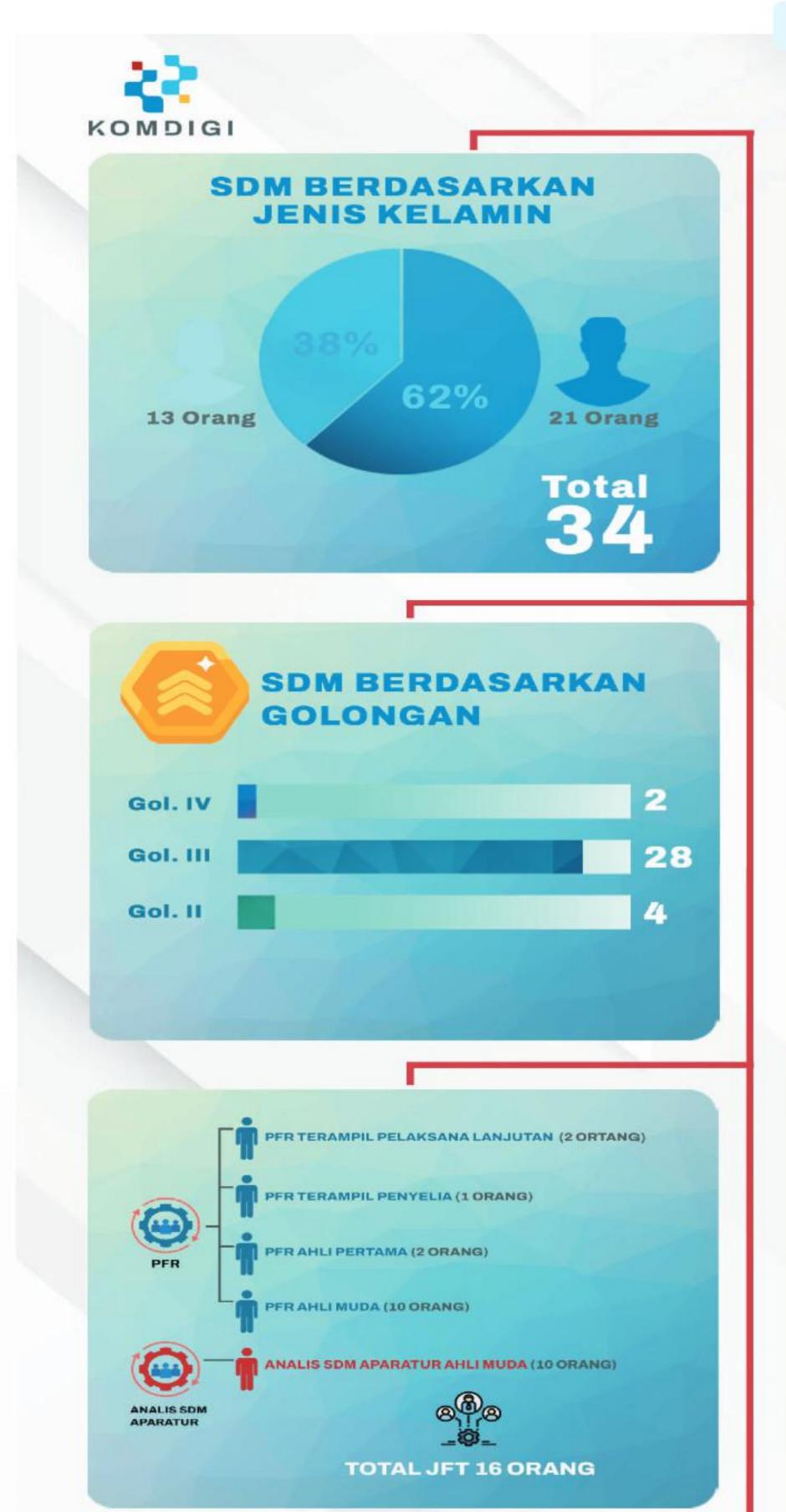
 Tim Kerja Pemeliharaan Infrastruktur Sistem Monitoring Frekuensi Radio dan Konsultasi Publik

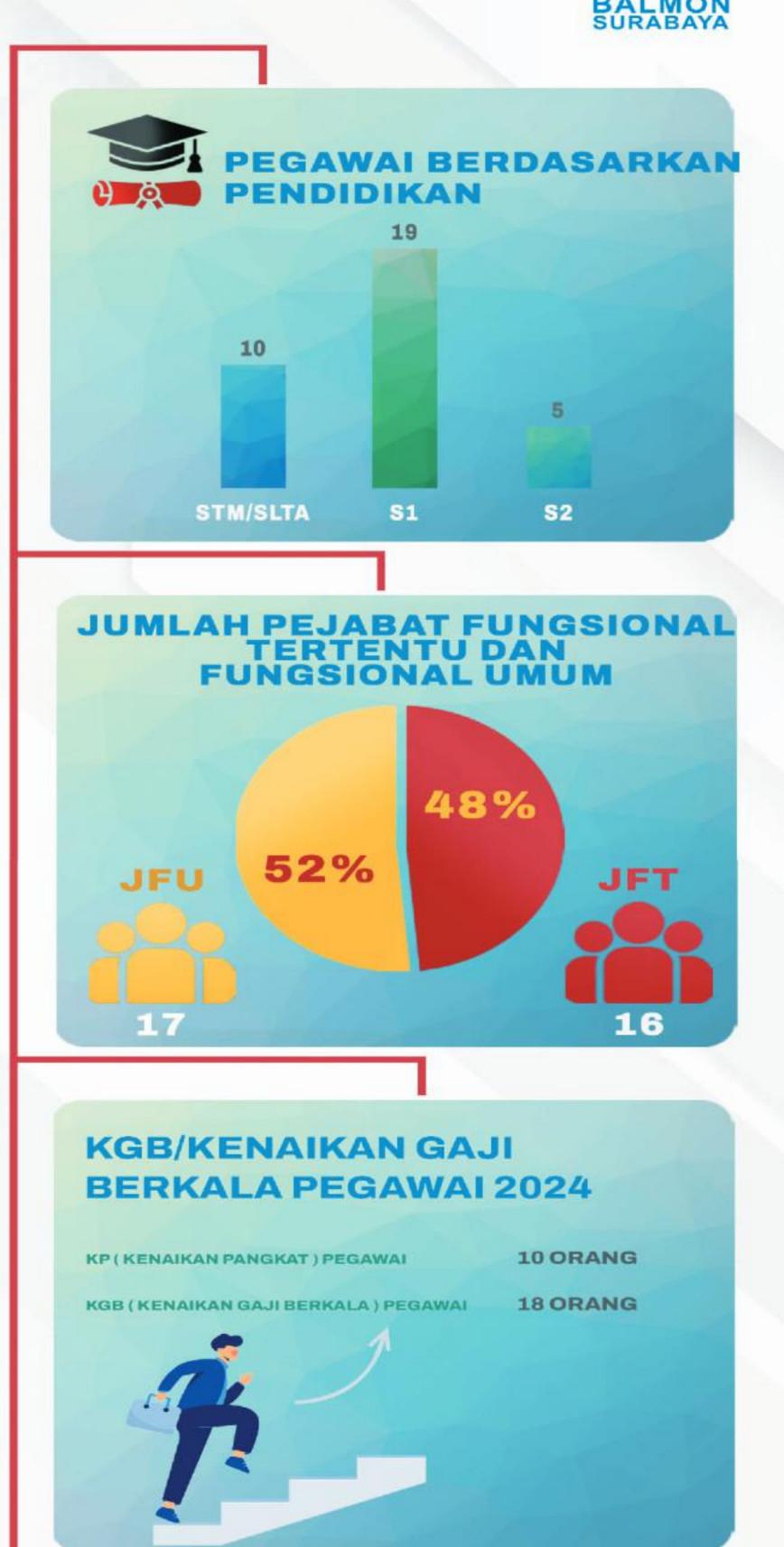
Setiap Tim Kerja pemiliki Ketua Tim yang mengkoordinasi pelaksanaan tugas teknis yang dilaksanakan untuk pencapaian target. Anggota dari Tim Kerja terdiri dari Pejabat Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Pelaksana

Komposisi Pegawai

Jumlah SDM sampai dengan akhir tahun 2025 Balmon SFR Kelas I Surabaya sebanyak 34 orang, yang terdiri dari pegawai laki-laki sebanyak 21 orang dan 13 orang untuk pegawai perempuan.

Gambar 4. Komposisi Pegawai Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya Tahun







1.4. Sarana dan Prasarana

Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya, berkantor pusat di Jl. Ketintang Baru I No. 22 Surabaya, berdiri di atas tanah seluas 2439 m2 dan luas bangunan 1680 m2 yang terdiri atas 3 lantai. Selain sebagai gedung/kantor juga berfungsi sebagai *master station* yang berfungsi untuk pelaksanaan tugas *monitoring* penggunaan spektrum frekuensi radio di Jawa Timur.

Pengawasan penggunaan frekuensi di wilayah Jawa Timur didukung oleh 7 (tujuh) SMFR Station, dan 7 (tujuh) Transportable Station. Rincian lokasi masing - masing station sebagai berikut:

Tabel 1. SMFR Station dan Transportable Station Balai Monitor SFR Kelas I

No	Nama Stasiun SMFR	Alamat	Luas Tanah (m2)	Luas Bangunan (m2)	Kepemilikan	Keterangan
1	CC Surabaya/ Surabaya Mon	JI. Ketintang Baru I/22 Surabaya	2.439	1.680	BMN	Kantor Utama
2	Mulyorejo	Jl. Mulyorejo Utara Surabaya	1.200	71	BMN	Slave, rumah jaga
3	Benowo	Jl. Perum Kehakiman, Ds. Babat Jerawat, Benowo, Surabaya	1.207	81	BMN	Slave, rumah jaga, gudang
4	Sukodono	Jl. Becitro, Jumputrejo, Sukodono, Sidoarjo	1.200	267	BMN	Slave, rumah jaga, Gudang, garasi dan rumah operator
5	Malang	Jl. KH. Wachid Hasyim, Malang (RSIA)	4	4	Sewa	Ruangan dan rooftop
6	Kediri	Jl. Mayjend Sungkono Kediri (Kantor Pos)	4	5	Sewa	Ruangan dan rooftop
7	Probolinggo	Jl. Suroyo Probolinggo (Kantor Pos)	=	5	Sewa	Ruangan dan tower 20m
8	Jember	Jl. Tanjung Sari, Mayang, Jember	4	1	Sewa	Ruangan dan lahan
9	Bojonegoro	Jl. WR. Supratman No.3, Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro	467	200	BMN	Slave
10	Glagah	Jl. Raya Lijen Kec. Glagah Kab. Banyuwangi	-	2.44	Sewa	Ruangan dan rooftop
11	Singojuruh	Jl. Tawang Alun Talangrejo Kec. Singojuruh Kab. Banyuwangi	=	2.44	Sewa	Ruangan dan rooftop
12	Srono	Kantor LP Ma'arif NU, Kec. Srono Kab. Banyuwangi	-	2.44	Sewa	Ruangan dan rooftop
13	Madiun	RSUD dr Soedono, Jl. Dr. Sutomo No.59, Kec. Kartoharjo Kota Madiun	-	2.44	Sewa	Ruangan dan rooftop
14	Tulungagung	RSUD dr. Iskak, Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Kec. Kedungwaru Kab. Tulungagung	5	2.44	Sewa	Ruangan dan rooftop

- Slave Station Mulyorejo, berlokasi di Kec. Mulyorejo Kota Surabaya dengan luas tanah 1.200 m2, luas bangunan slave 50 m2, luas bangunan rumah jaga 21 m2. Titik koordinat 07o15'43" LS dan 112o477'05" BT terletak pada sudut 43o dari Master Station.
- Slave Station Benowo, berlokasi di Desa Babatjerawat Kec. Benowo, Kota Surabaya dengan luas tanah 1.207 m2, luas bangunan slave 50 m2, luas bangunan gudang 10 m2 dan
- luas bangunan rumah jaga 21 m2. Titik koordinat 07o14'48" LS dan 112o37'43" BT terletak pada sudut 304o dari *Master Station*.
- Slave Station Sukodono, berlokasi di Desa Jumputrejo Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo dengan luas tanah 1.200 m2, luas bangunan slave 50 m2, luas bangunan gudang 10 m2 dan luas bangunan rumah jaga 21 m2 titik koordinat 07o24′51″ LS dan 112º41′50″ BT terletak pada sudut 198 dari Master Station.

Di lokasi ini juga terdapat bangunan garasi untuk SMF bergerak seluas 150 m2 dan untuk operator seluas 36 m2.

Sedangkan uraian terkait fasilitas yang dimiliki Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya sebagai berikut:

- Rumah Dinas, berlokasi di Jalan Ketintang Baru VIII Nomor 14, 14A, 14B dan 14 C sebanyak 4 unit (type 70 sebanyak 1 unit), masing-masing untuk pejabat eselon III (1 orang) dan eselon IV (3 orang) di lingkungan Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya.
- Tanah dan bangunan, berlokasi di titik koordinat 0709'8" LS dan 111□53'23" BT, Jl. WR. Supratman, Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro dengan luas tanah 467 m2 dan luas bangunan 200 m2 yang direncanakan akan menjadi stasiun monitoring frekuensi Radio Bojonegoro.
- Tanah dan bangunan, berlokasi di titik koordinat 0709'8" LS dan 111□53'23" BT, Jl. WR. Supratman, Desa Kadipaten, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro dengan luas tanah 467 m2 dan luas bangunan 200 m2 yang direncanakan akan menjadi stasiun monitoring frekuensi Radio Bojonegoro.
- SMFR Station dan Transportable Station, perangkat pemantauan frekuensi radio perangkat ini membantu menjangkau lokasi monitor di wilayah tertentu dimana stasiun monitor ditempatkan. SMFR Station ditempatkan di wilayah Malang, Kediri dan Probolinggo, Transportable station (LS Telecom) ditempatkan di Jember dan Bojonegoro, Transportable station (TCI) ditempatkan di Banyuwangi (Glagah, Singojuruh dan Srono), Madiun dan Tulungagung.

Selain sarana dan prasarana, tanah, gedung, dan perangkat monitor, juga didukung oleh kendaraan operasional sebagai berikut:

Tabel 2. Kendaraan Operasional Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya Tahun 2024

No	Jenis Kendaraan	Merk	Jumlah
1	Kendaraan Roda-4	Toyota Kijang Inova	5 Unit
2	Kendaraan Roda-4	Toyota Hilux	2 Unit
3	Kendaraan Roda-4	Isuzu MU-X	1 Unit
4	Kendaraan Roda-2	Honda Tiger	1 Unit
5	Kendaraan Roda-2	Honda Supra 125CC	2 Unit
6	Kendaraan Roda-2	Honda Vario	1 Unit
7	Kendaraan Roda-2	Honda	3 Unit

Penambahan BMN Perangkat Radio Monitoring Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian frekuensi radio, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya menambah perangkat Radio *Monitoring* melalui:

Tabel 3. Pengadaan BMN Perangkat Penunjang Radio Monitoring Tahun 2024

NO	NAMA BARANG	Jumlah	Satuan	MERK/TIPE
1	Direction Finder	1	set	Rohde&Schwarz PR200
2	TV Analyzer	1	Unit	Sefram 7885-4k
3	SDR	3	Unit	Merah Putih
4	GPA	1	Unit	GPA25
5	Low Loss Cable	1	Unit	Sucoflex

Pemakaian yang terus menerus serta usia ekonomis perangkat yang semakin menua menyebabkan fungsi dan kalibrasi perangkat semakin menurun. Beberapa peragkat yang tercatat rusak atau berkurang ke-akuratan penggunaannya di tahun 2024 antara lain:

Tabel 4. Perangkat Rusak selama Tahun 2024

No	Nama Barang	NUP	Masa Pemakaian	Status Barang (Berfungsi, Rusak Ringan, Rusak Berat)
1	Telescope Tile Variable	1 dan 2	13 tahun	Rusak Berat
2	Fieldstrength Meter	13-14	13-16 tahun	Rusak Berat

1.5. Tema dan Peran Strategis

Berbagai permasalahan/tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya diantaranya:

- a. Padatnya pengguna spektrum frekuensi radio di wilayah Jawa Timur
- b. Banyaknya pengguna spektrum frekuensi radio yang belum memiliki Izin Stasiun Radio (ISR)
- c. Adanya perubahan kebijakan dalam pengawasan barang importasi yang masuk ke Indonesia
- d. Banyaknya peredaran dan penggunaan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan standar teknis atau belum memiliki sertifikasi perangkat
- e. Terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam menghadapi perubahan transformasi digital
- f. Penggunaan frekuensi tidak sesuai ketentuannya yang menimbulkan interferensi atau gangguan
- g. Pengguna frekuensi yang terlambat membayar Biaya Hak Penggunaan Frekuensi.
- h. Ketidakonsistenan dalam mengim-

- plementasikan Standar Pengawasan dan Pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio.
- Sistem punish and reward yang tidak jelas bagi PNS.
- Tidak adanya tugas pokok memberikan bimbingan terkait proses perijinan pada masyarakat dalam tupoksi UPT.
- k. Adanya kewenangan K/L lain dalam satu proses ijin.
- I. Adanya regulasi yang terkesan menghambat dalam proses ijin.
- m. Keterampilan masyarakat dalam penggunaan IT yang berbeda-beda.
- n. Kurangnya peran pembinaan organisasi pengguna frekuensi pada anggotanya.
- Belum pernah ada penelitian yang meneliti manfaat keberadaan UPT Bidang Monitor bagi masyarakat.

Analisis SWOT Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya sebagai berikut:

Strength (kekuatan)

- 1. Sumber Daya Manusia yang dikirim pelatihan/workdshop sudah lulus semua.
- 2. Anggaran yang cukup.
- 3. Fasilitas kerja yang memadai.

Weakness (kelemahan)

- 1. Tidak semua Sumber daya manusia memahami regulasi yang ada.
- 2. Regulasi yang ada belum mengatur semua kegiatan yang dilaksanakan.
- 3. Kurang fleksiblenya pola penggunaan anggaran.

Opportunity (peluang)

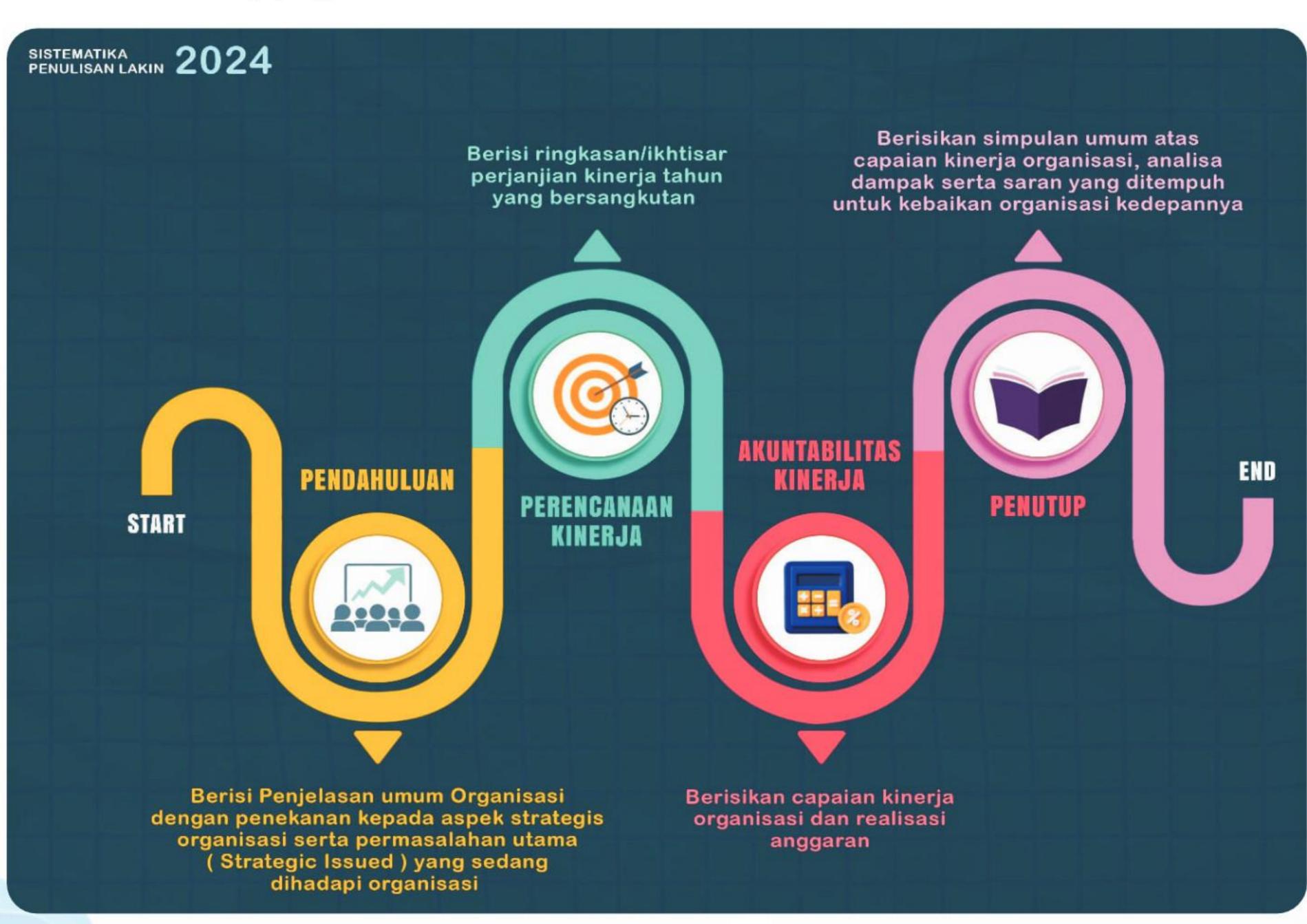
- 1. Tingginya keinginan untuk mendapatkan ijin.
- 2. Penerimaan PNBP yang tinggi.
- Tujuan Strategi Kominfo untuk meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK.

Threat (ancaman)

- 1. Kontur wilayah yang bervariasi.
- 2. Mudahnya pembelian perangkat komunikasi.
- 3. Regulasi yang berubah-ubah.

1.6 Sistematika Pelaporan LAKIN 2024

Gambar 4. Sistematika Pelaporan LAKIN Tahun 2024





PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya sebagai UPT Ditjen Infrastruktur Digital mendukung sepenuhnya rencana strategis tahun 2020-2024 yang disusun oleh Ditjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika yang berubah nomenklaturnya menjadi Ditjen Infrastruktur Digital (DJ-ID), agar mampu memenuhi kebutuhan pencapaian-pencapaian pembangunan nasional yang telah dicanangkan. Adapun visi Indonesia Hebat di bidang sumber daya dan perangkat pos dan informatika dalam mendukung kebijakan pembangunan nasional di bidang konektivitas adalah membuat regulasi dan kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan yang kondusif serta mendorong pertumbuhan secara berkelanjutan serta menyiapkan regulasi dan kebijakan yang tepat terkait pengelolaan spektrum frekuensi radio sebagai sumber daya yang terbatas agar efisien dan efektif. Untuk mendukung terwujudnya visi tersebut, ada sejumlah misi yang diemban oleh Ditjen Infrastruktur Digital yang akan dilaksanakan oleh unit kerja berdasarkan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu:

- Mewujudkan tatanan spektrum radio yang efisien untuk mendorong pembangunan ekonomi berbasis wireless broadband.
- Mewujudkan pelayanan spektrum frekuensi radio dan sertifikasi perangkat yang cepat, tepat, dan benar serta berintegritas.
- Terkelolanya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari izin yang diberikan kepada para pemangku kepentingan di bidang Ditjen Infrastruktur Digital.
- Mewujudkan standar perangkat informatika yang mendukung kemandirian teknologi di bidang wireless broadband.
- 5. Mewujudkan kepastian hukum di bidang pengelolaan Infrastruktur digital.
- 6. Mewujudkan tertib penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi secara terpadu.
- 7. Mengembangkan sistem stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan sistem monitoring alat perangkat telekomunikasi yang terintegrasi secara nasional. Mengembangkan sistem stasiun monitoring spektrum frekuensi radio dan sistem monitoring perangkat yang terintegrasi secara nasional.
- Mewujudkan peningkatan kualitas layanan publik terkait penggunaan spektrum frekuensi radio.

9. Mewujudkan dukungan teknis dan mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Infrastruktur Digital.

Untuk mewujudkan misi tersebut, ada sejumlah sasaran program yang diemban oleh Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital yaitu sebagai berikut:

- Peningkatan kualitas penyelenggaraan layanan perizinan dengan e-licensing dan pengelolaan PNBP Ditjen Infrastruktur Digital
- 2. Optimalisasi pemanfataan spektrum frekuensi radio dengan pengawasan dan pengendalian
- 3. Meningkatkan efektifitas dalam penggunaan infrastruktur monitoring spektrum frekuensi radio untuk pengawasan. pengendalian
- 4. Pengembangan sumber daya manusia.
- Peningkatan kualitas tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien

Untuk mencapai sasaran program di atas, Ditjen Infrastruktur Digital melakukan rencana kegiatan yang dalam pelaksanaannya tentu memerlukan support/dukungan dari UPT di seluruh Indonesia, yaitu sebagai berikut:

2.1.1. Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio

Pengelolaan spektrum frekuensi radio mempunyau peran kunci utama dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan di bidang telekomunikasi dan teknologi informasi. Dengan pengelolaan yang baik, spektrum frekuensi dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung berbagai layanan komunikasi bagi masyarakat dan ekonomi.

Untuk mewujudkan tatanan spektrum frekuensi radio yang efektif, efisien, dinamis dan optimal dibutuhkan adanya alokasi frekuensi, pemberian izin, lisensi, pemantauan, pengawasan, dan penyelesaian gangguan spektrum frekuensi radio.

UPT Balai Monitor dalam pelayanan spektrum frekuensi radio memberikan layanan konsultasi pendampingan dan bimtek e-licensing, menjaga operasional perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) untuk mendukung kegiatan monitoring pengawasan dan pengendalian serta pengaduan penyelesaian gangguan spektrum frekuensi radio di wilayah Jawa Timur.

2.1.2. Penyelenggaraan Layanan Publik Bidang Spektrum Frekuensi Radio (SFR) dan Alat Perangkat Telekomunikasi (APT)

Dalam melaksanakan penyelenggaraan layanan di bidang SFR dan ATK dibutuhkan peningkatan penyelenggaraan layanan perizinan menggunakan e-licensing yang sudah terkoneksi dengan OSS. Selain itu, diperlukan juga peningkatan layanan dalam penanganan gangguan SFR bagi pengguna yang memiliki izin penggunaan SFR.

UPT sebagai perpanjangan tangan dari Dirjen DJID melakukan upaya peningkatan layanan pengawasan berupa observasi monitoring SFR dan APT, pengukuran, inspeksi dan pengendalian berupa penertiban SFR dan APT.

2.1.3. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

Pengelolaan keuangan, BMN dan Umum merupakan kegiatan untuk dukungan manajemen dan teknis yang dilakukan oleh Sekretariat Ditjen DJID dibantu oleh Unit Pelaksanaan Teknis di seluruh Indonesia sebagai dukungan teknis yang sesuai dengan reformasi birokrasi.

Layanan administrasi yang cepat, tepat, dan benar akan memberikan lingkungan yang kondusif bagi pelaku bisnis telekomunikasi serta masyarakat sebagai pengguna jasa dan layanan telekomunikasi.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya menetapkan arah kebijakan pelaksanan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pengendalian melalui kegiatan pemantauan, pengukuran, pemeriksaan (validasi) dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio.
- b. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia.
- c. Menjaga berfungsinya sarana, prasarana monitoring SMFR dan perangkat pendukungnya untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.
- d. Peningkatan kualitas pembinaan melalui sosialisasi penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi.
- e. Melakukan survei kepuasan Masyarakat
- f. Senantiasa melakukan evaluasi untuk peningkatan tata kerja dan kualitas pelaksanaan tugas.

2.2 Perjanjian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya

Perjanjian Kinerja sesuai Permenpan No 53 Tahun 2014 dan Permen Kominfo Nomor 13 Tahun 2015 Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target kinerja yang harus dicapai.

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya Tahun 2024 terdapat indikator baru yang harus di capai yaitu Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tahun 2024 dengan target 100.

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya Tahun 2024 terdiri dari 13 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan meliputi:

- Persentase (%) Monitoring Pengguna Spektrum Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota dengan target 100%
- 2. Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun radio (Inspeksi) target (100%)
- 3. Persentase (%) Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio dengan target (100%)
- 4. Persentase (%) Penertiban Frekuensi Radio dengan target (93%)
- 5. Persentase (%) Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ ukur di UPT dengan target (95%)
- 6. Persentase Peserta Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) berbasis CAT dengan target (100%)
- 7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL dengan target (100%)
- 8. Persentase (%) Sosialisasi Layanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat dengan target (100%)
- 9. Persentase (%) Bimbingan Tekhnis SRC/ LRC dengan target (100%)
- 10. Persentase (%) Maritim Nelayan Program MOTS-IKRAN dengan target (100%)
- 11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) dengan target (100%)
- 12. Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2024 (IKPA) dengan target (90)
- 13.Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) tahun 2024 dengan target (100)

Syukur alhamdulillah, di tahun 2024 semua target Indikator Perjanjian Kinerja (PK) di atas dapat tercapai bahkan lebih besar dari target yang ditentukan. Berikut tabel hasil pelaksanaan PK TA 2024 berdasarkan realisasi kegiatan.

Tabel 5. Hasil Pelaksanaan PK 2024

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatkan Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan	1. Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/ Kota	100%	Hasil Monitoring SFR di Kab/Kota sbb: - Okupansi sesuai pita penugasan:, 38 Kab/kota (100%) - Identifikasi target: 70% - ISR yang termonitor: 50% Hasil Monitoring Frekuensi Marabahaya: (30%)	100%
	Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	2. Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100%	 a. Pemeriksaan Stasiun Radio (80%) terdiri dari : Pemeriksaan Remote Site 100%: 4677 kanal Inspeksi Open Shelter 100% : 1921 kanal Pengukuran Stasiun Radio dan Televisi Siaran Digital 100% : 235 Radio FM 61 TV Digital b. Total Pelaksanaan Kegiatan Monitoring Perangkat Telekomunikasi 20% : 8 Kegiatan 	100%
		3. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio	100%	Jumlah Penanganan Gangguan sebanyak 26 dapat tertangani terdiri dari: a. Air Nav : 8 b. Maritim :- c. R. Siaran : 4 d. Konsesi : 10 e. Seluler : 1 f. TV Siaran :- g. Siaran Satelit : 1 h. Radio Amatir : 2	100%
		4. Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan alat/ perangkat Telekomunikasi	93%	a. Hasil Penertiban Spektrum Frekuensi Radio (100%) Jumlah pengguna illegal menjadi off air 100%: 50 pengguna b. Penertiban Perangkat 100%: 30 Perangkat	100%
		perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ ukur di UPT	95%	Jumlah hari perangkat siap operasional dibanding jumlah hari dalam 1 bulan (100%) Jenis-jenis perangkat sbb: a. Spektrum Analyzer b. Portable Mon -DF (DDF007 & PR200) c. Potable Receiver d. Kendaraan Unit Monitoring termasuk Sistem Kelistrikan e. Antena dan Kelengkapan Perangkat SMFR f. Penangkal Petir, GPS, Tracker, Genset, UPS, Battery, Router, CCTV. Personal Computer (PC), g. Laptob, Telescopic Mast, Tower/Poolmast, Antivirus, AC (pelaporan melalui: www.smsn.postel.go.id)	100%
		6. Peserta Ujian Negara (UNAR) CAT	100%	Pelaksanan UNAR berbasis CAT terlaksana sebanyak 13 kegiatan baik UNAR Reguler maupun Non Reguler dengan capaian 538/420 orang = (128,09%) Pelaksanaan sbb : a. CAT Reguler di Surabaya : 1.CAT Reguler ke-1 Tanggal 29 April 2024 : 4 peserta 2. CAT Reguler ke 2 Tanggal 20 Mei 2024: 43 peserta 3. CAT ke 3 Tanggal 29 Juli 2024: 46 peserta 4. CAT ke 4 Tanggal 2 September 2024: 3 peserta 5. CAT ke 5 tanggal 18 November 2024: 22 peserta b. CAT Non Reguler sbb: 1.CAT non regular ke 1 Tgl. 17 Februari di Madiun 62 peserta 2.CAT non regular ke 2 Tanggal 28 April 2024 di Banyuwangi 36 peserta 3. CAT non regular ke 3	SECRETARIAN PROPERTY.
				Tanggal 19 Mei 2024 di Tulungagung : 71 peserta 4. CAT non regular ke 4 Tanggal 23 Juni 2024 di Bangkalan 22 peserta	

NO	KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
				 5. CAT non reguler ke 5 Tanggal 4 Agustus 2024 di Tuban 46 peserta 6. CAT non regular ke 6 Tanggal 15 September 2024 di Malang 59 peserta 7. CAT non Reguler ke 7 Tanggal 29 September 2024 di Mojokerto: 47 peserta 8. CAT non regular ke 8: Tanggal 13 Oktober 2024 di Malang: 77 peserta 	
		7. Persentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL	100%	 a. Jumlah penanganan piutang yang dihubungi dari piutang di UPT tahun 2024 (100%) b. Jumlah koordinasi pelimpahan KPKNL dari target koordinasi pelimpahan KPKNL di UPT tahun 2024 (4 laporan) a. P. Piutang : 100% b. P. KPKNL : 100% = 100% + 100% : 2 = 100% 	100%
		8. Persentase (%) Sosialisasi Layanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat	100%	 a. Jumlah peserta sosialisasi layanan masyarakat 2 kali kegiatan di Jawa Timur yaitu di aPasuran dan Madiun jumlah peserta 205 peserta (100%) dari wilayah layanan. b. Survey Kepuasan Masyarakt 30 orang dari seluruh layanan (100%) - Hasil IKM: 3,66 - Hasil IIPP: 3.66 - Total Capaian: 100% +100%/2 = 100% 	100%
		9. Persentase (%) Bimbingan Tekhnis SRC/ LRC	100%	 a. Kegiatan Bimtek SRC/LRC ke-1: dilaksanakan tanggal 5 Maret 2024 di PPP Pondok Dadap Malang Jumlah peserta: 71/77 x 100% = 92.20% b. Kegiatan Bimtek SRC/LRC ke-2: dilaksanakan tanggal 22 Mei 2024 di PPP. Tampera Pacitan jumlah peserta: 50/77 x 100%,= 42.16% (1 Laporan per semester) Jumlah peserta Bimtek dari Target peserta bimtek SRC/ LRC tahun 2024: 121/77 x 100%= (157.14%) 	157%
		10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan Program MOTS- IKRAN	100%	Jumlah ISR maritim - IKRAN dari target ISR maritim - IKRAN tahun 2024 = 170/50 x 100% = (340%) (49 ISR MOTS & 121 IKRAN) (4 Laporan per triwulan)	340%
		11. Persentase (%) Verifikasi Data koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site)	100%	a. Jumlah Kab/ kota terverifikasi dari target Kab/ kota terverifikasi (100%) Kegiatan Jumlah Kab/ kota terverifikasi: 1. Banyuwangi : 1092/1092 (100%) 2. Sidoarjo : 2400/2400 (100%) 3. Jember : 1529/1529 (100%) 4. Tuban : 1080/1080 (100%) 5. Gresik : 1474/1474 (100%) 6. Pasuruan : 1073/1073 (100%) 7. Malang : 2108/2108 (100%) 8. Surabaya : 3906/3906 (100%) b. Jumlah ISR terverifikasi : 14.662	100%
2	Meningkatnya kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien	 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen	90	Nilai Kinerja Perencanaan : 44.95 % Nilai Kinerja Pelaksanaan : 48.07 % TOTAL = 93.02%	93.02
		2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024	100	1.Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2024 (100%)	100

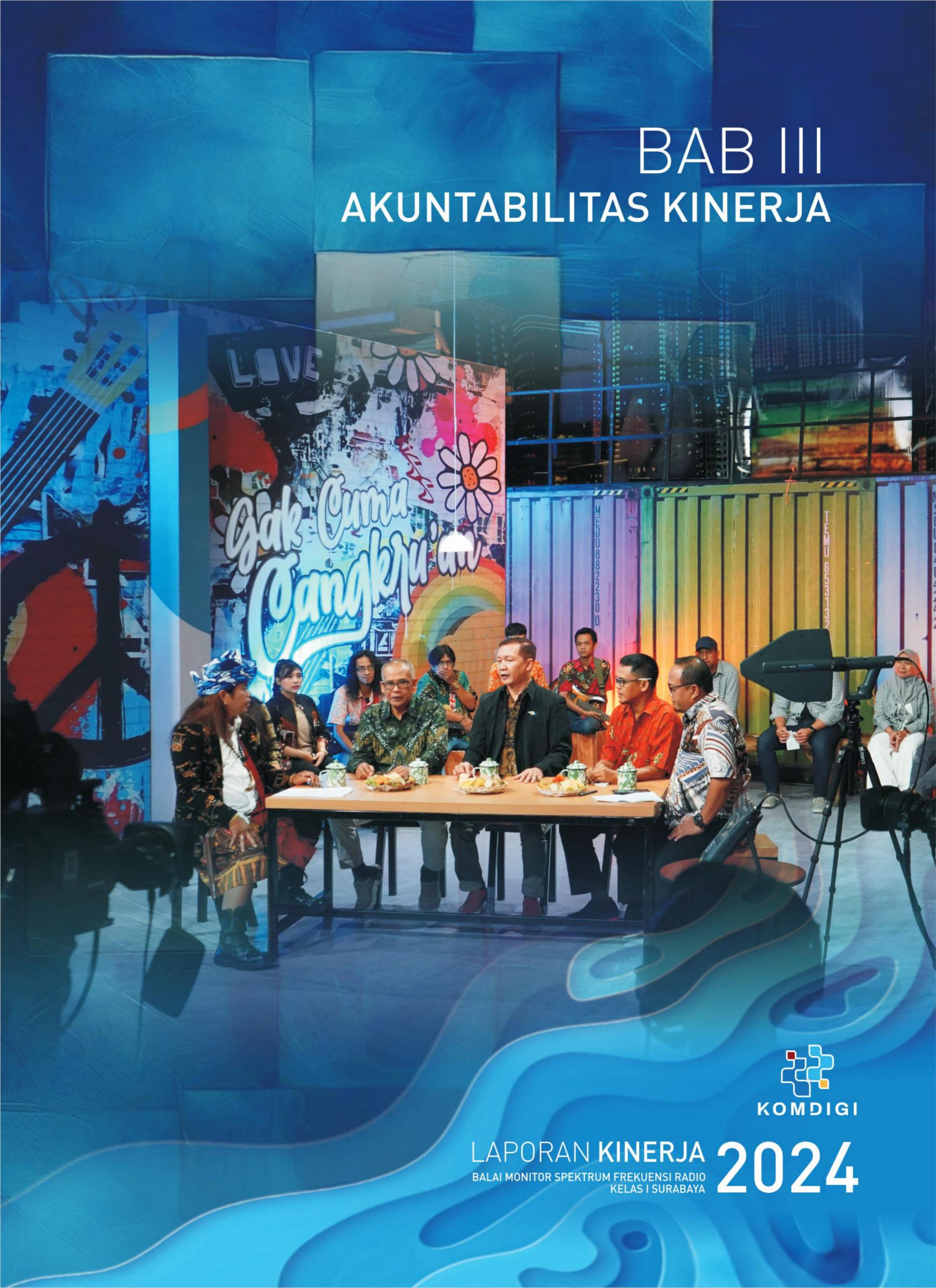
Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan kontrak kerja yang telah di sepakati oleh Dirjen Sumber Daya Perangkat Pos dan Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dengan target kinerja yang harus dicapai diantaranya meliputi kegiatan tugas pokok dan fungsi (TUSI) dan Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien.

Untuk mencapai target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 tentunya perlu adanya komitmen dan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan maupun anggaran sesuai dengan *timeline* yang telah di tentukan begitu juga dengan anggaran yang telah tertuang pada DIPA Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya Tahun 2024.

Target Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya Tahun 2024 dapat tercapai, bahkan ada beberapa target kinerja yang dapat melebihi dari (100%) yaitu pelaksanaan Ujian Amatir Radio (UNAR) sebanyak 538 orang dari target sebanyak 420 peserta capaian (128.09%). Sedangkan bimtek SRC/ LRC sebanyak 121 peserta dari target 77 orang (17.14%) dan jumlah ISR MaritimIKRAN sebanyak 170 orang dari target 50 orang (340%) yang terdiri dari 49 ISR MOTS dan 121 IKRAN.

Antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan ujian Amatir Radio (UNAR) tersebut terbukti terlihat dari jumlah peserta yang selalu bertambah, ini merupakan bentuk kesadaran masyarakat yang harus di fasilitasi guna meningkatkan kecakapan dalam berkomunikasi agar dapat menggunakan frekuensi radio secara legal sesuai peruntukannya yang pada akhirnya dapat meminimalisir adanya pelanggaran terhadap pengunaan frekuensi radio sesuai undang-undang yang berlaku. Begitu juga dengan ISR maritim pada tahun 2024 mencapai 170 ISR sedangkan target hanya 50 ISR (340%). Hal ini merupakan keberhasilan adanya kegiatan Sosialisasi Maritim On The Spot (MOTS) yang di laksanakan secara rutin di Pelabuhan perikanan dan mengundang para nelayan dengan memberikan bimtek juga pemahaman tata cara penggunaan spektrum frekuensi radio secara baik dan benar dengan perangkat komunikasi yang sesuai dan bersertifikat agar tidak menimbulkan pelanggaran dan gangguan sesuai peraturan yang berlaku pada akhirnya dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).





BABIII

AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran 1:

Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi

Dalam rangka meningkatkan layanan monitoring, pengukuran, inspeksi, penertiban serta pelayanan spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi telah dicapai kinerja sasaran sebagai berikut:

- 1. Persentase Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota sebesar 100%
- 2. Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi) sebesar 100%
- 3. Persentase Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio sebesar 100%
- Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi sebesar 100%
- 5. Persentase Berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur di UPT sebesar 100%
- 6. Persentase Peserta Ujian UNAR CAT sebesar 100%
- 7. Persentase Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL sebesar 100%
- 8. Persentase Sosialisasi Layanan Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 100%
- 9. Persentase Bimbingan Teknis SRC/LRC sebesar 100%
- 10.Persentase ISR Maritim Nelayan sebesar 100%
- 11.Persentase Verifikasi Data Koordinasi Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) Program MOTS-IKRAN

11 Indikator Kinerja diatas pencapaiannya di Tahun 2024 akan dijelaskan secara rinci pada penjelasan di bab ini.

IK.1.1.Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota sebesar 100%

a. Latar Belakang, Maksud, Tujuan Berdasarkan Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2021, penggunaan spektrum frekuensi radio di Indonesia, baik oleh individu, badan hukum, maupun instansi pemerintah, harus mendapatkan izin untuk memastikan penggunaan yang tertib. Karena spektrum frekuensi merupakan sumber daya alam yang terbatas dan strategis, pemanfaatannya harus dilakukan secara optimal dan dikelola dengan

perencanaan yang efektif dan efisien. Untuk itu, pengawasan terhadap penggunaan frekuensi radio sangat diperlukan guna menjaga keteraturan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya ini.

Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya memiliki peran penting dalam melakukan observasi dan monitoring terhadap penggunaan spektrum frekuensi di wilayah Jawa Timur. Sesuai dengan Peraturan Dirjen DJID Nomor 6 Tahun 2020, data yang diperoleh melalui pengamatan pendudukan frekuensi sangat penting untuk pembuatan peta pemanfaatan spektrum frekuensi radio. Dengan memantau penggunaan kanal frekuensi, baik yang digunakan maupun tidak, data tersebut dapat diolah untuk mendapatkan informasi terkait pendudukan spektrum per kanal atau pita frekuensi, yang kemudian dapat disajikan dalam bentuk grafik atau visualisasi lainnya yang sesuai dengan keperluan.

b. Sasaran Kegiatan

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pengendalian DJID Nomor: 1083/DJDJID.4/PR.04.01/01/2024 tentang Penugasan terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian DJID Tahun 2024, ditetapkan target monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio dengan sasaran sebagai berikut:

- Melaksanakan monitoring 15 pita frekuensi menggunakan Stasiun Tetap/Transportable dan/atau Stasiun Jinjing/Bergerak di Kab/Kota dalam wilayah kerja Balmon Kelas I Surabaya.
- Memonitor target frekuensi berdasarkan ISR termonitor
- 3. Mengidentifikasi penggunaan spektrum frekuensi radio pada seluruh band pita frekuensi berdasarkan status perizinannya dan kesesuaian peruntukannya(36) | LAKIN TAHUN 2024 BALAI MONITOR SFR KELAS I SURABAYA serta menemukenali pengguna frekuensi radio yang belum teridentifikasi yang berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi radio.
- 4. Memonitor dan mengidentifikasi 5 pita frekuensi marabahaya menggunakan Stasiun Tetap/Transportable pada setiap hari kerja.
- Memberikan perlindungan kepada pengguna frekuensi radio yang telah mendapatkan izin dari gangguan yang merugikan dan mengganggu keselamatan hidup orang banyak (dalam hal ini pada frekuensi penerbangan).
- 6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian

penggunaan spektrum frekuensi radio di Wilayah Kerja Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya.

c. Capaian Target

Dalam rangka terwujudnya pemenuhan target perjanjian kinerja yang berisikan monitoring penggunaan frekuensi radio di Kabupaten atau Kota di Wilayah kerja Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya di lakukan dengan menggunakan Stasiun Tetap/Transportable dan/atau Stasiun Jinjing/Bergerak.

Tabel 6. Sararan, Indikator, Target dan Realisasi Monitoring Penggunaan SFR di Kab/Kota

	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		2020		2021	2	022	20	23	20	024
NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	Target	Realisasi								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio di Kab/Kota	50%	73.68%	80%	86,48%	80%	100%	100%	100%	100%	100%

Target Perjanjian Kinerja pada tahun 2023 dan 2024 sebesar 100%, berbeda dengan tahun 2021 dan 2022 sebesar 80% dan pada tahun 2020 yang hanya mempunyai target Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio sebesar 50% dikarenakan masa pandemi.

Perhitungan Perjanjian Kinerja [PK] tahun 2024 Monitoring Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio terdiri dari satu kesatuan:



Dengan komponen yang harus terpenuhi:

- 4. Monitoring Pita Frekuensi Radio di Kabupaten/Kota
 - 100 % Kab/Kota Termonitor
 - 70%Teridentifikasi frekuensi yang termonitor
 - 50% Target ISR termonitor (Target dari Direktorat Pengendalian)
- 5. Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya
 - 5 (lima) pita frekuensi marabahaya termonitor dan teridentifikasi
 - 60% dari total hari kerja setiap SMFR Tetap/Transportable melakukan monitoring
- 6. Pelaporan dari pencapaian target diupload pada report online (ROL)
- d. Inovasi/Analisa Keberhasilan
 Pendudukan spektrum frekuensi radio pada semua
 pita penugasan sangat penting
 dalam pembangunan peta pemanfaatan spektrum
 frekuensi radio [spectrum
 mapping].



REX 4

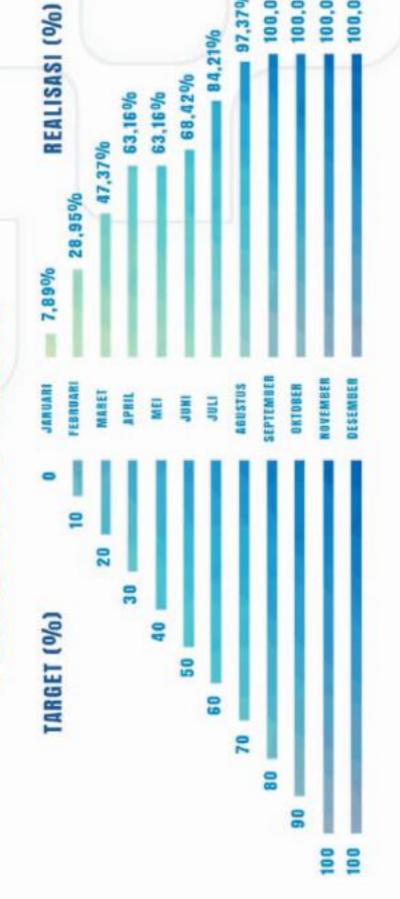
4 SP S

100% KAB/KOTA TERMON

PITA FREKUENSI RADIO AKUKAN OBSERVASI I IDENTIFIKASI AKUKAN PITA DAN DAN

70% HASIL MONITORING SFR TERIDENTIFIKASI **TERMONITOR** SE 20%

SPEKTRUM DNITORIN PENGGUN FREKUEN



38 KABUPATEN/KOTA TEROKUPANSI

FREKUE

PITA

S

UPA

PATEN

 \odot

STASIUN BERGERAK MONITORING STASIUN TETAP MONITORING

TERMONITOR

50% ISR

972 JUMLAH ISR 1925

TARGET ISR Termonitor

CAPAIAN ISR TERMONITOR 1522

60% CAPAIAN ISR TERMONITOR

CAPAIAN HASIL NONITORING SFR MONITORING :

JEMBER

GRESIK

BLITAR

BANYUWANGI

BOJONEGORO

BONDOWOSO

ERIDENTIFIKASI

4744

TUBAN MADIUN KEDIRI NGAWI TRENGGALEK SUMENEP MALANG LUMAJANG KOTA MALANG TULUNGAGUNG SITUBONDO SAMPANG PROBOLINGGO PONOROGO PASURUAN PACITAN NGANJUK MOJOKERTO LAMONGAN PASURUAN KOTA MADIUN KOTA BLITAR KOTA BATU JOMBANG SIDOARJO PAMEKASAN MAGETAN KOTA SURABAYA KOTA PROBOLINGGO KOTA MOJOKERTO KOTA KEDIRI

> TERIDENTIFIKASI 70% HASIL

3916 JUMLAH SFR TERMONITOR

5594

97,37%

TARGET SFR Teridentifikasi

CAPAIAN SFR TERIDENTIFIKASI

BANGKALAN

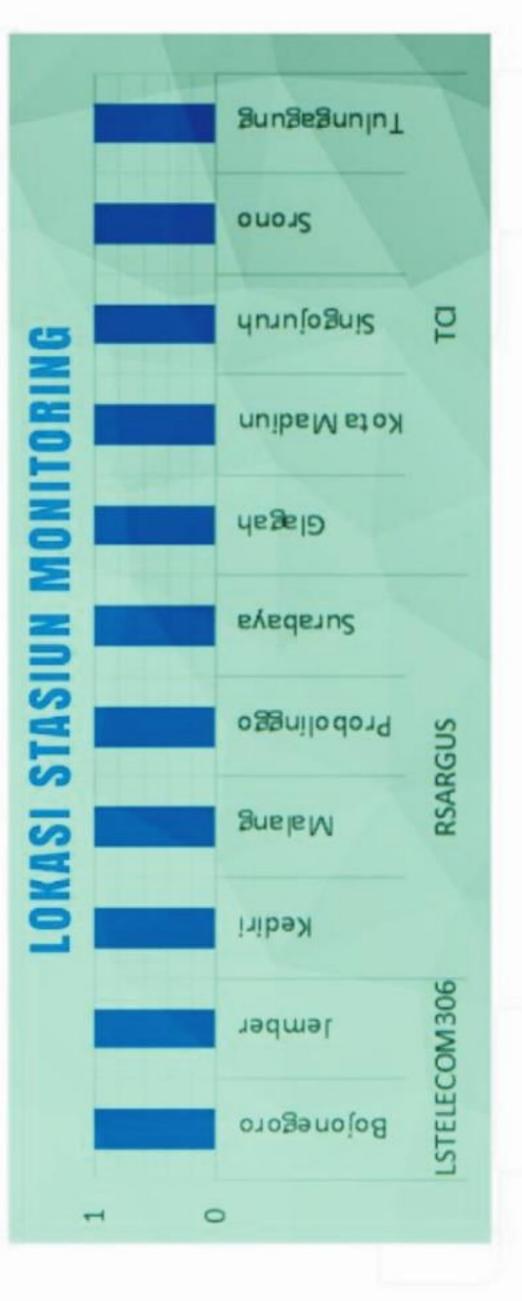
Infografis disamping menunjukkan capaian kinerja parameter teknis bagi yang tidak sesuai dengan ijin monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio yang ditetapkan. yang dilakukan Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya selama tahun 2024 dengan target 100% atau 38 Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya di tahun 2024 memfokuskan kegiatan observasi dan monitoring Kabupaten/kota terpenuhi. Tercapainya target kinerja penggunaan spektrum frekuensi radio ini pada pita frekuensi radio siaran FM dan radio bisa tercapai dengan baik didukung oleh 9 stasiun konvensional. Hal lain yang menjadi pertimbangan, tetap/transportable dan 3 stasiun jinjing/bergerak antara lain: yang ada di Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya. 1. Potensi interferensi pada pita FM Siaran yang Komponen tercapainya monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio meliputi hasil berhimpitan dengan pita penerbangan. 2. Beberapa event khusus yaitu pelaksanaan pengambilan okupansi 15 pita frekuensi di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, Capaian ISR Pemilu dan perayaan hari raya besar seperti Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru dan event Termonitor 79.06% atau sebanyak 1522 ISR termonitor dari target yang harus termonitor 50% kenegaraan World Water Forum. atau sebanyak 972 ISR, dengan jumlah ISR 3. Mengurangi potensi keseluruhan pada tahun 2024 sebesar 1925 ISR, dan kerugian negara yang terkakhir adanya klasifikasi hasil monitoring akibat adanya sebanyak 4902 penggunaan frekuensi pada tahun penyelenggar 2024 dengan klasifikasi legal, tidak sesuai ISR, Off a ilegal. Air, kadaluarsa dan belum diketahui. Frekuensifrekuensi yang termonitor tersebut pada dinas tetap, siaran, bergerak penerbangan, bergerak maritim, bergerak darat, bantuan dan marabahaya. Hasil Monitoring penyelenggara atau pengguna radio yang belum diketahui identitasnya akan dilakukan tindak lanjut. Hasil tindak lanjut yang telah dilakukan, sebagian besar pengguna yang ditemukan tidak mempunyai ijin ataupun tidak sesuai ijin sudah Off air serta menyesuaikan

LAKIN TAHUN 2024 - BALMON SFR KELAS I SURABAYA 19







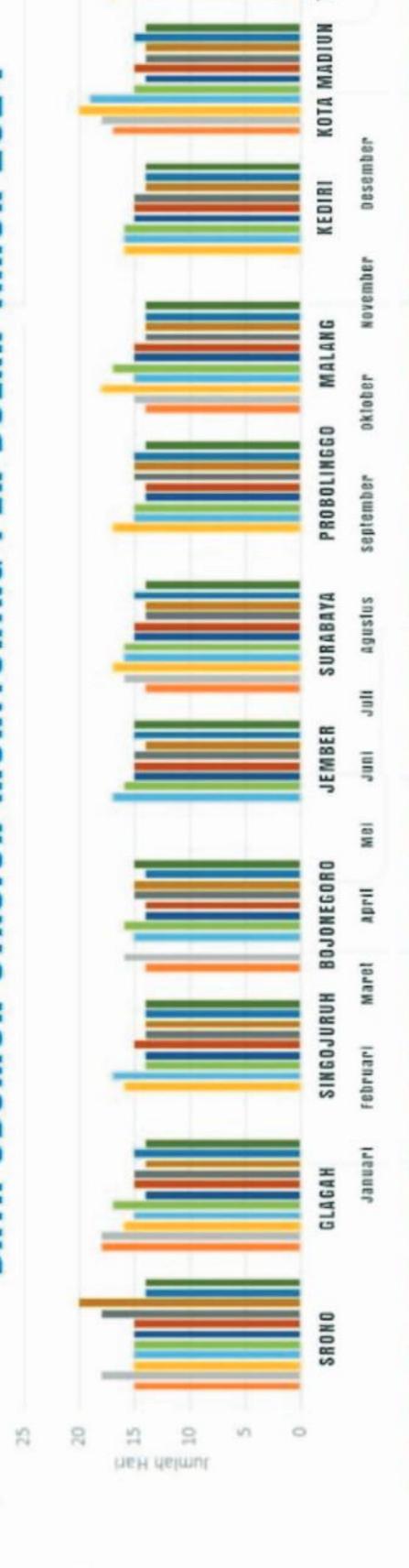


ORTABLE

TRANSP

- TETAP

PER BULAN TAHUN 2024 4 STASIUN OBSMON



* LSTELECOM306

TEKNOLOGI STASIUN MON

- RSARGUS

OBSERVA

HASIL

			Ja	Januari	Februari	iari	Maret		April		Mei	7	Juni	Juli		Agustus		September		Oktober	ž	November	De	Desember
Monitoring	Monitoring	Vendor	ops	Von Ops	ODS NO	do sdo u	Non	do sdo	Ops Non Ops Ops Non Ops Ops Non Ops Ops Non Ops Ops	s Obs	Von Ops		Non Ops	SdO non SdO	n Ops Ops	Non Ops		Non O	psops	Non Op	sd0 sc	Ops Non Ops Ops Non Ops Non Ops Non Ops	sobs	Non Ops
Srono	Transportable	TCI	0	0	15	0 18	0	15	0	15	0	15	0	15	0 15	5 0	18	0	20	0	14	0	14	0
Glagah	Transportable	TCI	0	0	18	0 18	8	16	0	15	0	17	0	14	0 15	5	15	0	14	0	15	0	14	0
Singojuruh	Transportable	TCI	0	0	0	0	0	16	0	17	0	14	0	14	0 15	5	14	0	14	0	14	0	14	0
Bojonegoro	Transportable	LSTELECOM306	0	0	14	0 16	9	0	30	13	0	16	0	14	0 14	0	15	0	15	0	14	0	15	0
Jember	Transportable	LSTELECOM306	0	0	0	21 0	31	0	30	17	0	16	0	15	0 15	5 0	15	0	14	0	15	0	15	0
Surabaya	Tetap	RSARGUS	0	0	14	0 16	9	17	0 4	16	0	16	0	15	0 15	5 0	14	0	14	0	15	0	14	0
Probolinggo	Tetap	RSARGUS	0	0	0	0	0	17	0 4	15	0	15	0	14	0 14	4	15	2	15	0	15	0	14	0
Malang	Tetap	RSARGUS	0	0	14	0 15	0	18	0	15	0	17	0	15	0 15	5 0	14	0	14	0	14	0	14	0
Kediri	Tetap	RSARGUS	0	0	0	0	0	16	0	16	0	16	0	15	0 15	5	15	0	14	0	14	0	14	0
Kota Madiun	Transportable	TCI	0	0	17	0 18	0	20	0	19	0	15	0	14	0 15	5 0	14	0	14	0	15	0	14	0
Tulungagung	Transportable	TCI	О	0	17	0 16	9	17	0 4	14	0	14	0	14	0 14	4	15	2	15	0	15	0	14	0
Cap	Capaian Obsmon 5 Pita Marabahaya	rabahaya			100%	200	100%		100%	1	100%	10	100%	100%	38	100%		100%		100%		100%		100%

JENIS STASIUN MONITORI

Pada Tahun 2024 ada penambahan target pada PK UPT yaitu Monitoring Rutin Pita Frekuensi Marabahaya, hasil capaian kinerja yang dilakukan Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya selama tahun 2024 dengan target 100%. Tercapainya target kinerja penggunaan spektrum frekuensi radio ini bisa tercapai dengan baik didukung oleh 11 stasiun tetap/transportable dengan 3 jenis merk perangkat dengan pengelolaan data yang berbeda (Rohde &

Schwarz, LS Telecom, TCI). Target yang dicapai 100 % termonitor dan teridentifikasi 5 (lima) pita frekuensi marabahaya dengan melakukan monitoring pada SMFR Tetap/*Transportable* minimal 14 hari kerja setiap bulannya (60%).

e. Tindak Lanjut/Pemanfaatan Laporan Kinerja sebelumnya yang digunakan untuk perbaikan pada grafik tersebut

Grafik 3. Capaian Penggunaan spektrum Frekuensi Radio Kurun Waktu 5 Tahun

BALMON KOMDIGI SURABAYA

CAPAIAN MONITORING PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TAHUN 2020 s.d 2024



38

2022

38

2023

38

2024

ISR TERMONITOR

TAHUN:	2020	2021	2022	2023	2024
	1230	1398	1681	1669	1522

	TERMONITOR							
TAHUN	TERMONITOR	TERIDENTIFIKASI						
2020	4088	3778						
2021	5203	4876						
2022	5051	4885						
2023	9877	10110						
2024	4740	4902						

Capaian kinerja dari target tahun ke tahun yang terpenuhi akan mempercepat pemberian data pengamatan

33

2021

28

2020

pendudukan spektrum frekuensi radio [occupancy]. Penetapan dan pencapaian target monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio pada tahun 2020 sampai dengan 2024, memberikan masukan untuk melakukan kegiatan pengambilan pendudukan spektrum frekuensi radio [occupancy] pada pita frekuensi penugasan dimulai dari Kabupaten/Kota yang belum dilakukan pada tahun sebelumnya. Hasil dari monitoring dan identifikasi tahun sebelumnya bisa menjadi data awal dan justifikasi untuk penentuan dan pembenahan hasil monitoring tahun berikutnya serta sebagai bahan kegiatan yang lain sebagai wujud tindak lanjut dan meningkatkan pengawasan sehingga tercipta tertib pengguna frekuensi radio di Wilayah Jawa Timur.



f. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2020-2024

Grafik 4. Target dan Capaian Monitoring SFR Tahun 2020 s.d 2024



Tahun 2020, target kinerja monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio ditetapkan sebesar **50**% dari jumlah kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada akhir tahun, capaian kinerja mencapai **73,68**%, yang berarti target tersebut telah terlampaui dengan kualitas **100**% terpenuhi.

Tahun 2021, target kinerja meningkat menjadi **80**% dari jumlah kabupaten/kota di Jawa Timur. Pada akhir tahun, realisasi kinerja mencapai **86,84**%, kembali melampaui target yang ditetapkan dengan kualitas **100**% terpenuhi.

Tahun 2022, Target kinerja tetap **80**%, namun capaian pada akhir tahun berhasil mencapai **100**%. Ini berarti seluruh 38 kabupaten/kota di Jawa Timur telah dilakukan monitoring penggunaan spektrum frekuensi radio.

Tahun 2023, target kinerja ditetapkan sebesar **100**%, dan diproyeksikan capaian tersebut akan tercapai sepenuhnya pada akhir tahun 2023.

Tahun 2024, sama seperti tahun sebelumnya target kinerja kembali ditetapkan sebesar **100**% dan capaian pada akhir tahun juga mencapai **100**%. Memastikan monitoring spektrum frekuensi radio telah dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

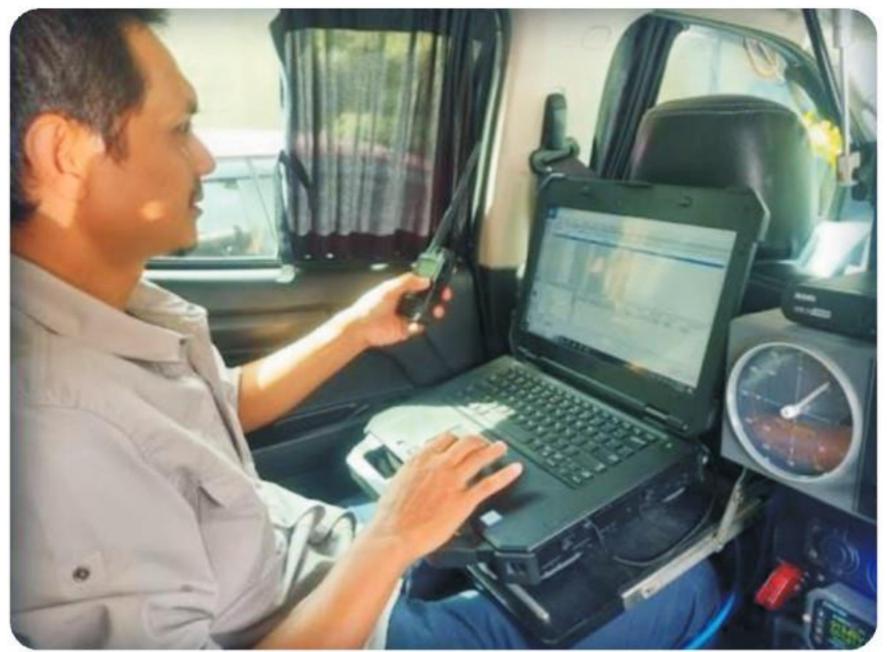
g. Efisiensi

Sampai dengan akhir tahun 2024 telah dicapai realisasi capaian kinerja sebesar 100% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 100% Kabupaten/Kota yang termonitor penggunaan spektrum frekuensi radio dengan total 38 dari 38 Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur. Pemenuhan target kinerja pengambilan pendudukan spektrum frekuensi radio [occupancy] dan komponen didalamnya yang selalu meningkat dari tahun ke tahun terbantu oleh adanya 4 (empat) stasiun tetap (slave) di Surabaya, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Probolinggo dengan 2 (dua) transportable di Jember dan Bojonegoro serta 3 (tiga) TCI di Banyuwangi (Singojuruh, Srono dan Glagah), Tulungagung dan Madiun. Dengan demikian untuk pengambilan pendudukan spektrum frekuensi radio sesuai dengan pita penugasan tinggal 29 (dua puluh sembilan) Kabupaten/Kota dari 38 (tiga puluh delapan) Kabupaten/Kota yang harus didatangi. Sehingga kegiatan diluar pemenuhan target kinerja yang bersifat mendadak dan tidak terencana baik dari permintaan internal Kementerian Kominfo khususnya DJID dan dari pihak eksternal bisa terlaksana.

h. Data Dukung/dokumentasi

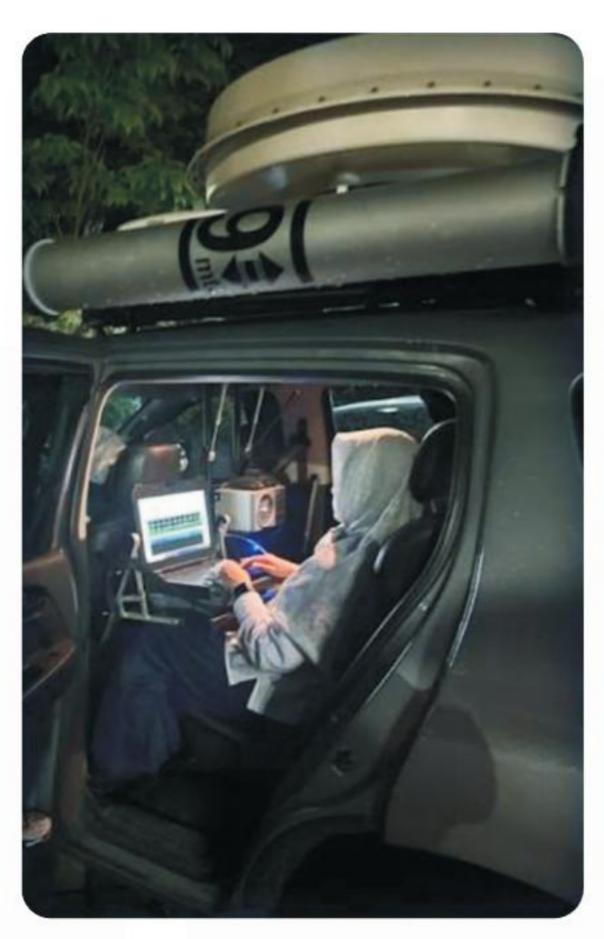
Gambar 6. Kegiatan Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2024

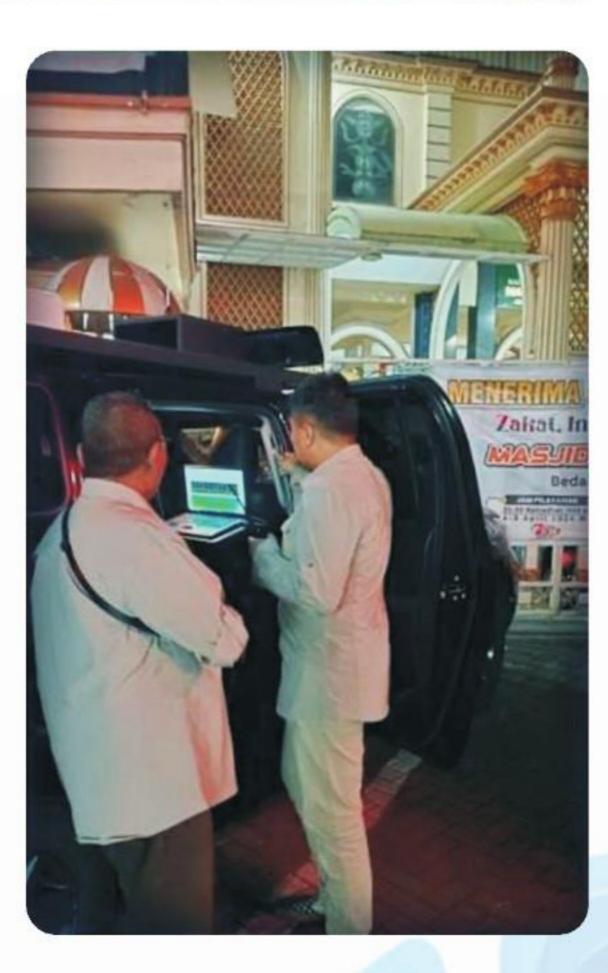












IK.1.2 Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

a. Latar Belakang, Maksud, Tujuan
Dalam rangka pengawasan penggunaan spektrum
frekuensi radio serta memastikan kepatuhan
pengguna terhadap ketentuan yang berlaku, Balai
Monitor SFR Kelas I Surabaya melaksanakan
kegiatan pemeriksaan stasiun radio di wilayah Jawa
Timur. Tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja
untuk Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan
Stasiun Radio dengan target sebesar 100%, yang
terdiri dari 2 komponen yaitu pemeriksaan stasiun
radio dan monitoring alat atau perangkat
telekomunikasi. Pemeriksaan stasiun radio terdiri
dari pemeriksaan stasiun radio microwave link dan
pengukuran stasiun siaran.

Pemeriksaan stasiun radio *microwave link* dilaksanakan untuk memastikan bahwa penggunaan frekuensi radio dan atau lokasi stasiun radio sesuai dengan izin yang telah ditetapkan. Pengukuran stasiun siaran dilaksanakan untuk mengetahui kesesuaian data teknis pemancar dengan Izin Stasiun Radio yang ditetapkan dan memastikan parameter teknis yang digunakan sesuai dengan ketentuan teknis. Monitoring alat/perangkat telekomunikasi dilaksanakan untuk memastikan alat atau perangkat telekomunikasi yang digunakan atau diperdagangkan telah memenuhi persyaratan teknis yang berlaku dan memiliki sertifikat SDPPI.

b. Sasaran Kegiatan

Mengacu Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian SDPPI Tahun 2024, ditetapkan target pemeriksaan stasiun radio sebagai berikut:

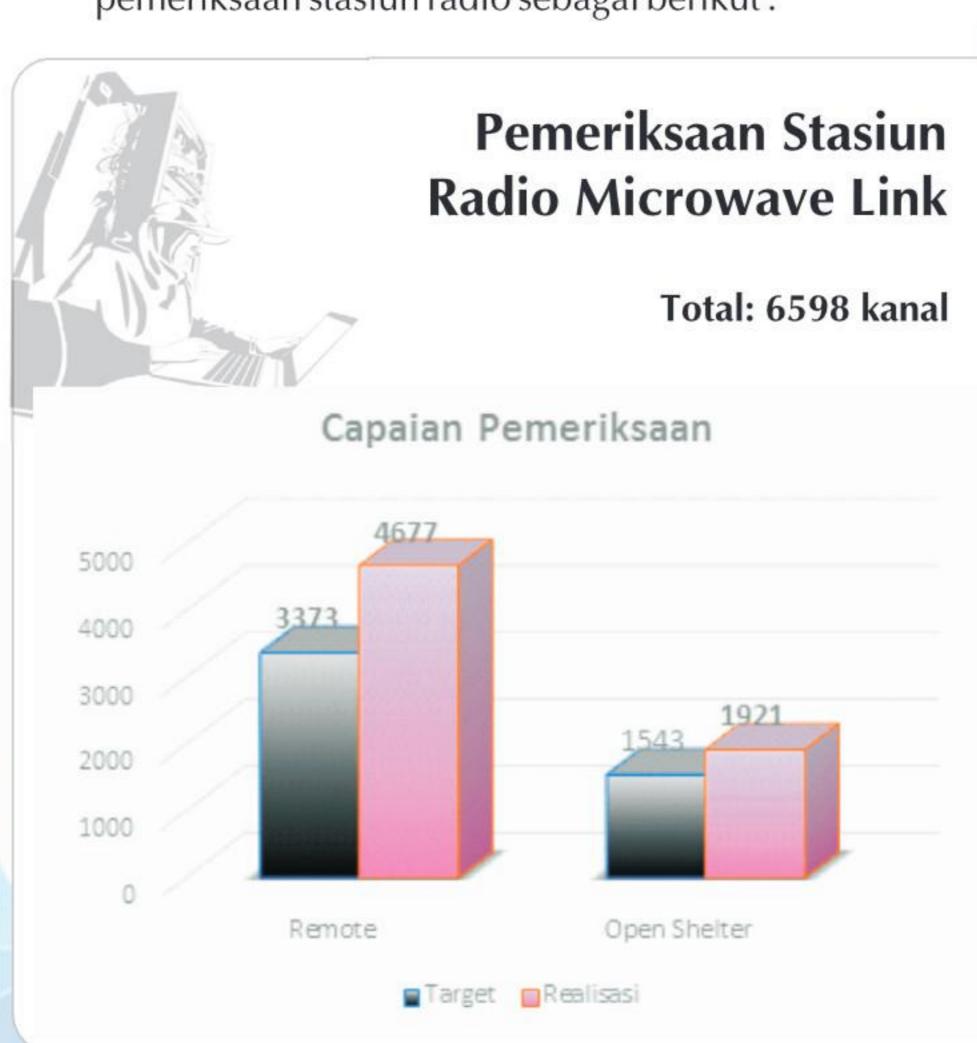
- 1. Target pemeriksaan stasiun radio microwave link
 - Data target pemeriksaan remote site dan open shelter berdasarkan data target pada aplikasi APSTARD
 - Untuk UPT dengan jumlah ISR Microwave Link < 2500 ISR wajib melakukan remote site ke semua ISR yang telah ditentukan
- 2. Target pengukuran stasiun siaran terdiri dari:
 - Seluruh stasiun siaran Televisi Digital Terestrial
 - UPT dengan jumlah ISR siaran Radio FM > 200 ISR dapat melakukan pengukuran parameter teknis sekurang - kurangnya 200 ISR Radio FM
- 3. Target monitoring alat/perangkat telekomunikasi
 - Jumlah kegiatan Monitoring APT 8 kali pelaksanaan dalam 1 tahun
 - Perangkat prioritas yang dimonitor dalam setiap kegiatan minimum 3 jenis

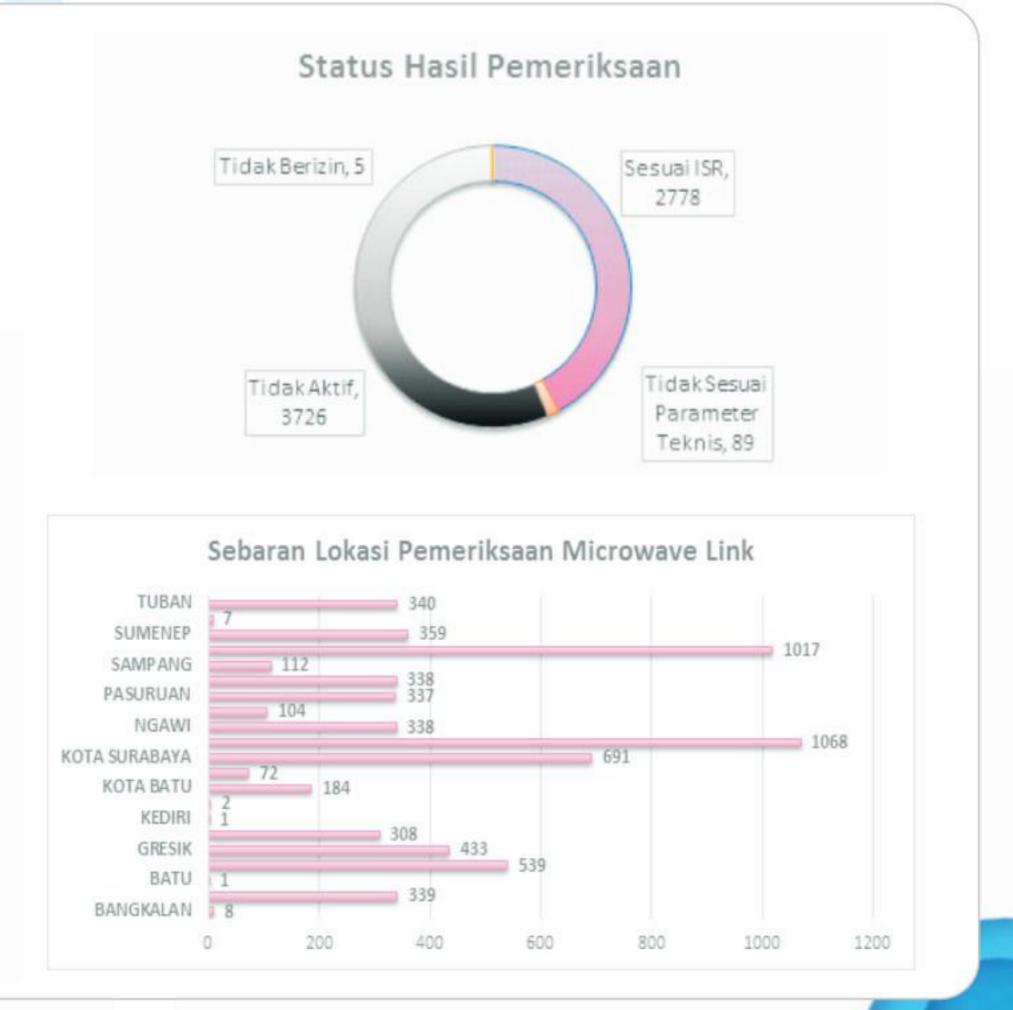
c. Capaian Target

1. Pemeriksaan Stasiun Radio Microwave Link

Tahun 2024 persentase capaian pemeriksaan stasiun radio *microwave link* dengan metode *remote site* dan *open shelter* sebesar 100%. Jumlah kanal yang diperiksa sebanyak 6598 kanal, melebihi dari jumlah target yang ditetapkan sebanyak 4916 kanal. Selain pemeriksaan stasiun radio microwave link, dilakukan pemeriksaan stasiun radio pada service lain yaitu radio trunking, radio konvensional dan maritim.

Tabel 7. Hasil Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)

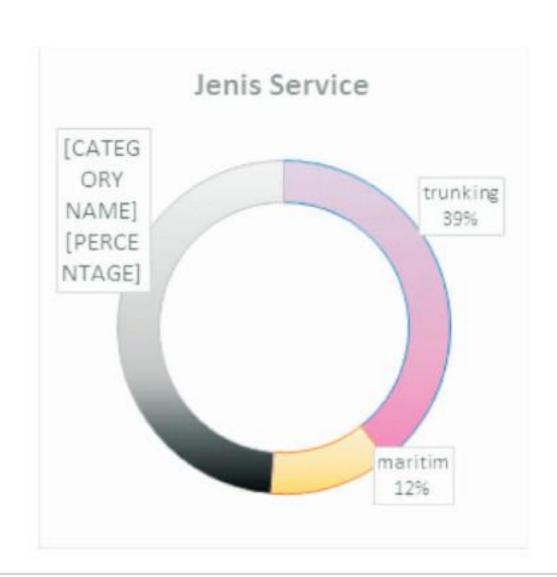


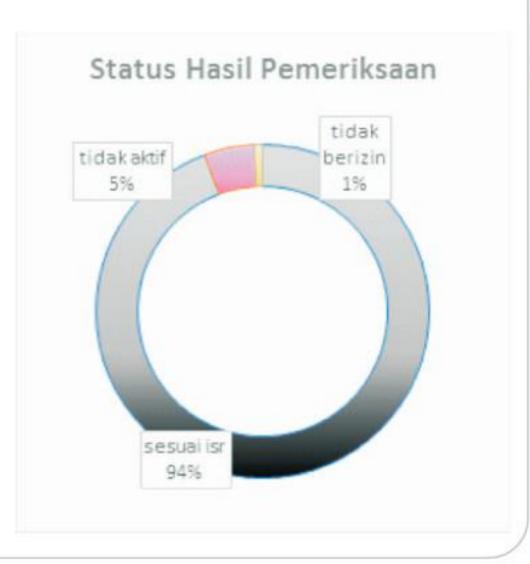


Pemeriksaan Stasiun Radio Non Seluler dan Non FM

Total: 355 Data; 33 Perusahaan







2. Pengukuran Stasiun Siaran

Tahun 2024 Balmon Surabaya melaksanakan pengukuran parameter teknis dan karakteristik stasiun siaran Radio FM di 38 Kab/Kota Jawa Timur, jumlah Radio FM yang terukur sebanyak 235 stasiun radio dari 276 ISR siaran Radio FM di Jawa Timur. Hasil pengukuran parameter teknis 82 stasiun radio sesuai, 102 stasiun radio tidak sesuai, dan 51 stasiun radio tidak aktif.

Tabel 8. Persentase Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2020-2021

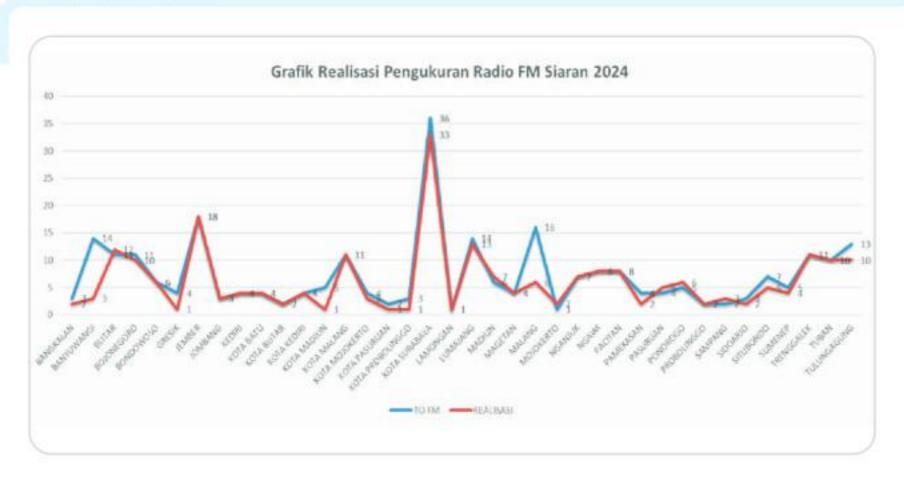
Indikator Kinerja Sasaran	20	020	2021			
Program	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
Jumlah data ISR valid hasil inspeksi	85%	86,06%	90%	95,69%		

Tabel 9. Persentase Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio Periode 2022-2024

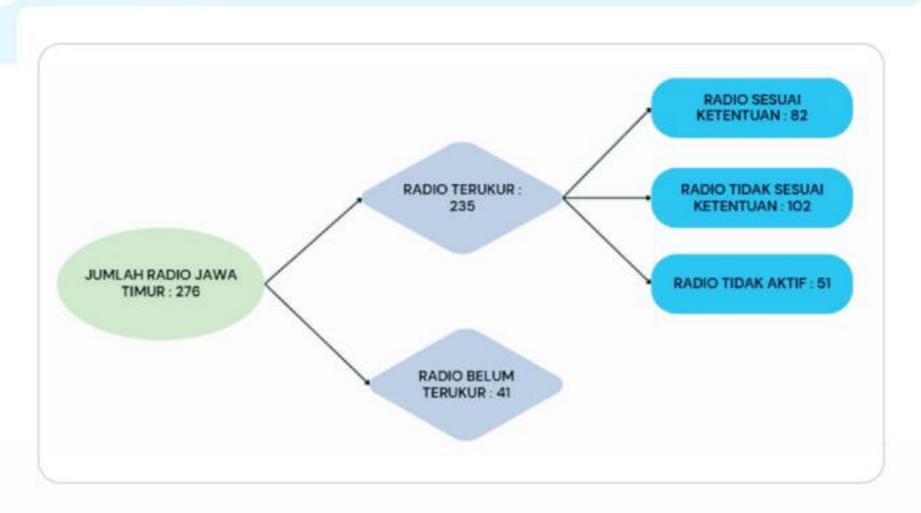
Cacaran Dragram	Indikator Kinerja	20	2022)23	2024		
Sasaran Program	Sasaran Program	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio (Inspeksi)	100% [8.234 kanal]	100% [10.897 kanal]	100% [6.988 kanal]	100% [7.064 kanal]	100% [4916 kanal]	100% [6598 kanal]	

Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya juga melaksanakan pengukuran parameter teknis dan karakteristik stasiun siaran TV Digital sebanyak 62 stasiun radio di 10 wilayah layanan Jawa Timur, sesuai dengan jumlah ISR siaran TV Digital di wilayah Jawa Timur. Hasil pengukuran parameter teknis 61 stasiun siaran sesuai ketentuan teknis dan 1 stasiun siaran dalam kondisi Off Air.

Grafik 5. Jumlah Stasiun Siaran Radio FM Terukur Tahun 2024



Gambar 7. Hasil Pengukuran Stasiun Siaran Radio FM Tahun 2024



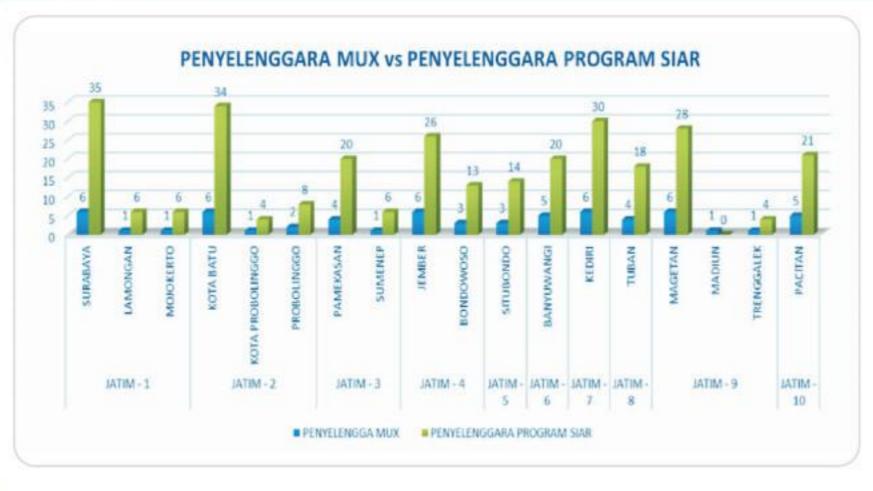
Grafik 6. Hasil Pengukuran Stasiun Siaran TV Digital Tahun 2024



Gambar 8. Kepatuhan Hasil Pengukuran Partek TV Digital Tahun 2024



Grafik 7. Jumlah Penyelenggara Mux dan Penyelenggara Program Siar



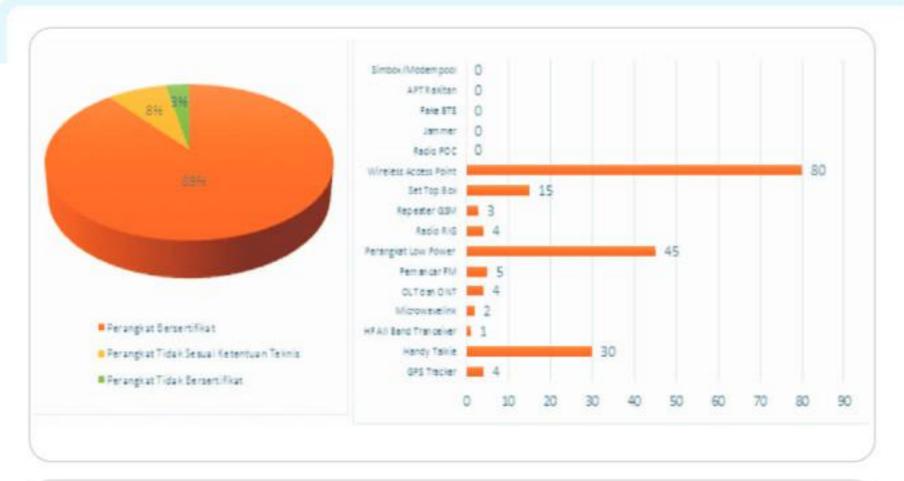
Tabel 10. Persentase Capaian Pengukuran Stasiun Siaran Tahun 2020 - 2024

Sasaran	Indikator	2	020	2021		2022		2023		2024	
Program	Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi								
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan	Pengukuran Stasiun Suaran (Pengukuran parameter teknis dan karakteristik TV Analog / TV Digital)	30%	55.85%	50%	58.94%	40%	100%	100%	100%	100%	100%
Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	(Pengukuran Pengukuran parameter teknis dan karakteristik Radio FM)							50%	86%	100%	100%

3. Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi

Tahun 2024 Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya melaksanakan monitoring alat atau perangkat telekomunikasi sebanyak 11 kali kegiatan, dengan melakukan pemeriksaan minimal 3 jenis perangkat dalam setiap kegiatan. Diperoleh capaian realisasi monitoring alat/perangkat telekomunikasi tahun 2024 sebesar 100%. Hasil monitoring alat/perangkat telekomunikasi di 11 Kab/Kota Jawa Timur sebanyak 193 perangkat, yang terdiri dari 172 perangkat bersertifikat, 15 perangkat tidak sesuai ketentuan teknis, dan 6 perangkat tidak bersertifikat.

Grafik 8. Hasil Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi Tahun 2024





Tabel 11. Persentase Capaian Monitoring APT Tahun 2020 - 2024

Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2020		2021		2022		2023		2024	
Program	Program	Target	Realisasi								
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio (Monitoring alat/perangkat telekomunikasi)	100% 1 keg	100% 2 keg	100% 3 keg	100% 3 keg	100% 4 keg	100% 4 keg	100% 7 keg	100% 8 keg	100% 8 keg	100% 11 keg

Dari persentase capaian pemeriksaan stasiun radio dan monitoring perangkat yang masingmasing sebesar 100%, maka diperoleh realisasi capaian Indikator Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio tahun 2024 sebesar 100%.

- d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian
 Keberhasilan capaian target pemeriksaan stasiun
 radio didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut
 :
 - Kemampuan dan kompetensi SDM yang terlibat, memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, serta memahami standar dan regulasi yang berlaku.
 - Kolaborasi yang baik dengan pihak terkait sehingga pelaksanaan kegiatan pemeriksaan stasiun radio dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
 - Sarana prasarana kegiatan yang memadai serta dukungan teknologi juga memberikan kontribusi dalam mencapai target pemeriksaan stasiun radio.

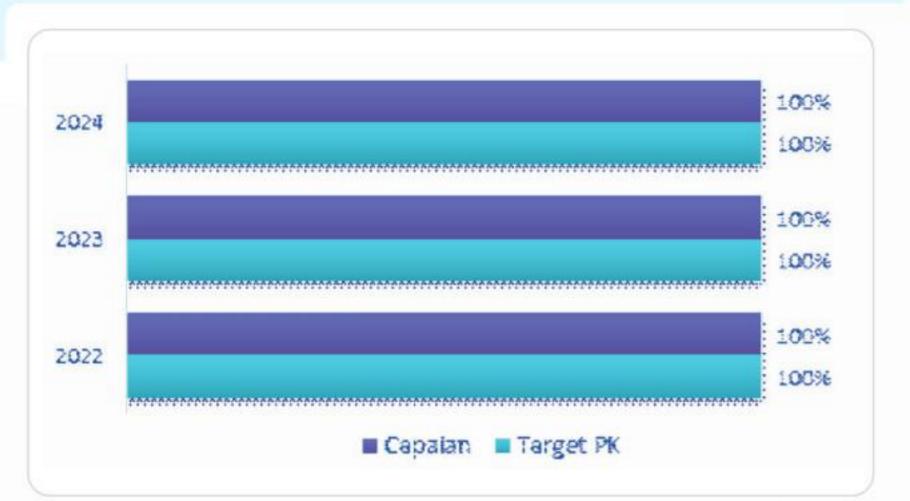
- Kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran stasiun siaran yang dilaksanakan sesuai ketentuan teknis dan Standar Operasional Prosedur.
- Kepatuhan pengguna terhadap regulasi dan ketentuan yang berlaku, menjadi keberhasilan dalam mencapai target pemeriksaan stasiun radio.
- e. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan
 - 1. Hasil pelaksanaan kegiatan sebelumnya menjadi pedoman pengawasan dan pengendalian dalam mencapai target pemeriksaan stasiun radio.
 - Melakukan evaluasi hasil kegiatan pemeriksaan stasiun radio sebelumnya dan mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk dilakukan perbaikan.
- f. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2020-2024)
 Penetapan Perjanjian Kinerja untuk Indikator
 Kinerja Persentase (%) Pemeriksaan Stasiun Radio
 oleh Ditjen SDPPI dimulai sejak tahun 2022,
 dengan perhitungan capaian persentase
 pemeriksaan stasiun radio dirumuskan:

% Capaian = 80% Pemeriksaan Stasiun Radio + 20% Monitoring Perangkat

Tabel 12. Target dan Realisasi Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2022 – 2024

Cacaran Drogram	Indikator Vinaria	2022		2023		2024	
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase Pemeriksaan Stasiun Radio	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Grafik 9. Capaian Pemeriksaan Stasiun Radio Tahun 2020 - 2024



- g. Efisiensi
 - Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan pemeriksaan stasiun radio dilakukan beberapa cara sebagai berikut:
 - 1. Perencanaan yang matang meliputi penentuan sasaran, jadwal kegiatan yang teratur, dan alokasi sumber daya yang cukup.
 - 2. Pengendali Frekuensi Radio yang terlibat dalam kegiatan telah diberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala.
 - 3. Kegiatan pemeriksaan stasiun radio dan pengukuran stasiun siaran dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
 - Pemeriksaan stasiun radio microwave link menggunakan dua metode remote site dan open shelter memberikan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
 - 5. Pemanfaatan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Geografis dan aplikasi mobile dalam pengecekan khususnya terkait sertifikasi perangkat untuk meningkatkan efisiensi waktu.
- h. Data Dukung/Dokumentasi

Gambar 9. Kegiatan Inspeksi 2024





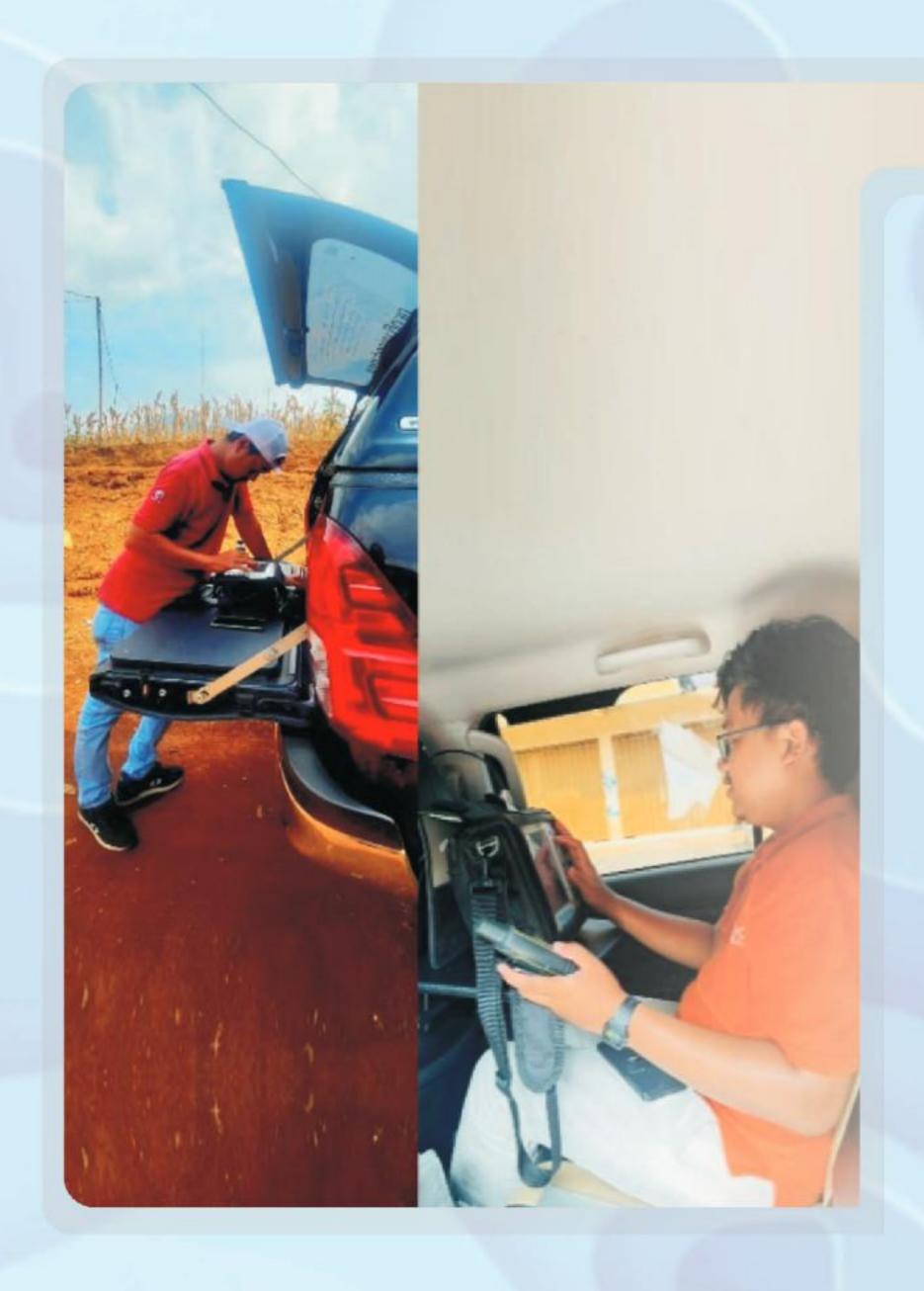




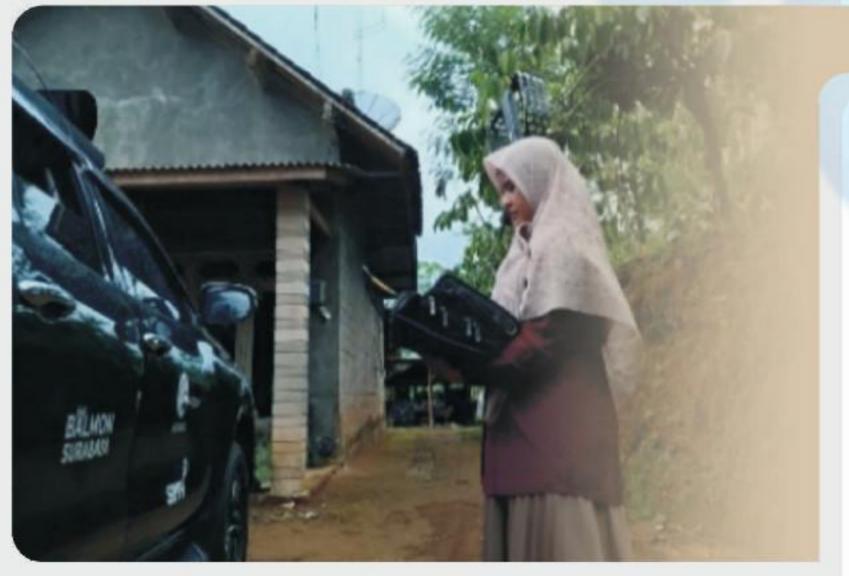
Gambar 10. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengukuran Stasiun Siaran











Gambar 11. Kegiatan Monitoring Alat/Perangkat Telekomunikasi







a. Latar Belakang, Maksud, Tujuan Layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio merupakan bagian dari layanan masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Padatnya penggunaan spektrum frekuensi radio oleh masyarakat sangat berpotensi menimbulkan gangguan frekuensi yang merugikan atau yang dikenal dengan Harmful Interference. Akibat maraknya penggunaan spektrum frekuensi oleh masyarakat tanpa dan/atau tidak sesuai dengan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimiliki, menjadi salah satu penyebab terjadinya gangguan spektrum frekuensi radio, oleh karena itu dibutuhkan adanya proses pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio yang handal agar tidak terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (Harmful interference) bagi pengguna frekuensi yang telah memiliki ISR.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melakukan proteksi atau perlindungan bagi pengguna frekuensi yang telah memiliki Izin Stasiun Radio (ISR). Proteksi atau perlindungan tersebut dilakukan melalui kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dan wajib





mendapatkan respon penanganan dalam jangka waktu 1 x 24 jam dalam hal terjadi gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (Harmful Interference). Penanganan gangguan spektrum frekuensi tersebut wajib mengutamakan penanganan pada dinas keselamatan seperti pada dinas penerbangan, dinas maritim dan dinas lainnya yang sangat berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Gangguan spektrum frekuensi radio ini perlu mendapat perhatian khusus oleh karena dalam penanganannya membutuhkan koordinasi lintas Kementerian/Lembaga.

Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen Infrastruktur Digital yang tersebar di seluruh Indonesia, perlu diketahui bahwa penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tidak terbatas pada dinas yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia, melainkan seluruh dinas atau service seperti pada dinas bergerak darat, tetap, siaran, satelit dan dinas lainnya. Pelaksanaan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio sangat bergantung pada perangkat monitoring dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam melaksanakan penyelesaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran yang ingin dicapai dari adanya kegiatan layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio antara lain mewujudkan adanya penyelesaian penanganan gangguan spektrum frekuensi radio secara efektif dan efisien sehingga dapat memberikan layanan yang prima terhadap setiap aduan gangguan yang dilaporkan oleh masyarakat.

c. Capaian Target

Capaian target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio diprioritaskan pada gangguan spektrum frekuensi radio yang berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia seperti pada dinas penerbangan dan dinas maritim, berikut merupakan capaian target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada tahun anggaran 2024:

Tabel 13. Capaian Target dan Realisasi Penanganan Gangguan 2022-2024

SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	2022		2023		TARGET	
PROGRAM	PROGRAM	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
Pengembangan infrastruktur manajemen spektrum frekuensi radio untuk peningkatan kualitas pelayanan publik	Persentase (%) penanganan gangguan spektrum yang mengganggu komunikasi terkait keselamatan.	98%	100%	99%	100%	100%	

Persentase (%) penanganan gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio pada dinas keselamatan diukur dengan membandingkan antara jumlah laporan aduan gangguan yang masuk dengan jumlah gangguan yang dapat tertangani. Dapat dilihat pada Tabel 17 diatas bahwa realisasi target capaian pada tahun anggaran 2023 telah mencapai target dengan persentase 100% dari target sebesar 99%. Di tahun anggaran 2024 target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio tetap dengan persentase sebesar 100%. Berikut merupakan gambaran capaian target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio:

A. Capaian Target Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio yang Mengganggu Komunikasi Terkait Keselamatan Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang menganggu keselamatan diprioritaskan pada dinas penerbangan dan dinas maritim.

Pertimbangan dilakukan skala prioritas di kedua dinas tersebut dikarenakan kedua dinas tersebut sangat berpotensi membahakan keselamatan jiwa manusia. Berikut merupakan data sebaran penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada dinas keselamatan yang tersebar di seluruh Indonesia:

Tabel 14. Wilayah Gangguan SFR Dinas Keselamatan

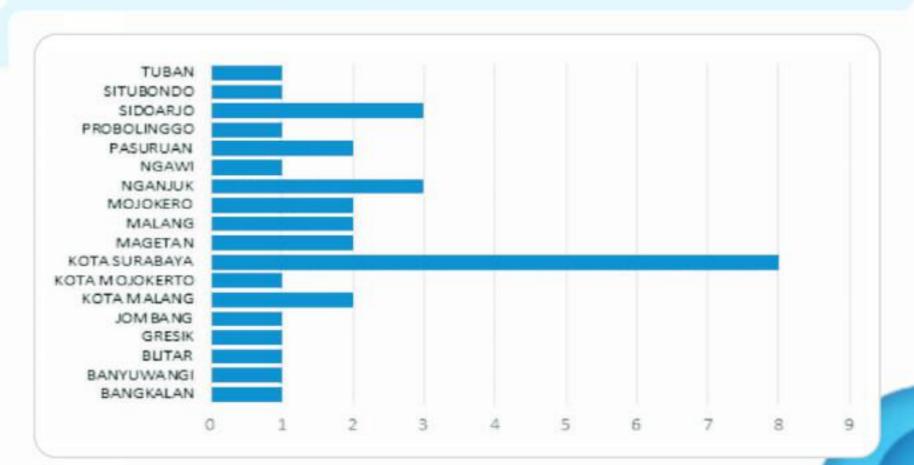
No.	Terganggu	Frekuensi	Wilayah Terganggu
1	Perum LPPNPI Cabang Suabaya	118.3 MHz	Surabaya
2	Perum LPPNPI Cabang Suabaya	120.7 MHz	Mojokerto
3	LANUD TNI AU ISWAYUDI	122.6 MHz	Madiun
4	Perum LPPNPI Cabang Surabaya	123.2 MHz	Lamongan
5	Perum LPPNPI Cabang Surabaya	123.9 MHz	Tuban
6	Perum LPPNPI Cabang Surabaya	125.1 MHz	Surabaya
7	PT. SURYA AIR KOTA MALANG	129.7 MHz	Malang

Dari Tabel diatas dapat dilihat total keseluruhan pengaduan gangguan spektrum frekuensi radio pada dinas keselamatan (penerbangan dan maritim) berjumlah 7 pengaduan. Dengan rincian dinas maritim berjumlah 0 pengaduan dan dinas penerbangan berjumlah 7 pengaduan. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya telah melaksanakan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (*Harmful Interference*) secara keseluruhan dengan hasil 100% tertangani (*Clear*).

B. Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio pada Dinas Lainnya

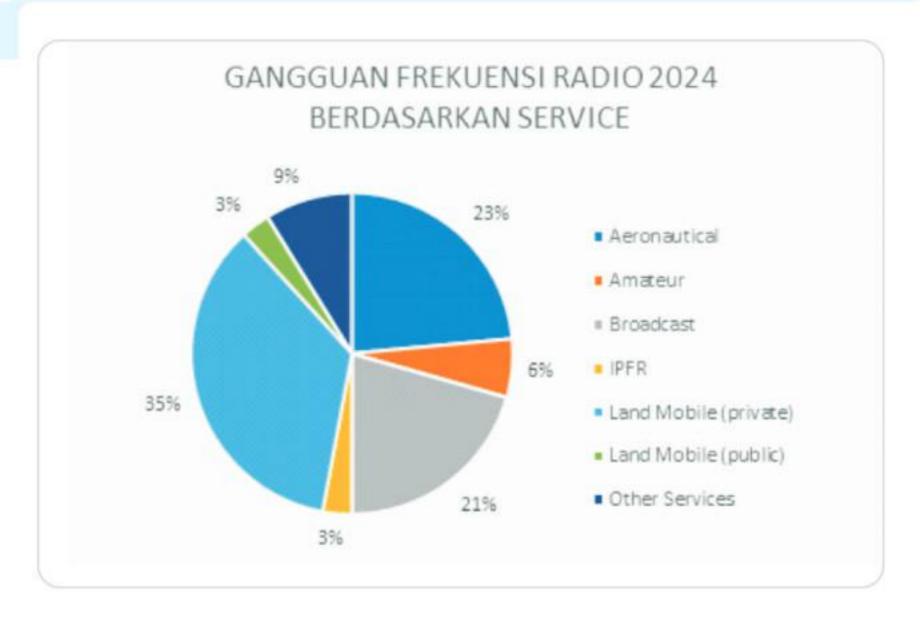
Penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada dinas lainnya sangat perlu untuk ditindaklanjuti dikarenakan pihak pengadu merupakan pihak yang telah mempunyai Izin Stasiun Radio (ISR), dengan demikian maka wajib bagi pemerintah, dalam hal ini Ditjen SDPPI memberikan proteksi terhadap gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (Harmful Interference) terhadap pemegang perizinan. Apabila dilihat berdasarkan data laporan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, umumnya berasal dari seluler, dinas bergerak darat, radio siaran, dll. Berikut merupakan gambaran wilayah gangguan spektrum frekuensi di wilayah jatim:

Grafik 10. Wilayah Gangguan SFR di Jawa Timur Tahun 2024



Berdasarkan Grafik tersebut diatas, dapat dilihat gangguan SFR berdasarkan wilayah layanan di kota Surabaya aduan gangguan yang banyak bila dibandingkan wilayah lainnya, yang pada umumnya gangguan pada frekuensi radio siaran fm yang tidak mengetahui bahwa penggunaan perangkat pemancar radio fm yang tidak bersertifikat tersebut dapat mengakibatkan gangguan spektrum frekuensi radio yang merugikan (Harmful Interference. Kota Surabaya menduduki urutan nomor 2 berjumlah 6 aduan gangguan SFR yang didominasi oleh gangguan frekuensi radio seluler (IPFR).

Grafik 11. Gangguan SFR Berdasarkan Service



Berdasarkan Grafik diatas dapat terlihat bahwa gangguan spektrum frekuensi radio yang paling mendominasi adalah Land Mobile (private). Umumnya gangguan pada frekuensi radio tersebut hasil kegiatan dari inspeksi radio, yang mana penggunaan frekuensi radio tidak sesuai dengan ISR-nya, dengan alasan gangguan yang dipakai terganggu oleh pengguna lain dan tidak menyadari penggunaan frekuensi radio yang tidak sesuai dengan ISR juga mengakibatkan gangguan spektrum frekuensi radio lainnya juga yang merugikan (Harmful Interference). Kemudian gangguan berikutnya ditempati pada dinas aerounatical/penerbangan yang umumnya adalah gangguan yang disebabkan dari penyelenggaraan radio siaran FM, yang mana frekuensi radio mengalami harmonisa, spurious emission dan atau parasit, selanjutnya land mobile public (radio trungking) yang umumnya merupakan frekuensi konsesi seperti penggunaan HT (Handy Talky) di wilayah pertambangan, wilayah PLN bahkan pada instansi pemerintah. Perlu diketahui, bahwa sebagai konsekuensi dari penerbitan izin, pemerintah berkewajiban untuk memastikan

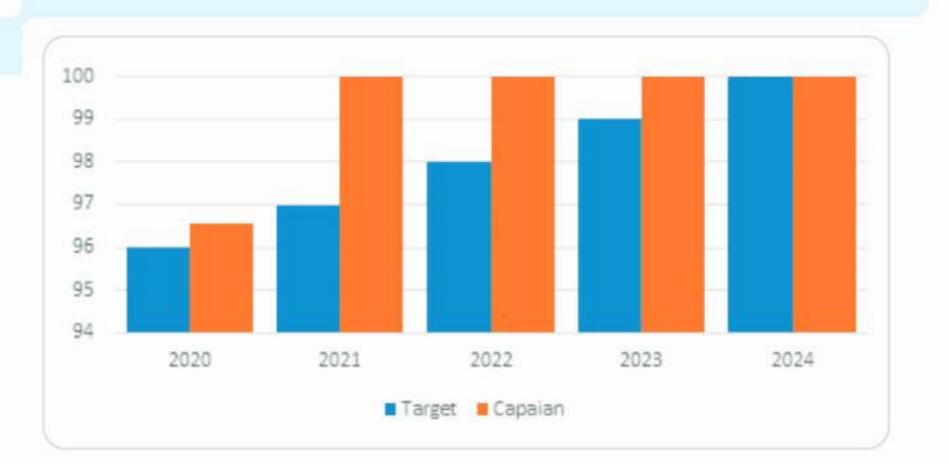
bahwa izin yang diterbitkan kepada pengguna frekuensi dapat dioperasionalkan sesuai dengan peruntukannya, sehingga setiap ganguan wajib ditangani agar:

- a. Pemegang izin dapat secara optimal mengoperasikan perizinannya;
- b. Masyarakat pengguna frekuensi dapat terlayani dengan baik;
- c. Pemerintah mendapat umpan balik bagi peningkatan pelayanan;
- d. Menjaga keamanan untuk frekuensi keselamatan

C. Capaian Target Penanganan Gangguan Spektrum Frekuensi Radio Tahun 2024

Target capaian Rencana Strategis (Renstra) untuk persentase penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dapat dilihat dari tertanganinya gangguan spektrum frekuensi radio yang terjadi baik dari hasil laporan aduan Masyarakat maupun hasil observasi, monitoring dan inspeksi rutin yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Surabaya di wilayah kerja di Jawa Timur. Dalam tiap tahunnya, UPT Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya telah berhasil menangani beberapa kasus gangguan spektrum frekuensi radioooo yang terbagi di beberapa dinas/service. Dari semua kasus gangguan tersebut dapat dihitung capaian realisasi penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang nantinya akan dibandingkan dengan target capaian tiap tahunnya. Perbandingan antara capaian target dan realisasi penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dalam periode 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

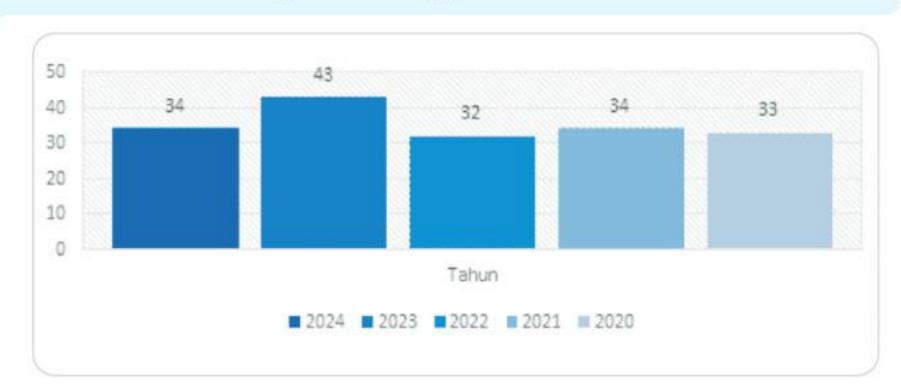
Grafik 12. Capaian Target Rensta 5 Tahun Terakhir



Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian target dalam rencana strategis (Renstra) di periode 2020 hingga 2024 untuk penanganan gangguan spektrum frekuensi radio telah melampaui target renstra yang telah ditetapkan. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam

menjaga dan mengatur penggunaan frekuensi radio, sehingga dalam penggunaannya tidak menimbulkan gangguan yang merugikan dan selalu menjaga agar masyarakat tertib menggunakan frekuensi radio sesuai dengan peruntukannya.

Grafik 13. Penanganan Gangguan Periode 5 Tahun



d.Inovasi/Analisa Keberhasilan/ Ketidaktercapaian

Salah satu faktor keberhasilan penanganan gangguan frekuensi radio adalah, penanganan gangguan frekuensi radio yang selama ini dilaksanakan juga diorientasikan untuk peningkatan kualitas pengalaman, maksudnya adalah penanganan gangguan frekuensi radio yang telah dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengalaman dalam penanganan gangguan frekuensi radio ke depan, sehingga dapat mempercepat/mempermudah dalam pelaksanaan penanganan gangguan frekuensi radio

e. Efisiensi Capaian

Keberhasilan Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya tahun ini khususnya pada "Persentase Penanganan Gangguan Frekuensi Radio untuk Keselamatan Penerbangan dan Maritim" adalah penyelesaian aduan yang melebihi target. Aduan/klaim gangguan penggunaan spektrum frekuensi radio pada dinas penerbangan, maritim dan dinas lainnya dari bulan Januari s.d Desember 2024 berjumlah 34 aduan gangguan SFR dan sudah tertangani seluruhnya. Sepanjang Tahun 2024 penanganan gangguan SFR telah

diselesaikan 100% dari target 99% penyelesaian penanganan.

Grafik 14. Status Gangguan Tahun 2024



f. Analisa keberhasilan

Capaian penanganan gangguan SFR terkait keselamatan bisa melebihi target yang telah ditetapkan, beberapa hal yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut yakni:

- a. Menyiapkan target pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya terhadap dinas keselamatan (dinas maritim dan penerbangan).
- b. Melakukan sosialisasi baik skala regional yang dilakukan oleh UPT maupun skala nasional dengan menghadirkan audiens dari beberapa instansi maupun komunitas seperti APJII, Himpunan Nelayan, PRSSNI, Orari dan Rapi, dan lainnya dan menghadirkan narasumber dari Pilot (sebagai pihak yang secara langsung terdampak dengan adanya gangguan komunikasi saat penerbangan di beberapa titik) serta BMKG (sebagai pihak yang menyediakan informasi terkait prakiraan cuaca dimana informasi tersebut dimanfaatkan oleh airnav dan pihak maskapai penerbangan). Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan awareness masyarakat mengenai penggunaan spektrum frekuensi.
- c. Melakukan edukasi sekaligus penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio. Pelaksanaan penertiban ini adalah bagian tindak lanjut proses edukasi dan pengawasan terhadap pengguna spektrum frekuensi radio

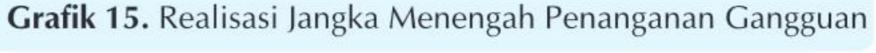
agar tertib menggunakan frekuensi radio agar tertib menggunakan frekuensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahun 2022, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya melakukan kegiatan penertiban nasional dengan target operasi dinas maritim dan amatir yang pelaksanannya juga melibatkan unsur dari TNI AL.

- d. Melakukan koordinasi dengan instansiinstansi terkait dalam melakukan proses penanganan gangguan spektrum frekuensi radio, serta melakukan pengawasan penggunaan spektrum frekuensi radio pada pita HF (*High Frequency*). Sebagai optimalisasi pencapaian, UPT Surabaya juga berinovasi dalam kegiatan sosialisasi.
- e. Pendekatan utama keberhasilan capaian target penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu Pertama, tahapan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio itu sendiri, Kedua, melalui evaluasi kegiatan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan oleh Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dan yang Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan khusus penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.
- f. Tindak lanjut/ pemanfaatan laporan kinerja ditahun sebelumnya Pada tahun 2023 ini telah dilakukan beberapa inovasi dan pengembangan dari tahun-tahun sebelumnya, salah satunya yaitu dibuatnya aplikasi pelaporan aduan gangguan yang disebut Aplikasi *Trouble Ticket*. Aplikasi *Trouble Ticket* ini dibuat bertujuan antara lain:
 - Mempercepat respon penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang terjadi/dilaporkan oleh masyarakat;
 - Tertib dalam penggunaan spektrum frekuensi radio; serta
 - Efisiensi dan transparansi dalam proses penanganan gangguan spektrum frekuensi radio.

Dengan Aplikasi Trouble Ticket ini masyarakat umum pengguna frekuensi radio dapat melaporkan aduan gangguan yang dialami, dengan pengoperasian aplikasi yang cukup sederhana dan sudah terintegrasi dengan data SIMS (Sistem Informasi Manajemen Spektrum SDPPI) sehingga user/pelapor cukup menginput nomor ISR (Izin Stasiun Radio) maka data user/pelapor akan muncul secara otomatis. Selain dari itu user/pelapor juga dapat menerima pemberitahuan notifikasi setiap adanya perkembangan status penanganan gangguan spektrum frekuensi radio yang telah dilaporkan secara otomatis melalui email yang didaftarkan.

Disamping pembuatan Aplikasi Trouble Ticket, inovasi dan kolaborasi dengan stakeholder lainnya juga dilakukan yaitu dengan tercapainya Perjanjian Kerja Sama antara TNI AL dan Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya ini merupakan tindak lanjut konkret berupa penandatanganan MoU kerja sama oleh Dirjen SDPPI dengan TNI AL. MoU berisi tentang sinergisitas program pengembangan SDM, Pengawasan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Kegiatan Peperangan Elektronika. Dengan adanya PKS ini tentunya sangat berguna bagi kedua belah pihak, bagi Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya kerja sama ini dapat dimanfaatkan untuk menjangkau sumber gangguan frekuensi radio yang dipancarkan oleh kapal yang berada di tengah laut yang tentunya sangat sulit dijangkau oleh tim. Apabila sumber gangguan tersebut berpotensi mengganggu terkait keselamatan transportasi penerbangan maka unsur TNI AL dapat dilibatkan untuk menjangkau dan membantu mendampingi tim Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dalam proses penertiban terhadap sumber gangguan tersebut, sehingga tim Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya tidak perlu lagi menunggu kapal yang menjadi sumber gangguan tersebut untuk bersandar di pelabuhan.

- g. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2024)
 - 1. Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 97% aduan gangguan yang tertangani dan capaian di akhir tahun 2021 sebesar 100% aduan gangguan yang tertangani.
 - 2. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 98% aduan gangguan yang tertangani dan capaian di akhir tahun 2022 sebesar 100% aduan gangguan yang tertangani.
 - 3. Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 99% aduan gangguan yang tertangani dan capaian di akhir tahun 2023 sebesar 100% aduan gangguan yang tertangani.
 - 4. Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% aduan gangguan yang tertangani.





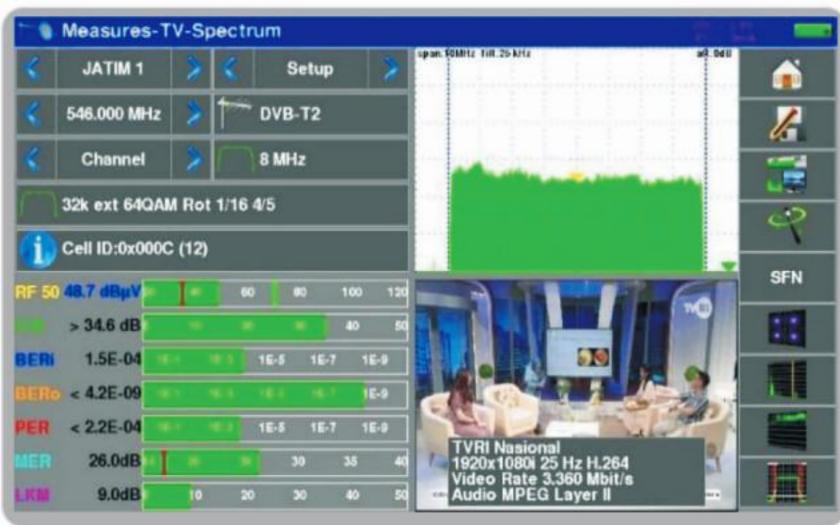
h. Efisiensi

Efisiensi capaian target "Persentase Penanganan Gangguan Frekuensi Radio untuk Keselamatan Penerbangan dan Maritim" dilakukan secara efektif dan efisien hal ini dipengaruhi dari beberapa faktor antara lain. Pertama, meningkatnya jumlah perangkat monitoring yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan Kedua, peningkatan jumlah SDM terutama fungsional pengendali frekuensi di beberapa UPT tersebut sangat berpengaruh terhadap efisien dalam penanganan gangguan spektrum frekuensi radio pada dinas penerbangan dan maritim. Selain kedua tersebut, inovasi mengenai layanan penanganan gangguan spektrum frekuensi radio dilakukan secara berkesinambungan salah satu contohnya adalah pembuatan aplikasi trouble tiket layanan penanganan gangguan SFR. Dengan adanya aplikasi ini, tentunya pengguna spektrum frekuensi radio dapat melakukan laporan pengaduan kapanpun dan dimanapun apabila frekuensi yang digunakan mengalami gangguan yang merugikan (Harmful Interference).

Data Dukung/Dokumentasi
 Melaksanakan kegiatan Penanganan Gangguan
 Frekuensi Radio TV Digital TVRI Bali di lokasi
 ukur LPP TVRI Gunung Gending test point (TP3)
 wilayah layanan Jatim 4 Banyuwangi.

Gambar 12. Kegiatan Penanganan Gangguan 2024





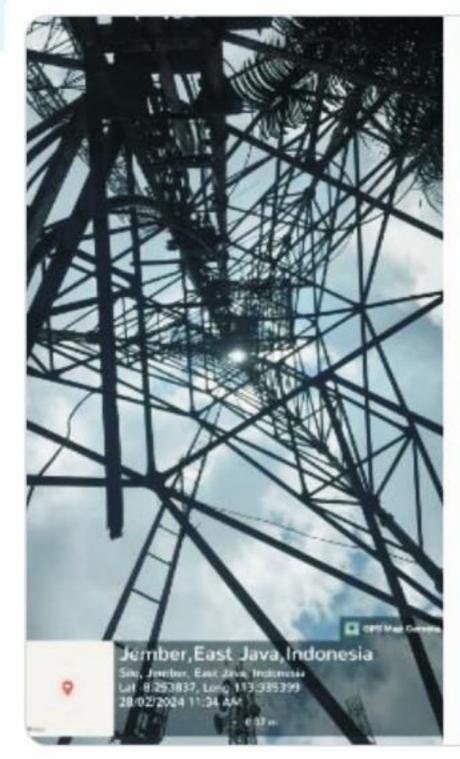
Hasil ukur spektrum analyzer TP3 wilayah layanan Jatim-4 Banyuwangi

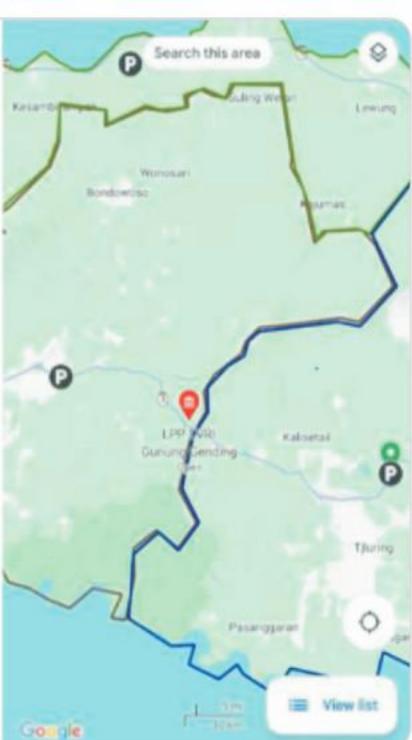
Test	Lat	Ref Nilai FS	Hasil Ukur	Penyelenggara MUX
Point	Long	(dBμV/m)	(dBμV/m)	
TP3	-8.274313 113.940920	20 ± 3 dB	53.82	LPPTVRI Gn. Gending Fc 546 MHz Channel 30 C/N 34.6 dB

Kesimpulan

Data hasil ukur test point (TP3) 53.82 melebihi nilai referensi 20 ± 3 dB sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Induk Frekuensi Radio untuk Keperluan Penyelenggaraan Televisi Siaran Digital Terestrial pada Pita Frekuensi Radio *Ultra High Frequency*.

Gambar 13. Pemeriksaan azimuth antenna dan power pemancar LPP TVRI Gn. Gading







Gambar 14. Melakukan observasi, monitoring, pengukuran dalam rangka penanganan gangguan frekuensi radio 853.6625 MHz PT. PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi (UP2D) Jatim di Penanjakan, Pasuruan.



IK.1.4 Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi

a. Latar Belakang, Maksud, Tujuan

Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya merupakan salah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital, Kemenkomdigi yang bersifat mandiri dalam menjalankan tugas fungsi pengawasan pengendalian spektrum frekuensi radio yang mana memiliki nilai yang strategis dalam meningkatkan iklim ekonomi bangsa. Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya selaku UPT dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2017, tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio untuk memperlancar pelaksanaan tugas tersebut maka dibutuhkan dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi dan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi, serta penanganan gangguan frekuensi radio UPT Ditjen Infrastruktur Digital secara rutin dan berkesinambungan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan tepat sasaran sekaligus peningkatan pelayanan masyarakat yang optimal.

Maksud dan Tujuan untuk menjaga ketertiban dalam pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan penggunaan perangkat telekomunikasi di Wilayah Jawa Timur.

b. Sasaran Kegiatan

- 1. Melakukan penertiban terhadap penggunaan frekuensi radio tanpa izin.
- Melakukan penertiban terhadap perangkat telekomunikasi yang tidak bersertifikasi dan memenuhi standarisasi yang tetapkan oleh Undang-Undang.
- 3. Melakukan penertiban terhadap penggunaan frekuensi radio tidak sesuai parameter teknis
- 4. Melakukan penertiban terhadap penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukannya.
- 5. Tindakan korektif terhadap penyimpangan penggunaan frekuensi radio.

c. Capaian Target

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pengendalian DJID Nomor: 1083/DJDJID.4/PR.04.01/01/2024 Tanggal 19 Januari 2024 Perihal Penugasan Terkait Perjanjian Kinerja (PK) UPT Direktorat Pengendalian DJID Tahun 2024, ditetapkan target penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan penertiban alat/perangkat telekomunikasi yaitu sebesar 93%. Dalam rangka terwujudnya optimalisasi pengawasan dan pengendalian

penggunaan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan melalui kegiatan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau alat perangkat telekomunikasi pada tahun 2024, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya telah menyelesaikan 12 (Dua Belas) kegiatan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau alat perangkat telekomunikasi baik untuk kegiatan di dalam kota Surabaya maupun kegiatan di luar kota Surabaya di Propinsi Jawa Timur.

Tabel 15. Persentase Target dan Realisasi Penertiban SFR dan Alat/Perangkat Telekomunikasi Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2024	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	93%	 Penertiban SFR (60%) Penertiban Alat/Perangkat Telekomunikasi (40%) 	100%

Tabel 16. Persentase Target dan Realisasi Penertiban SFR dan Alat/Perangkat Telekomunikasi Tahun 2020-2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	2020		2021		2022		2023	
Sasaran Program	Sasaran Program	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase Penertiban Spektrum Frekuensi Radio dan Alat/Perangkat Telekomunikasi	50%	91,57%	70%	92,06%	90%	93,42%	93%	100%

Grafik 16. Target dan Realisasi PK tahun 2020 s.d 2024



Perhitungan Perjanjian Kinerja [PK] tahun 2024 sama dengan PK tahun 2022 dan 2023 namun berbeda dengan tahun 2021. Hasil realisasi PK kegiatan Penertiban SFR dan Alat/Perangkat Telekomunikasi dari tahun 2020 sampai dengan 2023 melebihi target. Pada tahun 2020 target PK sebesar 50% dan realiasi sebesar 91,57%, tahun 2021 target PK sebesar 70% dan realiasi sebesar 92,06%, tahun 2022 target PK sebesar 90% dan realiasi sebesar 93% dan realiasi sebesar 100%. Ada peningkatan antara tahun 2021 dan 2022 (dengan hasil perhitungan yang berbeda). Perhitungan PK di tahun 2024 dengan rumus sebagai berikut:

- Penertiban Spektrum Frekuensi Radio (.....%) = (Jumlah pengguna menjadi off air / Jumlah yang di tertibkan) x 100%
- Penertiban Perangkat (.....%)= Jumlah Tindak Lanjut Monitoring Alat Perangkat Telekomunikasi / Jumlah Alat dan Perangkat Telekomunikasi Ilegal x 100%

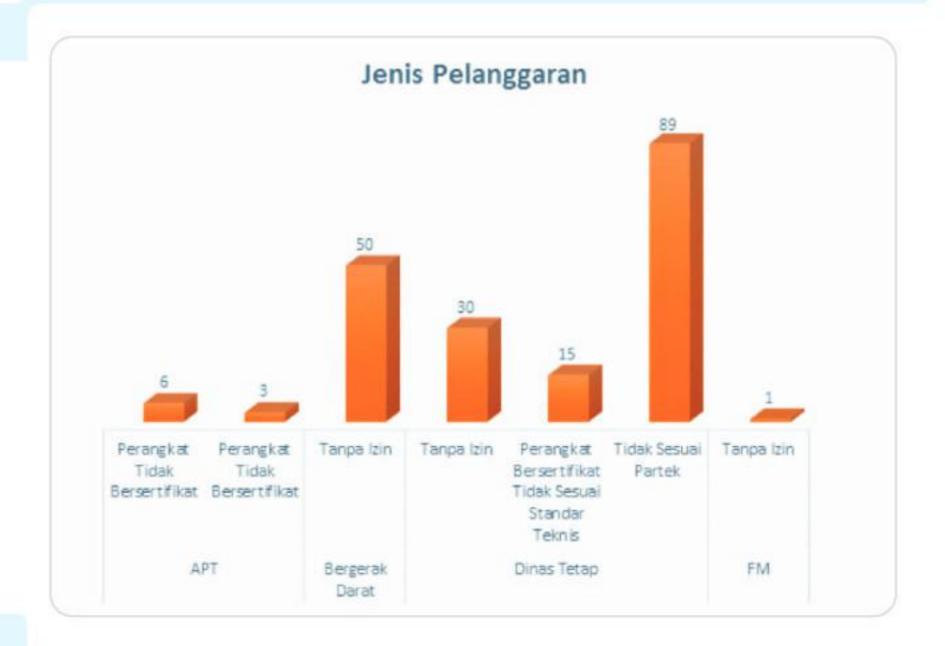
Target untuk penertiban spektrum frekuensi radio yaitu untuk dinas bergerak darat, amatir, dinas tetap dan penyelenggara jasa internet. Pada tahun 2024, untuk target kegiatan Penertiban Nasional juga telah terpenuhi, ada 4 kegiatan Penertiban yang dilakukan serentak secara Nasional di seluruh UPT Ditjen Infrastruktur Digital yaitu dengan target Dinas Tetap (Microwavelink), dinas bergerak darat dan alat/perangkat telekomunikasi, pengguna pita frekuensi radio 2,4 GHz dan pita frekuensi radio 5,8 GHz, vendor perangkat WLAN serta vendor/pedagang / pengguna perangkat penguat sinyal (Repeater) dan penertiban Alat/Perangkat Telekomunikasi.

- d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian Dengan diselesaikannya 12 (Dua Belas) kegiatan penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio dan/atau alat perangkat telekomunikasi, akan memberikan beberapa manfaat diantaranya
 - 1. Adanya perlindungan terhadap pengguna frekuensi radio legal.
 - 2. Meningkatnya penggunaan frekuensi radio secara tertib dan tidak saling mengganggu sesuai peraturan yang berlaku,
 - Setiap penggunaan frekuensi radio dilengkapi izin stasiun radio [ISR] dan setiap perangkat yang digunakan sesuai dengan standarisasi yang ditentukan.

Gambar 15. Timeline Penertiban Jawa Timur 2024



Grafik 17. Hasil Penertiban 2024



Grafik 18. Alat/Perangkat Telekomunikasi



Grafik 19. Tindakan Penertiban



Dari Grafik diatas diketahui bahwa penertiban terbesar adalah pelanggaran Tanpa Izin (tidak memiliki ISR) pada dinas bergerak darat yaitu sebanyak 50 frekuensi dan pelanggaran tidak sesuai partek pada dinas tetap sebanyak 89 frekuensi. Untuk penindakan terbesar yaitu sebesar 65% atau 105 perangkat telekomunikasi pengguna berhasil dititipkan. Sebanyak 25 perangkat telah dimusnahkan pada tanggal 30 Oktober 2024.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 7 Tahun 2021 tentang penggunaan spektrum frekuensi radio dimana setiap penggunaan spektrum frekuensi wajib terlebih dahulu mendapatkan izin penggunaan spektrum frekuensi dari Menteri. Pelanggaran Penggunaan frekuensi radio baik tanpa izin, tidak sesuai parameter teknis, tidak sesuai

ketentuan teknis dan tidak bersertifikat. Setiap pelanggaran penggunaan frekuensi radio akan dikenakan sanksi adminitratif yang terdiri dari teguran tertulis, denda administrative dan/atau pencabutan persetujuan kerja sama penggunaan Spektrum Frekuensi Radio. Denda administrative dari kegiatan penertiban yaitu sebagai berikut:

Grafik 20. Rekapitulasi Denda Administratif



Dari Grafik diatas diketahui bahwa denda administratif terbesar berasal dari pelanggaran dinas bergerak darat yaitu sebesar Rp. 86.116.800 dan untuk dinas tetap sebesar Rp. 79.926.000 dan dinas siaran sebesar Rp. 6.237.000.

e. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya

Penetapan dan pencapaian target penertiban spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi pada tahun 2021, 2022 dan 2023 telah memberikan motivasi kepada Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya untuk terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan SFR dan alat/perangkat telekomunikasi bersertifikasi. Kegiatan Penertiban Nasional juga terbukti secara efektif meningkatkan kinerja UPT dengan target yang semakin meningkat setiap tahun. Pada tahun 2024 seluruh kegiatan terbukti efektif meningkatkan PK dan pengawasan dan pengendalian penggunaan SFR dan alat/perangkat telekomunikasi bersertifikasi di wilayah Jawa Timur.

f. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2020-2024) Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 50% pengguna dan capaian di akhir tahun 2020 sebesar 91,57%.

Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 70% pengguna dan capaian di akhir tahun 2021 sebesar 92,06%.

Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 90% pengguna dan capaian di akhir tahun 2022 sebesar 93,42%.

Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 93% pengguna dan capaian di akhir tahun 2023 sebesar 100%.

Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 93% pengguna dan capaian di akhir tahun 2023 sebesar 100%.

Efisiensi

Melalui penertiban SFR dan alat/perangkat telekomunikasi yang mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar 93%, serta meningkatnya PNBP sebagai hasil pengurusan izin dan adanya penambahan PNBP dari sektor pengenaan denda administratif terhadap temuan frekuensi 194 pelanggaran penggunaan frekuensi dan Alat/Perangkat Telekomunikasi merupakan wujud efektifitas dan efisiensi pelaksana tugas.

h. Data Dukung/Dokumentasi

Gambar 16. Kegiatan Penertiban Tahun 2024



















IK.1.5 Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur di UPT

a. Latar Belakang, Maksud, Tujuan
Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR) adalah
suatu sistem perangkat yang mendukung
pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio di
suatu wilayah baik berupa stasiun tetap, stasiun
bergerak maupun perangkat jinjing (handheld).

Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya memiliki 14 (empat belas) stasiun SMFR tetap yang terdiri dari 3 (tiga) Stasiun DF, 4 (empat) Stasiun Mon dan 7 (tujuh) stasiun *transportable*. SMFR bergerak sebanyak 3 (tiga) unit serta didukung dengan perangkat *handheld* (jinjing) baik berupa alat ukur, *portable* DF, perangkat monitor maupun perangkat lainnya yang fleksible dan mudah dibawa.

Gambar 17. Penempatan Stasiun SMFR Tetap & Transportable di Jawa Timur



Gambar 18. Mobile Stasiun SMFR Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya



Dari 14 (empat belas) SMFR Tetap yang dimiliki Balmon Surabaya, terdapat variasi merk perangkat, jenis perangkat serta tahun pengadaan yang mempengaruhi kondisi serta performa, Hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan perangkat SMFR.

Tabel 17. 14 SMFR Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya

No	Jenis dan Lokasi	Merk	Tahun Pengadaan	Kondisi
1	Sukodono DF	Rohde & Schwartz	2009	Berfungsi Baik
2	Mulyorejo DF	Rohde & Schwartz	2009	Berfungsi Baik
3	Benowo DF	Rohde & Schwartz	2009	Berfungsi Baik
4	Surabaya Mon (Ketintang)	Rohde & Schwartz	2009	Berfungsi Baik
5	Malang Mon	Rohde & Schwartz	2009	Berfungsi Baik
6	Kediri Mon	Rohde & Schwartz	2009	Berfungsi Baik
7	Probolinggo Mon	Rohde & Schwartz	2009	Berfungsi Baik
8	Jember	LS Telecom	2016	Berfungsi Baik
9	Bojonegoro	LS Telecom	2016	Berfungsi Baik
10	Madiun	TCI	2022	Berfungsi Baik
11	Tulungagung	TCI	2022	Berfungsi Baik
12	Glagah – Banyuwangi	TCI	2022	Berfungsi Baik
13	Singojuruh - Banyuwangi	TCI	2022	Berfungsi Baik
14	Srono – Banyuwangi	TCI	2022	Berfungsi Baik

b. Sasaran Kegiatan

Managemen / tata kelola pemeliharaan perangkat SMFR yang dilakukan oleh Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dalam rangka meningkatkan dan menjaga target kinerja berfungsinya perangkat SMFR dan alat monitoring / ukur terdiri dari preventive maintenance (pemeliharaan) dan corrective maintenance (perbaikan).

Preventive maintenance (pemeliharaan) dilakukan dengan melakukan pengecekan rutin dan uji fungsi perangkat terjadwal harian, mingguan dan bulanan baik dilakukan secara remote maupaun secara on site.

Corrective maintenance (perbaikan) dilakukan dengan melakukan perbaikan terhadap perangkat yang mengalami kerusakan, baik dilakukan mandiri oleh tim Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya maupun bekerjasama dengan pihak ke 3. Balmon Surabaya juga selalu mengupayakan langkah cepat dan effective dalam perbaikan perangkat dengan dukungan ketersediaan anggaran yang ada.

c. Capaian Target

Berikut Target dan Realisasi berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur 2024.

Tabel 18. Target dan Realisasi Berfungsinya Perangkat Pendukung SMFR dan Alat Monitoring/Ukur 2024

Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2024	Realisasi	Persentase
Presentase (%) Terjaganya Operaional dan Fungsi Monitoring dari Stasiun Monitoring Frekuensi Radio di UPT" dengan target realisasi 95%	95%	100%	105.2%

Dengan perhitungan rumus sebagai berikut,

% Capaian = Jumlah Stasiun Monitor Siap Operasional untuk Melakukan Monitoring x 100%

Total Stasiun Monitor

- d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian Penerapan tata kelola pemeliharaan perangkat dengan mengacu pada standard operasional prosedur baik dari sisi pemanfaatan maupun pemeliharaan:
 - Preventive maintenance
 - o Pemeriksaan berkala (harian, minggguan dan bulanan) melalui *Control Centre (CC)*
 - o Pemeriksaan/Inspeksi Stasiun SMFR *on Site*
 - Corrective maintenance
 - o Perbaikan perangkat
 - o Kalibrasi perangkat

Inspeksi Stasiun SMFR

Kegiatan pemeliharaan on site di stasiun SMFR dilakukan untuk memastikan kondisi perangkat SMFR yang pelaksanaannya mengacu pada SOP pemeliharaan dan perbaikan perangkat SMFR Nomor 731/DJSDPPI.4/OT.02.02/07/2020 tanggal 27 Juli 2022. Pada tahun 2024 terdapat 8 kali kegiatan inspeksi SMFR tetap Tujuan kegiatan ini adalah untuk melakukan pemeriksaan fisik dan uji fungsi perangkat SMFR. Kegiatan dilakukan secara berkala sesuai jadwal yang ditentukan atau berdasarkan skala prioritas jika dalam pemeriksaan melalui Control Centre ditemukan ketidaksesuaian atau kerusakan perangkat.

Perbaikan Perangkat SMFR

Tabel 19. Perbaikan Perangkat SMFR

No	Nama Perangkat	Kerusakan	Tindakan
1	Penangkal Petir SMFR: - Site SMFR Jember	Nilai Grounding mengalami kenaikan	Membuat sistem grounding yang baru
2	Sistem Grounding SMFR: - Site SMFR Probolinggo - Site SMFR Malang - Site SMFR Kediri - Site SMFR Singojuruh - Site SMFR Glagah - Site SMFR Srono	Nilai Grounding mengalami kenaikan	Memperkuat sistem grounding dengan memperbaharui Arester dan Lightning strike counter
3	Perangkat ESMD: - Probolinggo - Sukodono	General Error	Perbaikan dan penggantian komponen perangkat oleh penyedia
4	FMU306 SMFR Jember	General Error	Perbaikan dan penggantian komponen perangkat oleh penyedia
5	UPS APC2200	Baterai tidak dapat menyimpan daya	Pergantian baterai
6	UPS APC1000	Baterai tidak dapat menyimpan daya	Pergantian baterai
7	SMFR Mobile MUX	Kelistrikan Rusak	Perbaikan dan penggantian komponen perangkat oleh penyedia
8	Antenna Whip	Tidak dapat digunakan	Pergantian komponen
9	Connector Set	Tidak dapat digunakan	Pergantian komponen
10	Kelistrikan dan Inverter Mobil Monitoring	General Error	Perbaikan dan penggantian komponen perangkat oleh penyedia

Kalibrasi Perangkat SMFR Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya bekerjasama dengan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi melakukan kalibrasi perangkat SMFR baik SMFR stasiun tetap maupun perangkat handheld (jinjing). Adapun hasil kalibrasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Hasil Kalibrasi Tahun 2024

No.	Merk	Tipe	S/N	Nomor Sertifikat	Ket.
1	Anritsu	MS2720T 9 kHz - 32 GHz	1323064	R-42/134/2024	
2	Sefram	7866 5-865 MHz	3553-7866 HDT2	R-42/139/2024	
3	Rohde & Schwarz	PR100 9 kHz - 7.5 GHz	102658	R-42/149/2024	
4	Rohde & Schwarz	ESMD 9 Khz - 3 GHz	100025	R-42/202/2024	
5	Rohde & Schwarz	ESMD 9 Khz - 3 GHz	100021	R-42/203/2024	

e. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya

Dengan melakukan managemen tata kelola pemeliharaan dan perbaikan perangkat yang baik, serta pencatatan dan dokumentasi berupa log book pelaporan hasil kegiatan dapat menjadi acuan dalam memahami kinerja perangkat serta dapat dimanfaatkan menjadi referensi dalam kegiatan pemeliharaan dan perbaikan perangkat di masa mendatang sehingga langkah perbaikan lebih efektif.

Dengan demikian diharapkan target capaian kegiatan inspeksi pemeliharaan perangkat SMFR yang akan dilaksanakan di tahun 2025 dapat dipertahankan dan dilaksanakan dengan hasil yang lebih optimal, sehingga mampu meningkatkan produktivitas kinerja pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, hal ini terlihat dari terpenuhinya perjanjian kinerja pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio tahun 2025.

f. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2021-2024) Berikut perbandingan target dan realisasi dari tahun 2021 hingga 2024:

Tabel 21. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2021-2024

Tahun Anggaran	Target	Realisasi	Capaian
2021	85%	89.33%	105.1%
2022	95%	96.1%	101.1%
2023	95%	96.8%	101.1%
2024	95%	100%	105.2%

g. Efisiensi

Keberhasilan Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya tahun ini khususnya pada persentase berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur Jenderal SDPPI pada tahun 2024, adalah dengan melakukan tata kelola pemeliharaan perangkat yang efektif serta mengupayakan secara maksimal optimalisasi pemanfaatan terhadap keseluruhan perangkat yang dimiliki Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya termasuk dengan melakukan inspeksi stasiun SMFR on Site secara berkala dengan jadwal yang sudah ditentukan sehingga kondisi perangkat dapat diperhatikan secara betul dan juga dilakukan perbaikan sistem penangkal petir guna mengantisipasi cuaca ekstrim pada tahun 2024.

h. Data Dukung/Dokumentasi

Gambar 19. Realisasi kegiatan mendukung berfungsinya perangkat pendukung SMFR dan alat monitoring/ukur tahun 2024



IK.1.6. Persentase (%) Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio Berbasis CAT

a. Latar Belakang, Maksud, Tujuan Sasaran Kegiatan Implementasi Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik diwujudkan dengan penggunaan teknologi informasi dalam suatu sistem perizinan terintegrasi secara online pada masyarakat, demikian juga perizinan di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dalam mengimplementasikan PP 24 tahun 2018 itu, Kemenkomdigi sebagai kementerian negara yang bertanggung jawab dalam bidang telekomunikasi di Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018, tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk. Dengan adanya 3 (tiga) Regulasi tersebut, Ditjen Infrastruktur Digital, yang merupakan salah satu satuan kerja eselon 1 di KEMKOMINFO, menggunakan full online service pelayanan perizinan Izin Amatir Radio (IAR) dan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dengan mendaftar melalui halaman https://iarikrap.postel.go.id dan pelaksanaan ujian berbasis online dengan metode Computer Assisted Test (CAT) pada Ujian Negara Amatir Radio (UNAR).

b. Sasaran Kegiatan

Pelaksanaan Ujian Negara Amatir Radio (UNAR) di wilayah Jawa Timur di bagi menjadi 2 kategori yaitu: UNAR Reguler dan UNAR Non Reguler. UNAR Reguler adalah ujian yang dilaksanakan di kantor Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya, sedangkan UNAR Non Reguler adalah ujian yang dilaksanakan di Kab/Kota di wilayah Jawa Timur, dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan ke peserta ujian calon amatir radio atau amatir radio yang akan naik tingkat, UNAR dilaksanakan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT)

c. Capaian Target

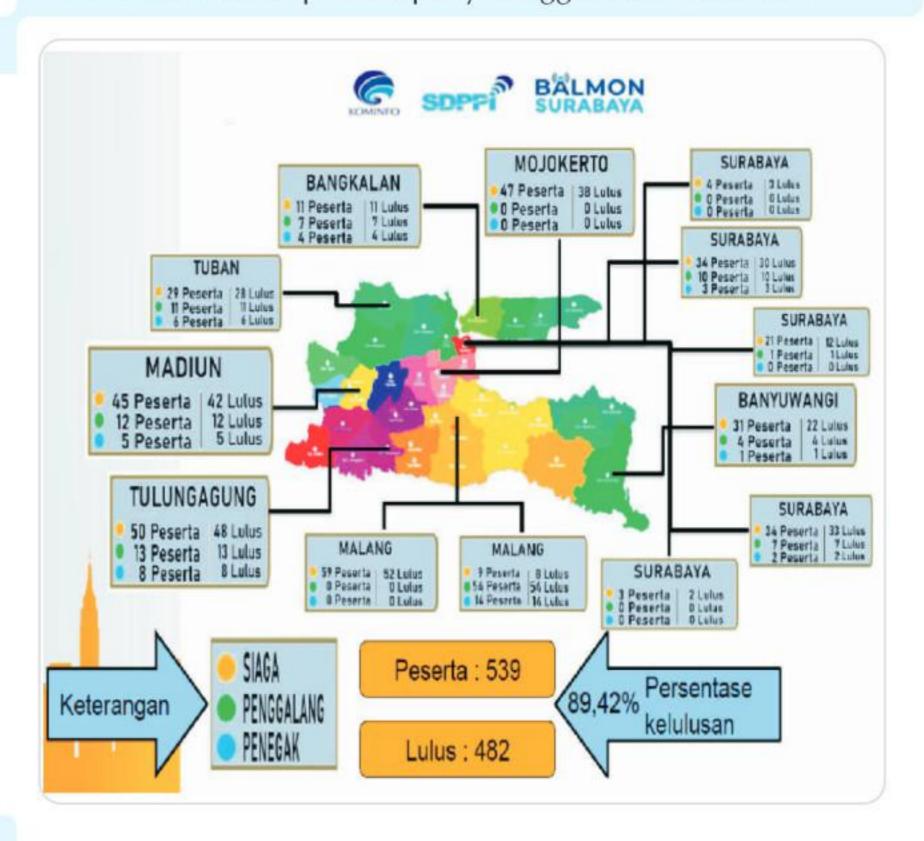
Indikator Kinerja Persentase (%) pelaksanaan CAT UNAR memiliki target realisasi sebesar 100%. Berdasarkan data target pelaksanaan UNAR di tahun 2024 sebesar 420 peserta, dan animo masyarakat untuk menjadi anggota amatir radio tinggi, realisasi di akhir tahun total terjaring 539 peserta diketahui bahwa capaian Indikator hingga akhir Desember 2024 adalah sebesar 128,33% dari target yang ditetapkan.

Tabel 22. Persentase Pelaksanaan UNAR Tahun 2024

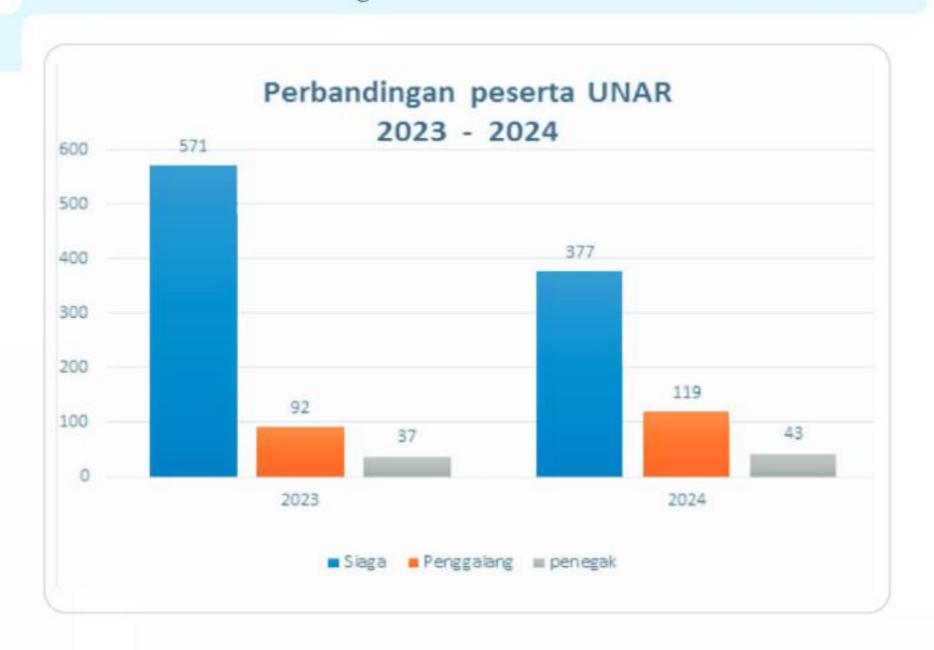
Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya pelaksanaan Pelayanan Publik terkait Konsultasi Penggunaan SFR, Pendampingan Penyelesaian Piutang dan Pelayanan Publik Maritim Nelayan (MOTS)	Persentase pelaksanaan CAT UNAR	420	539	128,33%

Pelaksanaan UNAR oleh Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya sepanjang tahun 2024 adalah sebanyak 13 (tiga belas) Kab/Kota pelaksanaan, dengan total peserta sebanyak 539 peserta dan persentase kelulusan sebesar 89.42%.

Gambar 20. Rekapitulasi penyelenggaraan UNAR 2024



Grafik 21. Perbandingan Jumlah Peserta UNAR 2023-2024



- d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian
 Penggiat amatir di Jawa Timur menunjukkan tingkat
 minat yang tinggi untuk mengikuti UNAR untuk
 mendapatkan IAR, hal ini menunjukkan itikad baik
 masyarakat sehingga perlu dilayanidan difasilitasi.
 Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya merumuskan
 strategi pelaksanaan untuk memfasilitasi dan
 memberikan kemudahan bagi peserta ujian amatir
 radio di wilayah Jawa Timur sebagai berikut:
 - Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya mengadakan UNAR Non Reguler di wilayah Kabupaten/Kota

dengan urutan peminat terbanyak dan belum dilaksanakan UNAR pada tahun sebelumnya, hal ini untuk memfasilitasi calon peserta UNAR yang terkendala dalam hal akomodasi dan transportasi jika harus mengikuti UNAR Reguler di Surabaya.

 Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya lebih mengedepankan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan UNAR Non Reguler yang lebih dekat dengan calon anggota AMATIR RADIO dengan datang di wilayah Kab/Kota yang belum pernah melakukan kegiatan UNAR pada tahun-tahun sebelumnya.

e. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya

 Pada tahun 2023, terdapat IAR dengan status dicabut menurun (50%) dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan peran aktif Organisasi dalam membina anggotanya untuk lebih koperaktif dalam izin yang telah di keluarkan oleh DJID, PM KOMINFO RI No. 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk. Telah memberikan landasan yang kuat dalam mengatur lisensi, tata cara ujian, dan kewajiban seorang Amatir radio bukan hanya mampu mengoperasikan alat akan tetapi juga harus dapat optimal mengimplementasi dalam penanggulangan bencana alam atau non yang ada di sekitar atau wilayah tersebut, Dalam pelaksanaan UNAR 2024, kembali terjadi kenaikan angka pencabutan IAR yang mencapi (14,63%) dipicu dari kurangnya kooperaktif dari Organisasi kepada calon anggotanya yang telah lulus Ujian.

Grafik 22. Status IAR Tahun 2023 dan 2024



f. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2020-2024)
Pelaksanaan UNAR dengan sistem CAT sudah
diimplementasikan sejak Tahun 2020, baik Balai
Monitor SFR Kelas I Surabaya, Organisasi Amatir,
anggota Amatir, maupun masyarakat umum. Balai
Monitor SFR Kelas I Surabaya menganggap hal ini
sebagai tantangan dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya pelayanan masyarakat. Untuk itu, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya berkomitmen u n t u k m e n s o s i a l i s a s i k a n j u g a mengimplementasikan *Computer Assisted Test* (CAT) kepada calon Organisasi, penggunaan CAT merupakan bagian dari upaya Kementerian Kominfo untuk meningkatkan pelayanan perizinan secara cepat, mudah dan transparan kepada masyarakat.

Komitmen Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya tergambar dalam uraian target dan realisasi di bawah ini:

 Target dan realisasi capaian pelaksanaan UNAR dari tahun ke tahun selalu mencapai target 100% bahkan melampaui. Pada Tahun 2024, pelaksanaan CAT UNAR bekerja sama dengan organisasi amatir sehingga dapat terlaksana dengan lancar.

g. Efisiensi

Penggiat amatir di Jawa Timur menunjukkan tingkat minat yang tinggi untuk mengikuti UNAR untuk mendapatkan IAR, hal ini menunjukkan itikad yang baik sehingga perlu diwadahi secara efektif namun tetap maksimal. Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya merumuskan strategi pelaksanaan yang efisien untuk memfasilitasi dan memberikan kemudahan bagi peserta ujian amatir radio di wilayah Jawa Timur sebagai berikut:

- Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya mengadakan UNAR Non Reguler di wilayah Kabupaten/Kota dengan urutan peminat terbanyak dan belum dilaksanakan UNAR pada tahun sebelumnya, hal ini untuk memfasilitasi calon peserta UNAR yang terkendala dalam hal akomodasi dan transportasi jika harus mengikuti UNAR Reguler di Surabaya.
- Sebelum ujian dilaksanakan, panitia memberikan sosialisasi pada peserta untuk segera mendaftar sebagai anggota organisasi agar Izin Amatir Radionya tidak dicabut.
- Melaksanakan rapat evaluasi dengan melibatkan Organisasi Amatir pada tingkat Daerah maupun Lokal se-Jawa Timur. Data Dukung/Dokumentasi

h. Data Dukung/Dokumentasi

Gambar 21. Pelaksanaan UNAR CAT 2024





IK.1.7 Presentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL (SPP BHP)

a. Latar Belakang, Maksud, Tujuan
Untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Balai
Monitor SFR Kelas I Surabaya, layanan kepada
pengguna frekuensi radio sangat diperlukan untuk
memudahkan proses perizinan bagi pengguna di
Jawa Timur dengan kegiatan: penyampaian SPPBHP Frekuensi, pencegahan dan penanganan
piutang, serta pelimpahan ke KPKNL yang bertujuan
untuk mengurangi waba berpiutang BHP Frekuensi
Radio yang berdampak pada berkurangnya beban
piutang Negara di bidang Frekuensi Radio.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya melalui tim infrastruktur dan konsultasi publik melaksanakan kegiatan pelayanan berupa:

- Penyusunan rencana pelayanan penyampaian SPP BHP dan ISR dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Download SPP BHP Frekuensi dan penyampaian kepada pengguna frekuensi.
- 3. Mencatat kegiatan download, dan pengiriman tersebut.
- 4. Melaksanakan Kegiatan koordinasi /pendampingan dengan KPKNL
- 5. Melaporkan ke https://layananupt. ditfrek.postel.go.id/

b. Sasaran Kegiatan

- Sasaran kegiatan penyampaian SPP BHP
 Frekuensi adalah bagi client yang memiliki
 keterlambatan pembayaran SPP BHP, sehingga
 mencegah terjadinya Surat Teguran (ST) yang
 bisa mengakibatkan adanya piutang, sanksi
 administratif atau sanksi pencabutan izin.
- Sasaran kegiatan penanganan piutang dan koordinasi pelimpahan ke KPKNL adalah wajib bayar yg belum dapat melunasi piutang kepada Negara. Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya pada Tahun 2024 telah melakukan kegiatan koordinasi penangan piutang dengan KPKNL Pamekasan, Malang, Madiun, Sidoarjo dan Surabaya.

c. Capaian Target

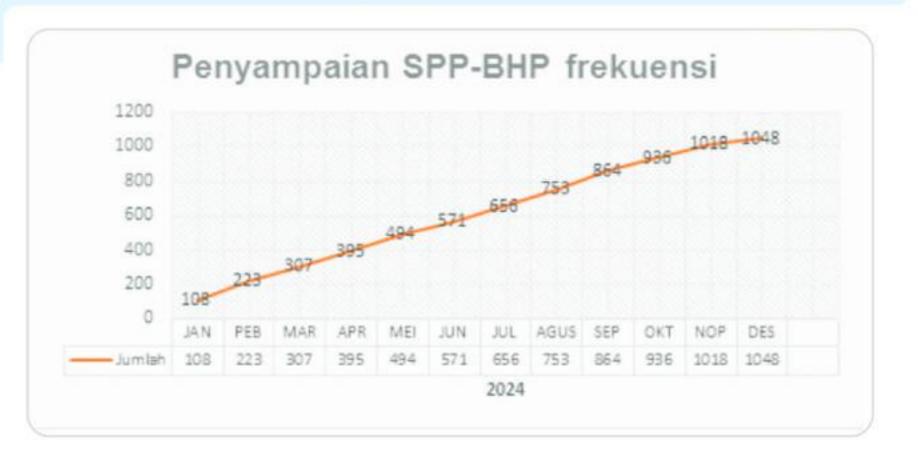
Tabel 23. Target dan Realisasi Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL (SPP BHP)

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Presentase (%) Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL (SPP BHP)	100%	100%	100%

Capaian Penanganan Piutang Dihubungi
Tersampaikannya 100% SPP BHP Frekuensi
adalah bagi client yang memiliki keterlambatan
pembayaran SPP BHP, sehingga mencegah
terjadinya Surat Teguran (ST) yang bisa
mengakibatkan sanksi administratif atau sanksi
pencabutan ijin.

Berikut ditampilkan data penyampaian SPP-BHP Frekuensi dan ISR/Bukti Pelunasan Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya di tahun 2024

Grafik 23. Jumlah Penyampaian SPP-BHP Frekuensi



 Capain kinerja koordinasi piutang ke KPKNL di wilayah Jawa Timur dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 24. Koordinasi Piutang ke KPKNL di Wilayah Jawa Timur 2024

No	KPKNL	Jumlah Penyera han	Jumlah waba lunas SPNL	Jumlah waba PJPN	Jumlah waba Surat Paksa	Jumlah Waba Pemberitahu an Surat Paksa	Jumlah Waba PSBDT	Jumlah Waba Pengembali an
1	JEMBER	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	PAMEKASAN	7	6	Nihil	1	Nihil	Nihil	Nihil
3	MALANG	23	10	Nihil	6	Nihil	6	1
4	MADIUN	7	5	Nihil	Nihil	Nihil	2	Nihil
5	SIDOARJO	19	19	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
6	SURABAYA	107	67	105	Nihil	25	12	3



Grafik 24. Target dan Realisasi Penanganan Piutang dan Koordinasi Pelimpahan ke KPKNL



- d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian
 - Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya rutin melakukan evaluasi pembayaran SPP BHP dan aktif melakukan kegiatan penyampaian SPP-BHP Frekuensi bagi *client* bermasalah dengan memanfaatkan *e-billing* ISR yang sudah terkoneksi OSS.
 - 2. Kendala yang dialami dalam upaya penanganan piutang BHP Frekuensi Radio yang banyak dialami adalah faktor wajib bayar, kurangnya kesadaran untuk bisa mandiri rutin mengunduh dokumen tagihan pada aplikasi *e-billing*, lupa akun *e-licensing*, pergantian penanggung jawab tanpa adanya serah terima akun, atau perubahan data klien, terutama perubahan alamat atau lokasi saat kunjungan alamat kosong dan tidak dapat dilacak. Hal ini menyebabkan tagihan tidak dapat didistribusikan secara efektif dan dapat diterima.
- e. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya

Upaya yang dilakukan untuk terus mengoptimalkan kegiatan penanganan piutang BHP Frekuensi Radio adalah dengan melakukan koordinasi baik dengan pihak internal maupun eksternal. Koordinasi secara internal, dengan membangun komunikasi dan kerjasama baik dengan tim kerja Monev dan Penertiban. Koordinasi secara eksternal, dengan membangun koordinasi dengan tim KPKNL, Direktorat Jendral DJID dan menggali informasi melalui media online.

f. Efisiensi

- 1. Realisasi kegiatan penyampaian SPP-BHP Frekuensi didukung oleh sistem perizinan secara e-licensing melalui https://billing-isr.kominfo.go.id/login dan sudah terkoneksi dengan https://oss.go.id. Dengan e-licensing ini efisiensi biaya dan waktu perizinan oleh pengguna frekuensi radio menjadi tinggi.
- 2. Memanfaatkan segala fasilitas kerja yang disediakan, baik tempat, waktu maupun perangkat kerja agar upaya dan kegiatan penanganan dan pencegahan piutang bisa berjalan baik dan sesuai target capaian.
- g. Data Dukung dan Dokumentasi

Gambar 22. Pendistribusian SPP-BHP dan Koordinasi dengan KPKNL









IK.1.8. Persentase (%) Sosialisasi Layanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat

a. Latar Belakang, Maksud, Tujuan
Sosialisasi Layanan Publik dan Survei Kepuasan
Masyarakat adalah dua aspek penting dalam
memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh
Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dapat diterima
dengan baik oleh masyarakat untuk terus
meningkatkan kualitas layanan. Survei Kepuasan
Masyarakat sebagai alat untuk mengukur tingkat
kepuasan pengguna, sejauh mana pengetahuan
tentang penggunaan frekuensi dan kualitas layanan
yang diharapkan masyarakat.

Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya selaku UPT dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 15 Tahun 2017, tentang Organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Monitor Spektrum Frekuensi Radio untuk memperlancar pelaksanaan tugas tersebut maka dibutuhkan dukungan layanan monitoring, pengukuran, validasi, penertiban penggunaan spektrum frekuensi radio, penanganan gangguan frekuensi radio UPT Ditjen Infrastruktur Digital serta Sosialisasi Pelayanan Publik sebagai media penyebarluasan informasi secara rutin dan berkesinambungan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal dan tepat sasaran sekaligus peningkatan pelayanan masyarakat yang optimal.

Maksud dan Tujuan Kegiatan Sosialisasi Layanan Masyarakat adalah untuk menyebarluaskan informasi mengenai pemanfaatan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio, peraturan perundang undangan yang baru serta tugas pokok dan fungsi Balmon Kelas I Surabaya kepada masyarakat luas di wilayah Jawa Timur.

b. Sasaran Kegiatan

- Menjangkau khalayak secara luas / secara massive dengan memanfaatkan beberapa mode/ platform media sosialisasi publik.
- Masyarakat Umum, lebih mengetahui informasi mengenai pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian frekuensi radio sesuai peraturan perundangan yang berlaku serta memahami tugas, pokok & fungsi Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya
- Beberapa kelompok masyarakat mungkin belum sepenuhnya terjangkau oleh pelayanan publik, baik karena jarak, kendala administratif atau ketidaktahuan mereka terhadap prosedur yang ada.

 Pengguna frekuensi radio, penyelenggara telekomunikasi dan penyiaran, mengetahui dan memahami proses perijinan penyelenggaraan dan pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio sehingga terwujud tertib penggunaan frekuensi radio.

c. Capaian Target

Sesuai dengan Nota Dinas Direktur Pengendalian DJID Nomor: 922/DJDJID.1/PR.04.07/03/2024 Tanggal 19 Maret 2024 Perihal : Permohonan Penandatangan pada Perjanjian Kinerja (PK) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Infrastruktur Digital Tahun 2024, ditetapkan target Sosialisasi Layanan Publik minimal 50% dari wilayah layanan dan tidak berulang dengan tahun yang sebelumnya untuk dinas yang sama (kecuali telah 100% di tahun sebelumnya) dengan catatan minimal responden sesuai dengan Kemenpan dan KPK minimal 30 orang dari seluruh layanan. Dalam rangka terwujudnya optimalisasi penyebaran informasi yang dilaksanakan melalui kegiatan Sosialisasi Layanan Publik pada tahun 2024, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya telah menyelesaikan kegiatan Monitoring Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) dan kegiatan Sosialisasi Layanan Masyarakat seluruh wilayah layanan Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Timur.

Tabel 25. Persentase Target dan Realisasi Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2024	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik	100%	Sosialisasi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam satu tahun	100%

Tabel 26. Persentase Target dan Realisasi Sosialisasi Pelayanan Publik Tahun 2021-2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	20	2021		2022		2023	
Sasaran Frogram	Sasaran Program	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Persentase Sosialisasi Pelayanan Publik	50%	50%	50%	50%	50%	50%	

Perhitungan Perjanjian Kinerja [PK] tahun 2024 sama dengan tahun 2021 hingga di tahun 2023. Hasil realisasi PK kegiatan Sosialiasi Pelayanan Publik ini dari tahun 2021 sampai dengan 2023 memenuhi target. Perhitungan PK di tahun 2024 dengan rumus sebagai berikut:

- 1. Target Peserta Sosialisasi minimal 30 orang.
- 2. Sosialisasi sama dengan atau diatas 50% maka nilai 100
- 3. Sosialisasi dibawah 50% maka nilai 75%

Target peserta untuk Sosialiasi Pelayanan Publik di Tahun 2024 yaitu untuk dinas bergerak darat, amatir dan *internet service provider*.

Tabel 27. Persentase Target dan Realisasi Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2024	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Survei Kepuasan Masyarakat	100%	a. Hasil IKM: 3,74 b. Hasil IIPP: 3,73	100%

Perhitungan Perjanjian Kinerja [PK] tahun 2024 untuk Survei Kepuasan Masyarakat, yaitu:

- 1. Target Survei sesuai dengan Kemenpan dan KPK minimal 30 orang dari seluruh layanan
- Minimal 1x pelaksanaan di Semester I dalam 1 tahun dengan menggunakan aplikasi dari Direktorat Operasi Sumber Daya Ditjen Infrastruktur Digital.
- 3. Termasuk survei pemahaman hasil dari Sosialisasi yang telah dilakukan Dit.Operasi (Pre-post Test)

Hasil Penilaiannya dengan parameter sebagai berikut:

- 1. Jika IKM di atas 3,2 dan IIPP di atas 3,6 maka capaian 100%
- 2. Jika hasil IKM dibawah 3,2 dan IIPP sama dengan atau di atas 3,6 maka capaian 75%
- 3. Jika hasil IKM di atas atau sama dengan 3,2 dan IIPP di bawah 3,6 maka capaian 75%
- 4. Jika hasil IKM di bawah 3,2 dan IIPP di bawah 3,6 maka capaian 50% Melihat tabel di atas, dengan capaian IKM 3,74 dan IIPP 3,73 maka nilai capaiannya adalah 100%
- d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian Dari hasil survei IKM terdapat kenaikan jumlah orang yang berpartisipasi mengisi survei dari 32 tahun 2023 menjadi 167 orang di tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya kolaborasi antara survei melalui door to door dan melalui kegiatan

sosialisasi. Untuk selanjutnya survei IKM juga biasa menyasar kepada klien yang telah mendapatkan pelayanan penanganan gangguan untuk mengetahui kepuasan terhadap pelayanan Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dalam penyelesaian gangguan SFR.

Inovasi dalam pengawasan dan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio sangat penting untuk memastikan efektivitas komunikasi dan layanan teknologi informasi. Analisa keberhasilan dalam hal ini dapat dilihat dari pemahaman masyarakat mengenai tugas pokok dan fungsi instansi yang berwenang dalam pengawasan frekuensi.

Dengan diselesaikannya kegiatan sosialiasi, akan memberikan beberapa manfaat diantaranya meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai tugas, pokok dan fungsi pengawasan pengendalian penggunaan spektrum frekuensi radio, proses perijinan frekuensi radio serta pemanfaatan frekuensi bahaya serta aturan-aturan dalam memanfaatkan. Pada Tahun 2024, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya melakukan 3 (tiga) kali kegiatan Sosialisasi Pelayanan Publik dan berhasil melebihi target PK yang ditetapkan. Hal ini salah satu bentuk inovasi Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dalam usaha menyebarluaskan informasi secara masif kepada masyarakat terutama pengguna SFR dan APT yang ada di Jawa Timur.

Begitu pula capaian dari Survei Kepuasan Masyarakat. Angka capaian IKM 3,74 dan IIPP 3,73 mencerminkan tuntasnya PK dengan nilai 100%. Hal ini tentunya menjadi kabar baik bagi kami. Setidaknya di tahun 2024, perwakilan masyarakat telah menyampaikan penilaiannya terhadap kami. Menyelesaikan sosialisasi dan survei kepuasan Masyarakat dengan angka yang cukup memuaskan tidak kemudian membuat kami puas. Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya akan terus berbenah dan memperbaiki layanan agar terus bermanfaat untuk Masyarakat.

e. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya

Penetapan dan pencapaian target Sosialisasi Pelayanan Publik pada tahun 2021 sampai dengan 2023 telah memberikan motivasi kepada Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya untuk terus meningkatkan pengawasan dan pengendalian penggunaan SFR dan alat/perangkat telekomunikasi bersertifikasi. Kegiatan sosialiasi juga terbukti secara efektif meningkatkan kinerja UPT sesuai tupoksinya dengan target yang semakin meningkat setiap tahun

Pada tahun 2024 seluruh kegiatan terbukti efektif meningkatkan PK dan pengawasan dan pengendalian penggunaan SFR dan alat/perangkat telekomunikasi bersertifikasi di wilayah Jawa Timur.

Target realisasi Jangka Menengah (2020-2024) Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 100% pengguna dan capaian di akhir tahun 2020 sebesar 100%.

Pada tahun 2021 ditargetkan sebesar 100% pengguna dan capaian di akhir tahun 2021 sebesar 100%.

Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100% pengguna dan capaian di akhir tahun 2022 sebesar 100%.

Pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% pengguna dan capaian di akhir tahun 2023 sebesar 100%.

Pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 100% pengguna dan capaian di akhir tahun 2024 sebesar 100%







Efisiensi

Efisiensi dalam pelayanan publik dapat tercapai melalui sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Sosialisasi pelayanan publik dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan memberi pemahaman yang jelas tentang tugas dan fungsi Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya juga kebijakan atau regulasi terkait pemanfaatan penggunaan frekuensi. Melalui sosialisasi pelayanan publik yang mencapai 100% sesuai target yang ditetapkan sebesar 100%, serta meningkatnya PNBP sebagai hasil pengurusan izin oleh pengguna frekuensi yang belum mengurus perizinan ISR merupakan wujud efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. Dengan demikian, peningkatan efisiensi publik tidak hanya meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

h. Data Dukung dan Dokumentasi

Gambar 23. Sosialisasi Pelayanan Publik









IK.1.9. Persentase (%) Bimbingan Teknis SRC/LRC

a. Latar Belakang, Maksud, Tujuan
Bimbingan Teknis (Bimtek) Sort Range Certifcate /
Long Range Certificate (SRC/LRC) adalah bagian
dari pelayanan MOTS yang bertujuan untuk melatih
sumber daya manusia nelayan/pelaku usaha sektor
perikanan pengguna frekuensi radio dalam
komunikasi umum di laut agar memiliki
keterampilan dan menjaga etika komunikasi di
udara, atau sesuai dengan peruntukkannya.
Diharapakan dengan adanya Bimbingan Teknis SRC
/ LRC ini dapat memwujudkan penggunaan
spectrum frekuensi radio yang tertib, efisien, dan
sesuai peruntukkannya sehingga tidak
menyebabbkan interferensi bagi pengguna lain di
kanal berbeda.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan Bimbingan Teknis SRC /LRC adalah nelayan, nahkoda, atau awak kapal, para pelaku usaha sector perikanan yang belum memiliki Sertifikasi Operator Radio (SOR) untuk mengoperasikan alat komunikasi radio antar kapal maupun antar stasiun radio pantai.

c. Capaian Target

Indikator Kinerja Persentase (%) peserta Bimbingan Teknis Serifikasi Operator Radio SRC/LRC untuk nelayan/pelaku usaha sektor perikanan ditetapkan di tahun 2024 sebanyak 60 peserta, realisasi di akhir tahun 2024 dengan Bimtek pertama dengan capaian 71 peserta mendapatkan serifikat SRC dan Bimtek kedua dengan capaian 50 peserta mendapatkan sertifikat LRC, total 121 (201,67%) peserta dari target yang ditetapkan. Pada Tahun Anggaran 2024

Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya melaksanakan program kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sertifikasi Operator Radio (SOR) untiuk nelayan dengan realisasi kegiatan sesuai rencana dan target 100% yaitu sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dilaksanakan di PPP Pondok Dadap dan PPP Tamperan.



Tabel 28. Persentase Peserta Bimtek dan atau SRC/LRC Nelayan Program MOTS Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya pelaksanaan Pelayanan Publik terkait Konsultasi Penggunaan SFR, Pendampingan Penyelesaian Piutang dan Pelayanan Publik Maritim Nelayan (MOTS)	Jumlah peserta Bimtek SRC/LRC Nelayan Program MOTS (100 %)	100%	100%	100%

- Rincian capaian kinerja kegiatan perizinan maritime nelayan sebagai berikut:
 - o Capaian kinerja Bimbingan Teknis Serifikasi Operator Radio SRC/LRC
 - o Terlaksana Bimtek / Sosialisasi SRC pada tanggal 5 Maret 2024 di PPP Pondok Dadap -Malang dengan jumlah peserta bimtek SRC 71 peserta.
 - o Terlaksana Bimtek / Sosialisasi LRC pada tanggal 22 Mei 2024 di PPP Tamperan -Pacitan dengan jumlah peserta bimtek LRC 50 peserta.

Grafik 25. Capaian Bimtek / Sosialisasi SRC/LRC Tahun 2024



- d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian Perolehan Sertifikat SRC/LRC pada tahun 2024 naik dari tahun 2023, jumlah Sertifikat SRC/LRC, hal ini tidak lepas dari besar nya upaya Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya, baik dalam evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya, program, pelaksanaan dan pengawasan program maupun dalam menjalin sinergi dengan instansi terkait, diantaranya Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, PPP Podok Dadap, PPP Tamperan dan organisasi nelayan setempat.
- e. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya

Dari laporan kinerja sebelumnya, diketahui bahwa perolehan Sertifikat SRC/LRC tahun 2024 didominasi oleh Sertifikat LRC. Hal ini menjadi perhatian khusus Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya, sehingga pelayanan Bimtek / Sosialisasi SRC/LRC tahun 2024 telah disusun strategi dan rencana pelaksanaan program untuk meningkatkan pelayanan MOTS di tahun berjalan sebagai berikut:

- Strategi penentuan lokasi loket pelaksanaan Bimtek/Sosialisasi SRC/LRC yang strategis yakni di PPP. Podok dadap dan PPP Tamperan
- Menjalin sinergi dengan instansi terkait yakni Distrik Navigasi Kelas I Surabaya
- Target realisasi Jangka Menengah (2020-2024) Bimbingan teknis Sort Range Certifcate / Long Range Certificate (SRC/LRC) adalah bagian dari pelayanan

MOTS yang bertujuan untuk melatih Sumber Daya Manusia nelayan/pelaku usaha sektor perikanan pengguna frekuensi radio dalam komunikasi umum di laut agar memiliki ketrampilan dan menjaga etika komunikasi di udara. Peserta bimtek (nelayan) selain mendapatkan serifikat SRC/LRC juga mendapatkan IKRAN untuk mengoperasikan perangkat di beberapa range HF di perangkat telekomunikasi yang dimiliki.

Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dalam perencanaan Bimtek/Sosialisasi SRC/LRC tahun 2024, menyasar kepada nelayan dan stakeholder perikanan laut sesuai tujuan DJID dalam menekan gangguan frekuensi penerbangan oleh pelaku sector perikanan laut.

g. Efisiensi

Untuk meningkatkan efektifitas Bimtek/Sosialisasi SRC/LRC, selain langkah – langkah edukatif dengan mendekatkan lokasi Bimtek/Sosialisasi SRC/LRC bagi nelayan di wilayah PPP. Pondok dadap dan PPP Tamperan.

h. Data Dukung dan Dokumentasi

Gambar 24. Pelaksanaan Kegiatan Bimtek/Sosilisasi SRC/LRC Tahun 2024







a. Latar Belakang, Maksud, Tujuan
Pelayanan publik kedua yang diberikan oleh Balai
Monitor SFR Kelas I Surabaya adalah Pelayanan ISR
Maritime on The Spot (MOTS) yang bertujuan untuk
mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait
penggunaan spektrum frekuensi radio kepada sector
pelaku usaha perikanan dan mendekatkan layanan
DJID terkait proses perizinan Izin Stasiun Radio (ISR)
Marine. Dengan adanya MOTS diharapkan
memudahkan nelayan/pelaku usaha perikanan

Diharapkan dengan upaya tersebut, dapat meningkatkan terbitnya ISR Maritime/IKRAN, meningkatkan kesadaran nelayan menggunakan radio dengan alat dan perangkat maritim yang bersertifikasi sesuai ketentuan maritim, sehingga dapat mewujudkan penggunaan frekuensi dan perangkat radio yang tertib, legal dan tidak saling mengganggu.

dalam memproses ISR Marine milik nelayan atau

pelaku usaha sektor perikanan.

b. Sasaran Kegiatan

Pada tahun 2024, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya membuka pelayanan loket MOTS di PPP Mayangan-Probolinggo. Hal-hal yang menjadi pertimbangan diambilnya PPP Mayangan sebagai lokasi MOTS adalah:

1. Karena PPP Mayangan merupakan Unit





Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Timur, akan lebih mudah dalam diseminasi informasi tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi pada perikanan lainnya di bawah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

- Ada sekitar 200 kapal yang beralamat di PPP Mayangan (sumber: data PPP Mayangan per Desember 2023).
- 3. Lokasi yang strategis karena berdekatan dengan Situbondo, Pasuruan, dan Sidoarjo.
- 4. Probolinggo merupakan Kab/Kota dengan produksi ikan terbanyak ke-5 di Jawa Timur (sumber: BPS Provinsi Jawa Timur).

c. Capaian Target

Indikator Kinerja Persentase (%) pelayanan MOTS memiliki target ISR *Marine/*IKRAN ditetapkan di tahun 2024 sebesar 60 ISR *Marine /* IKRAN, dengan realisasi capaian 51 ISR Marine dan 121 IKRAN total 172 ISR *Marine/*IKRAN (286,67%) dari target yang ditetapkan.

Tabel 29. Persentase ISR Marine/IKRAN Program MOTS Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Meningkatnya pelaksanaan Pelayanan Publik terkait Konsultasi Penggunaan SFR, Pendampingan Penyelesaian Piutang dan Pelayanan Publik Maritim Nelayan (MOTS)	Jumlah ISR marine / IKRAN Program MOTS (100%)	60	171	286,67%

Rincian capaian kinerja kegiatan perizinan maritime nelayan sebagai berikut:

o Terlaksana Bimtek/Sosialisasi LRC pada tanggal 5 Maret 2024 di PPP Pondok Dadap Kabupaten Malang dan tanggal 22 Mei 2025 di PPP Tamperan Kabupaten Pacitan dengan jumlah peserta Bimtek LRC 121 Orang berhasil memperoleh IKRAN.

Capaian kinerja pelayanan MOTS ISR Marine/IKRAN di lokasi loket di PPP Mayangan-Probolinggo: Capaian kinerja pelayanan ISR MOTS di lokasi loket di PPP Mayangan-Probolinggo:

Grafik 26. Capaian ISR MOTS Tahun 2024



d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian Tahun 2024 dengan tahun 2023 perolehan ISR Marine/IKRAN sama dengan jumlah ISR Marine berkurang tetapi hasil IKRAN naik, perolehan tersebut disebabkan peminat nelayan untuk mendapatkan IKRAN sangat besar, hal ini tidak lepas dari besarnya upaya Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya, baik dalam evaluasi pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan program juga menjalin sinergi dengan instansi terkait, diantaranya seperti Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, PPP Mayangan, PPP Pondokdadap, PPP Tamperan dan organisasi nelayan setempat.

Grafik 27. Perbandingan Capaian ISR MOTS Tahun 2023-2024



e. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya

Dari laporan kinerja sebelumnya, diketahui bahwa perolehan ISR *Marine*/IKRAN tahun 2023 dan 2024 sama. Perbedaannya ada pada capaian perolehan IKRAN tahun 2024. Hal ini menjadi perhatian khusus Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya, sehingga pelayanan ISR *Marine*/IKRAN tahun 2024 telah disusun strategi dan rencana pelaksanaan program untuk meningkatkan pelayanan MOTS di tahun berjalan sebagai berikut:

- Strategi penentuan lokasi loket pelayanan MOTS yang strategis yakni di PPP. Mayangan, penentuan ini berdasar data bahwa terdapat lebih dari 200 kapal yang beralamat di PPP Mayangan (sumber: data PPP Mayangan per Desember 2023).
- Menjalin sinergi dengan instansi terkait yakni Distrik Navigasi Kelas I Surabaya, PPP Mayangan, PPP Pondok dadap Malang, PPP Tamperan Pacitan dan organisasi nelayan setempat.
- Petugas loket pelayanan MOTS yang kompeten dan bertanggung jawab, serta PIC MOTS Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya yang bertugas secara rutin melakukan pengawasan progress kegiatan loket pelayanan MOTS secara bulanan
- f. Target dan Realisasi Jangka Menengah (2020-2024) Pelayanan MOTS bertujuan untuk mempermudah proses perizinan stasiun radio band maritim untuk nelayan, sehingga dapat mendorong pecepatan perizinan Izin Stasiun Radio (ISR) yang dimiliki kapal nelayan, serta mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dalam bisnis maritim pada nelayan Indonesia. Dalam mencapai tujuan yang dimaksud, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya melaksanakan sosialisasi MOTS, bimbingan teknis komunikasi kemaritiman SRC dan membuka loket perizinan di Pelabuhan perikanan.

Pelayanan publik kedua yang diberikan oleh Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya adalah Pelayanan ISR Maritime on The Spot (MOTS) yang bertujuan untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan terkait penggunaan spektrum frekuensi radio dan mendekatkan layanan DJID terkait proses perizinan Izin Stasiun Radio (ISR) Marine bagi nelayan atau pelaku usaha sektor perikanan. Dengan adanya MOTS diharapkan memudahkan nelayan/pelaku usaha perikanan dalam memproses ISR Marine milik nelayan atau pelaku usaha sektor perikanan.

Sertifikat SRC dan LRC yang dilanjutkan menjadi Izin Komunikasi Radio Perikanan (IKRAN) adalah bagian dari pelayanan MOTS yang bertujuan untuk melatih Sumber Daya Manusia nelayan/pelaku usaha di sektor perikanan pengguna frekuensi radio dalam komunikasi umum di laut agar memiliki ketrampilan dan menjaga etika komunikasi di udara. Peserta bimtek (nelayan) selain mendapatkan serifikat SRC/LRC, bagi peserta yang lulus akan mendapatkan IKRAN untuk mengoperasikan perangkat di beberapa range *High* Frekuensi (HF) di perangkat telekomunikasi yang dimiliki.

Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dalam perencanaan pembukaan loket perizinan MOTS tahun 2024, masih melihat potensi besar penambahan ISR Maritim di PPP.Mayangan – Probolinggo, sehingga loket pelayanan perizinan akan tetap dibuka di PPP.Mayangan – Probolinggo dengan target minimal ISR Maritim / IKRAN sebanyak 60 (enam puluh).

- g. Implementasi budaya nilai berAKHLAK pada kegiatan ini
 - Dalam proses pencapaian target pelaksanaan pelayanan perizinan MOTS di wilayah Jawa Timur, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya telah mengimplementasikan budaya nilai Ber-AKHLAK sebagaimana berikut ini:
 - a. Berorientasi Pelayanan. Penyelenggaraan kegiatan perizinan MOTS dilaksanakan untuk memberikan pelayanan terbaik dan pelayanan

prima sebagai wujud pelayanan dan tanggung jawab sebagai ASN yang melayani masyarakat, khususnya nelayan pengguna frekuensi radio kemaritiman.

- b. Akuntabel. Proses pelaksanaan perizinan MOTS dilakukan transparan dengan perizinan secara online, sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan seobyektif mungkin.
- c. Kompeten. Kegiatan perizinan MOTS dilaksanakan oleh tim kerja yang kompeten, yang mampu memberikan solusi saat pengurusan izin, baik terkait masalah teknis pelaksanaannya.
- d. Harmonis. Kegiatan perizinan MOTS didukung dengan lingkungan kerja yang kondusif dan saling bekerjasama, baik internal tim Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya maupun dengan stakeholder terkait.
- e. Loyal. Kegiatan ini dilaksanakan oleh tim kerja yang loyal dengan melaksanakan kegiatan sesuai peraturan yang ada dalam usaha meningkatkan pelayanan terhadap pengguna frekuensi radio.

- f. Adaptif. Penyelenggaraan perizinan MOTS dilakukan oleh tim kerja yang adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan perkembangan teknologi, hal ini dibuktikan kecekatan tim dalam menghadapi perubahan penerapan perizinan secara *online/e-licensing*.
- g. Kolaboratif. Penyelenggaraan perizinan MOTS dilakukan dengan kolaboratif baik secara internal Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya maupun dengan pihak eksternal, yakni stakeholderterkait.

h. Efisiensi

Untuk meningkatkan efektifitas perizinan MOTS di PPP.Mayangan, selain langkah – langkah edukatif dengan mendekatkan loket perizinan di wilayah PPP Mayangan, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya juga melaksanakan penertiban dinas maritim pada bulan Juli 2024. Kegiatan penertiban ini dikemas secara "edumanis" (edukatif dan humanis), yang dilakukan di lapangan merupakan yang edukatif yaitu dengan memberikan Surat Pernyataan dan pengarahan pengurusan ISR Maritim.

i. Data Dukung dan Dokumentasi

Gambar 25. Pelaksanaan Loket Pelayanan ISR Maritim Tahun 2024



Keterangan:

 Petugas Loket dalam melayani tamu yang akan melakukan perizinan
 Petugas Loket melakukan pemeriksaan ketepatan penggunaan kanal Frekuensi Radio yang hendak digunakan dalam berlayar



IK.1.11. Persentase (%) Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) Program Prima Aksi

- a. Latar Belakang, Maksud, Tujuan
 Salah satu parameter teknis yang wajib dipenuhi
 oleh setiap penggunaan frekuensi radio adalah
 kesesuaian lokasi dan titik koordinat stasiun radio
 dengan Izin Stasiun Radio (ISR). Untuk memastikan
 akurasi dan kepatuhan lokasi fisik site pengguna,
 maka dilakukan proses verifikasi data koordinat situs
 ISR Microwave Link dan Penyiaran melalui program
 Prima Aksi.
- b. Sasaran Kegiatan Target lokasi pelaksanaan verifikasi data koordinat site tahun 2024 di wilayah Jawa Timur, adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Target Lokasi Verifikasi Data Koordinat Site 2024

Jumlah Kab/Kota	Populasi ISR	Nama Kab/Kota
8	14.662	Kab. Banyuwangi Kab. Sidoarjo Kab. Jember Kab. Gresik Kab. Tuban Kab. Pasuruan Kab.Malang Kota Surabaya

c. Capaian Target

Tabel 31. Target dan Realisasi Verifikasi Data koordinat Site ISR Microwave Link danPenyiaran (QR Code Site) Program Prima Aksi Tahun 2024

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2024	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Presentase (%) Verifikasi Data koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) Program Prima Aksi	100 %	100 %	100 %

Tabel 32. Target dan Realisasi Verifikasi Data Koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code) Program Prima Aksi Tahun 2022-2024

	Tahun Anggaran						
Indikator Kinerja Sasaran Program	2022		2023		2024		
i rogram	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Presentase (%) Verifikasi Data koordinat Site ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site) Program Prima Aksi		Ē	100 %	100 %	100 %	100 %	

Program Prima Aksi baru dilaksanakan mulai tahun 2024. Rincian jumlah ISR terverifikasi per Kab/Kota sebagai berikut:

Tabel 33. Tabel Realisasi Prima Aksi Per Kab/Kota

Nama Kab/Kota	Status Verifikasi	ISR Terverifikasi	% ISR Terverifikasi	% Realisasi Kab	% Realisasi ISR	% Capaian ISR
Kab. Banyuwangi	Ya	1092	100.00%			
Kab. Sidoarjo	Ya	2400	100.00%			
Kab. Jember	Ya	1529	100.00%			
Kab. Gresik	Ya	1474	100.00%	100 000/	100 000/	100.000
Kab. Tuban	Ya	1080	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
Kab. Pasuruan	Ya	1073	100.00%			
Kab.Malang	Ya	2068	100.00%			
Kota Surabaya	Ya	3906	100.00%			

- d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian Untuk mencapai indikator kinerja verifikasi data koordinat site ISR *Microwave Link* dan Penyiaran, beberapa hal yang mempengaruhi antara lain:
 - a. Memiliki pegawai yang piawai dan sumber daya yang cukup untuk melakukan verifikasi data koordinat.
 - b. Menggunakan teknologi dan perangkat yang memadai untuk memperoleh dan memvalidasi data koordinat dengan akurat dan akurat dalam melaukan tugas verifikasi data koordinat.
 - c. Melakukan verifikasi dengan menggunakan 2 metode yakni:
 - Desktop analysis, melakukan analisa dengan menggunakan Google Earth yang dapat menampilkan visual lokasi site untuk lokasi site. Analisis ini juga dilakukan dengan berkoordinasi dengan operator untuk menyediakan informasi terkait data Tower Provider.
 - Verifikasi data lapangan, UPT, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya melakukan pengukuran koordinat di lapangan terhadap lokasi site yang tidak terlihat / tidak terdeteksi pada saat dilakukan desktop analysis, dengan melampirkan data dukung yang memadai, berupa hasil pengukuran koordinat menggunakan perangkat GPS disertau foto geotaging.
- e. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya yang telah digunakan untuk perbaikan pada indikator tersebut

Data hasil verifikasi UPT telah dimanfaatkan oleh Direktorat Operasi Sumber Daya untuk dimasukkan ke dalam base data MDRS (*Master Data Reference Site*). Dengan penerapan referensi site pada pengurusan ISR telah ber*impact* pada adanya trend penurunan penolakan permohonan ISR dan meningkatnya akurasi data ISR dengan data parameter teknis di lapangan.

f. Target realisasi Jangka Menengah (2021-2024) Capaian kinerja Prima Aksi mulai dilaksanakan pada tahun 2023, dan realisasi terhadap target yang ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2023 sampai dengan 2024 tercapai dengan nilai 100%.

g. Efisiensi

Untuk mencapai efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi data koordinat situs ISR Microwave Link dan Penyiaran (QR Code Site), dilakukan beberapa cara berikut:

- a. Melakukan verifikasi data koordinat melalui software GIS (Geographic Information System), sehingga dapat mempercepat dan meningkatkan akurasi proses pengumpulan data koordinat.
- b. Memiliki tim yang dapat secara efektif dan piawai dalam menggunakan teknologi dalam kegiatan verifikasi, sehingga effisien secara waktu dan dapat tercapai target jumlah verifikasi data koordinat site.



c. Mengintegrasikan data dari sumber yang berbeda, seperti pemetaan GIS, data survey lapangan, database SIMS dan data perusahaan / operator seluler dapat membantu menghasilkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat tentang lokasi site.

h. Data Dukung dan Dokumentasi

Gambar 26. Dokumentasi Kegiatan Verifikasi Koordinat Site Bersamaan Dengan Kegiatan Inspeksi MW Link Seluler



Loket Pelayanan

a. Latar Belakang, Maksud, Tujuan

Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya memiliki peran penting dalam proses layanan kepada pengguna frekuensi radio. Loket pelayanan di kantor Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya akan menjadi pusat informasi, memfasilitasi interaksi antara pengguna frekuensi radio dan instansi, serta berupaya memudahkan proses layanan bagi pengguna frekuensi dalam penggunaan *e-licensing* ISR.

Dalam mewujudkan hal tersebut, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya melaksanakan kegiatan loket pelayanan berupa:

 Penyusunan SOP pelayanan kepada pengguna frekuensi radio yang datang ke kantor.

- 2. Konsultasi dan asistensi dalam penggunaan elicensing ISR.
- 3. Pengambilan Sertifikat Operator Radio Umum (ORU)
- 4. Mencatat /dokumentasi kegiatan di loket pelayanan.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan loket pelayanan di kantor Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya adalah menyediakan informasi terkait regulasi dan kebijakan Spektrum Frekuensi Radio serta pemanfaatan dan pengelolaan frekuensi radio bagi pengguna frekuensi atau calon pengguna frekuensi radio yang datang ke Kantor.

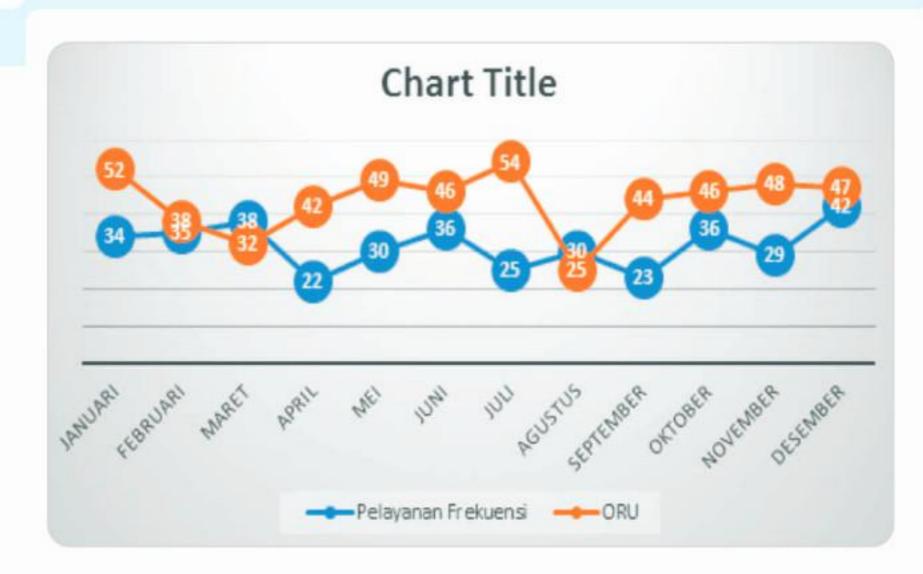
c. Capaian Target Pelayanan Loket Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya melayani 95% tamu yang ke loket pelayanan.

Tabel 34. Pelayanan kepada pengguna frekuensi radio

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Target 2023	Realisasi	Persentase
Meningkatnya Layanan Monitoring, Pengukuran, Inspeksi, Penertiban serta Pelayanan Publik Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	Pelayan kepada pengguna frekuensi radio	95%	95%	100%

Berikut ditampilkan data tamu di loket Pelayanan Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya di tahun 2024:

Grafik 28. Jumlah tamu di loket pelayanan



d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian Realisasi kegiatan untuk mendukung Loket pelayanan Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya tahun 2024 konsultasi tentang Ijin Stasiun Radio dengan memanfaatkan sosial media melalui WhatsApp dan Instagram. e. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya

Pada tahun 2024, Loket Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya sudah melayani pengguna frekuensi radio untuk konsultasi perijinan Ijin Stasiun Radio, serta asistensi ORU secara luring dan daring ada di OSS maupun di *e-licensing* ISR dan Serifikat ORU.

f. Efisiensi

Realisasi kegiatan loket pelayanan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya didukung oleh informasi proses perizinan melalui https://pelayananDJID.postel.go.id/ dan web perizinan secara e-licensing melalui https://isr.postel.go.id. Semakin meningkatnya efisiensi waktu dan biaya pelayanan dengan menggunakan e-licensing yang telah ada.

g. Data Dukung dan Dokumentasi

Gambar 27. Kegiatan Pelayanan di Loket Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya





Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya pada Sasaran Kinerja 2 memiliki 2 Indikator, yaitu Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital (IKPA) Tahun 2024 dan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Tahun 2024. Penjelasan detail capaiannya akan disampaikan sebagai berikut:

IK.2.1 Nilai Kinerja Anggaran Ditjen Infrastruktur Digital (IKPA)

a. Latar Belakang, Maksud, Tujuan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen yang penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, penilaian terhadap penggunaan anggaran sangat penting dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan pencapaian program pemerintah, serta mengidentifikasi hambatan dalam proses pelaksanaannya. Penilaian ini memberikan gambaran mengenai sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan digunakan dengan tepat guna, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan di masa mendatang.

Adapun maksud dari pengukuran nilai kinerja anggaran untuk memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan baik eksternal maupun internal terhadap penggunaan anggaran sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Penilaian kinerja anggaran juga bertujuan untuk menilai efektivitas penggunaan anggaran yaitu mengukur hasil yang tercapai dengan yang sudah direncanakan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran, bahan evaluasi untuk perbaikan di masa depan, serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (dengan mengetahui dampak dari keputusan yang diambil).

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran dalam menentukan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) terbagi dalam dua bagian yaitu nilai kinerja perencanaan anggaran dan nilai kinerja pelaksanaan anggaran. Adapun kriteria penilaian kinerja perencanaan anggaran dipengaruhi oleh Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA. Sedangkan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran terbagi kedalam aspek kualitas pelaksanaan anggaran (penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan adanya dispensasi SPM menjadi faktor pengurang) serta aspek kualitas hasil

pelaksanaan anggaran (capaian output). Adapun bobot masingmasing indikator output adalah sebagai berikut:

1. Aspek Kualitas Perencanaan Anggaran terdiri dari:

- o Revisi DIPA Indikator (bobot 10 %), berdasarkan rata-rata rasio Revisi DIPA Triwulanan. Frekuensi Revisi untuk nilai IKPA optimal adalah 1 kali dalam satu Triwulan (tidak kumulatif)
- o Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15 %) dihitung dengan cara membandingkan realisasi anggaran dengan rencana anggaran. Untuk mendapatkan nilai maksimal maka deviasi bulanan tidak lebih dari 5 persen.

Tabel 35. Deviasi Bulanan Perjenis Belanja Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya Tahun 2024

		% Deviasi		
Bulan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	% Deviasi seluruh jumlah belanja
B01	0	6	0	3,98
B02	5,69	3,97	0	3,86
B03	95,61	35,04	49,14	5,94
B04	3,27	19,84	0,12	13,88
B05	5,95	0,04	0,5	1,37
B06	1,78	20,27	21,8	16,47
B07	1,08	20,29	О	12,9
B08	1,76	13,26	100	25,96
B09	1,03	11,94	100	24,99
B10	0,69	16,37	0	10,43
B11	0,58	47,38	2,21	0,11
B12	0,58	47,38	2,21	0,11

2. Aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang ditetapkan dalam DIPA. Aspek ini terdiri dari:

• Penyerapan Anggaran (bobot 20 %)

Indikator ini dihitung berdasarkan rata-rata NKPA (Nilai Kinerja Penyerapan Anggaran) yang dihitung berdasarkan rasio antara tingkat penyerapan anggaran terhadap target penyerpan setiap Triwulan. Persentase nilai target penyerapan terhadap Pagu anggaran untuk setiap jenis belanja per triwulan menurut skenario ideal adalah sebagai berikut:

Tabel 36. Penyerapan Anggaran

Jenis belanja	Target Triwulanan					
Jenis Delanja	TWI	TW II	TW III	TW IV		
Blj Pegawai	20%	50%	75%	95%		
Blj Barang	15%	50%	70%	90%		
Blj Modal	10%	40%	70%	90%		
Blj Bansos	25%	50%	75%	95%		

Jumlah penyerapan anggaran Balai Monitor Kelas I Surabaya tahun 2024 sebesar Rp 27.926.110.855 dengan rincian belanja pegawai Rp 5.454.171.382, belanja barang Rp 16.962.454.351, dan belanja modal Rp 5.509.485.122 dengan nilai dari indikator penyerapan anggaran adalah 92.85.

Belanja Kontraktual (bobot 10%)

Indikator ini dihitung berdasarkan nilai Kepatuhan dan Akselerasi:

- a. Kepatuhan adalah ketepatan waktu penyampaian kontrak dalam 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak
- b. Akselerasi: (1) Kontrak pra DIPA (2) Kontrak belanja 53 dengan nilai 50.000.000 s.d 200.000.000 yang diselesaikan di TW I

Adapun bobot masing-masing indeks komposit belanja kontraktual sebagai berikut:

Tabel 37. Indeks Komposit Belanja Kontraktual

No	Komponen	Indeks komposit
1	Kepatuhan	40%
2	Akselerasi Pra DIPA	30%
3	Akselerasi Belanja 53	30%

Penyelesaian Tagihan (bobot 10)

Indikator ini dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan untuk SPM LS kontraktual terhadap seluruh SPM LS Kontraktual yang diajukan ke KPPN. Penyampaian LS Kontraktual tepat waktu adalah paling lambat 17 hari kerja dari tanggal BAST atau BAPP sampai dengan tanggal SPM LS kontraktual diterima oleh KPPN pada saat proses konversi.

Tabel 38. Laporan Indikator Kinerja Penyelesaian Tagihan Balai Monitor Kelas I Surabaya Tahun 2024

Periode	Tepat Waktu (akumulatif)	Terlambat (akumulatif)	Total (akumulatif)	Persen
01	0	0	0	0.00
02	1	0	1	100.00
03	5	0	5	100.00
04	13	0	13	100.00
05	18	0	18	100.00
06	24	0	24	100.00
07	27	0	27	100.00
08	29	Û	29	100.00
09	32	0	32	100.00
10	34	0	34	100.00
11	37	0	37	100.00
12	49	0	49	100.00

Pengelolaan Uang Persediaan / UP dan Tambahan Uang Persediaan/TUP (bobot 10%)

Parameter ini mengukur ketepatan waktu pertanggungjawaban revolving UP dan pertanggungjawaban TUP serta efisiensi besaran UP dan TUP yang dikelola, yaitu ketepatan waktu 50% persentase GUP 25% setoran TUP 25%.

Tabel 39. Indikator UP dan TUP Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya Tahun 2024

Periode	Nilai komponen UP (Persen)
B01	100
B02	99.03
B03	99.52
B04	97.47
B05	95.89
B06	95.72
B07	96.25
B08	90.66
B09	92.03
B10	92.65
B11	92.78
B12	93.48

3. Aspek Hasil Pelaksanaan Anggaran

Indikator pengukurannya adalah capaian output (bobot 25%) yaitu mengukur perkembangan output belanja apakah sudah berjalan dengan baik dan tepat sasaran

Tabel 40. Indikator Capaian Output Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya Tahun 2024

Bulan	Jumlah Output	Total Nilai Capaian RO	Nilai Capaian RO	Nilai Ketepatan	Nilai Akhir
01	10	791.97	79.20	100.00	85.44
02	10	799.81	79.98	100.00	85.99
03	10	896.67	89.67	100.00	92.77
04	10	815.60	81.56	100.00	87.09
05	10	906.90	90.69	100.00	93.48
06	10	909.90	90.99	100.00	93.69
07	10	869.93	86.99	100.00	90.89
80	10	867.83	86.78	100.00	90.75
09	10	874.95	87.50	100.00	91.25
10	10	891.02	89.10	100.00	92.37
11	10	915.98	91.60	100.00	94.12
12	10	1,000.00	100.00	100.00	100.00

c. Capaian Target

Performa Balai Monitor Kelas I Surabaya tahun 2024 dari sisi anggaran secara garis besar adalah baik, hal ini dapat dilihat dari Nilai Kinerja Anggaran yang lebih tinggi daripada target yang telah ditentukan. Target NKA 2024 berdasarkan perjanjian kinerja adalah 90 sedangkan realisasi NKA 2024 92.76, mengalami kenaikan 2,5 dari NKA tahun 2023 (90,26).

Tabel 41. NKA Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya 2024

No. 1	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Milai Kinerja Anggaram
1	613413	RALAN WONITOR SPEKERUM FREKUENSI RADIO KELAS I SURARAYA	89,79	95,73	92,76

d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian Kinerja Balai Monitor Kelas I Surabaya tahun 2024 menunjukkan hasil yang baik dengan NKA 92,76 dan IKPA 95,73. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk perbaikan di beberapa area, seperti kualitas perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran yang belum optimal.

Tabel 42. Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Monitor Kelas I Surabaya Tahun 2024

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Samerai Dengan : DESEMBER

	Koda Koda Koda	Kualitas Pelaki	elaksanaan Anggaran		Kualitas Hasil Palaksanaan Anggaran	Nlai	a Konversi	Dispensasi	Nilai Akhir (Nilai							
No	KPPN	BA	Salker	Ura an Satker	Kererangan	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capalan Output	Total	al Rebot	SPM (Pengurang)	Total Konversi Boboti
				BALAI	Na	100.00	89.10	92 85	9450	100.00	F3.48	100,00				
	100	AFA	040240	MONITOR	Babal	10	15	20	10	10	10	25	05.70	1000	0.70	05.75
	135	059	613413	FREKUENSI RADIO	Nia Akhir	10.00	13.37	18.57	9.45	10.00	9.35	25.00	95.73	100%	0.00	95.73
				KELAS I SURABAYA	Niai Aspek	9	1.55		9	5.21		100.00	1			

Berdasarkan gambar di atas, indikator kualitas perencanaan anggaran dan kualitas pelaksanaan anggaran masih perlu ditingkatkan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kualitas Perencanaan Anggaran
 Terdapat gap 1,63 pada Deviasi Halaman III
 DIPA, hal ini dikarenakan adanya anggaran yang
 telah disusun namun tidak terealisasi optimal di
 akhir tahun anggaran yaitu pada bulan
 Desember 2024 terdapat deviasi sebesar
 47,38% di belanja barang.
- Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pada penyerapan anggaran terdapat gap 1,43. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang tidak terealisasi selama tahun 2024. Realisasi Balai Monitor Kelas I Surabaya Tahun 2024 adalah 96,63% sebesar Rp 27.926.110.855 dari total pagu Rp 28.898.113.000. Termasuk adanya efisiensi sebesar Rp 150.399.000 pada belanja barang di tahun 2024. Adanya penumpukan kegiatan yang dilaksanakan di akhir tahun juga mempengaruhi kurang optimalnya realisasi anggaran tahun 2024, sampai dengan akhir triwulan III tahun 2024 realisasi Balai Monitor Kelas I Surabaya masih berada di 70,25%. Pada indikator belanja kontraktual terdapat gap 0,55 yaitu sebesar 18,57 di bulan Desember 2024. Yaitu ada 6 kontrak yang mengalami addendum yaitu 5 kontrak penambahan waktu dan 1 kontrak penambahan nilai dan waktu kontrak.

Pada Indikator Pengelolaan UP dan TUP belum mencapai optimal 100, hal ini dikarenakan pada bulan Agustus 2024 terdapat keterlambatan revolving GUP RM yang diakibatkan oleh adanya revisi anggaran RM yang berubah ke PNP sehingga proses pengajuan GUP RM terhambat karena belum mencapai 50% dari jumlah UP RM, namun permasalahan ini telah terselesaikan yaitu dengan cara melakukan

pemotongan UP RM sehingga proses revolving UP RM pada bulan berikutnya dapat berjalan dengan lancar.

e. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya

Informasi yang terdapat dalam Laporan Kinerja tahun 2023 sebagai dasar evaluasi untuk melakukan perbaikan pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran tahun 2024, diantaranya melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik, pelaksanaan anggaran yang lebih efektif dan transparan serta program peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan baik daring ataupun luring yang wajib diikuti oleh seluruh pegawai Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya.

f. Target dan realisasi Jangka Menengah (2020-2024) **Target Jangka Menengah**

Dalam upaya pencapaian tujuan jangka menengah, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya telah berkomitmen untuk terus melakukan pembenahan kualitas perencanaan anggaran dengan deviasi yang lebih kecil dari 5% pada setiap bulan dan pengelolaan belanja kontraktual yang lebih efisien.

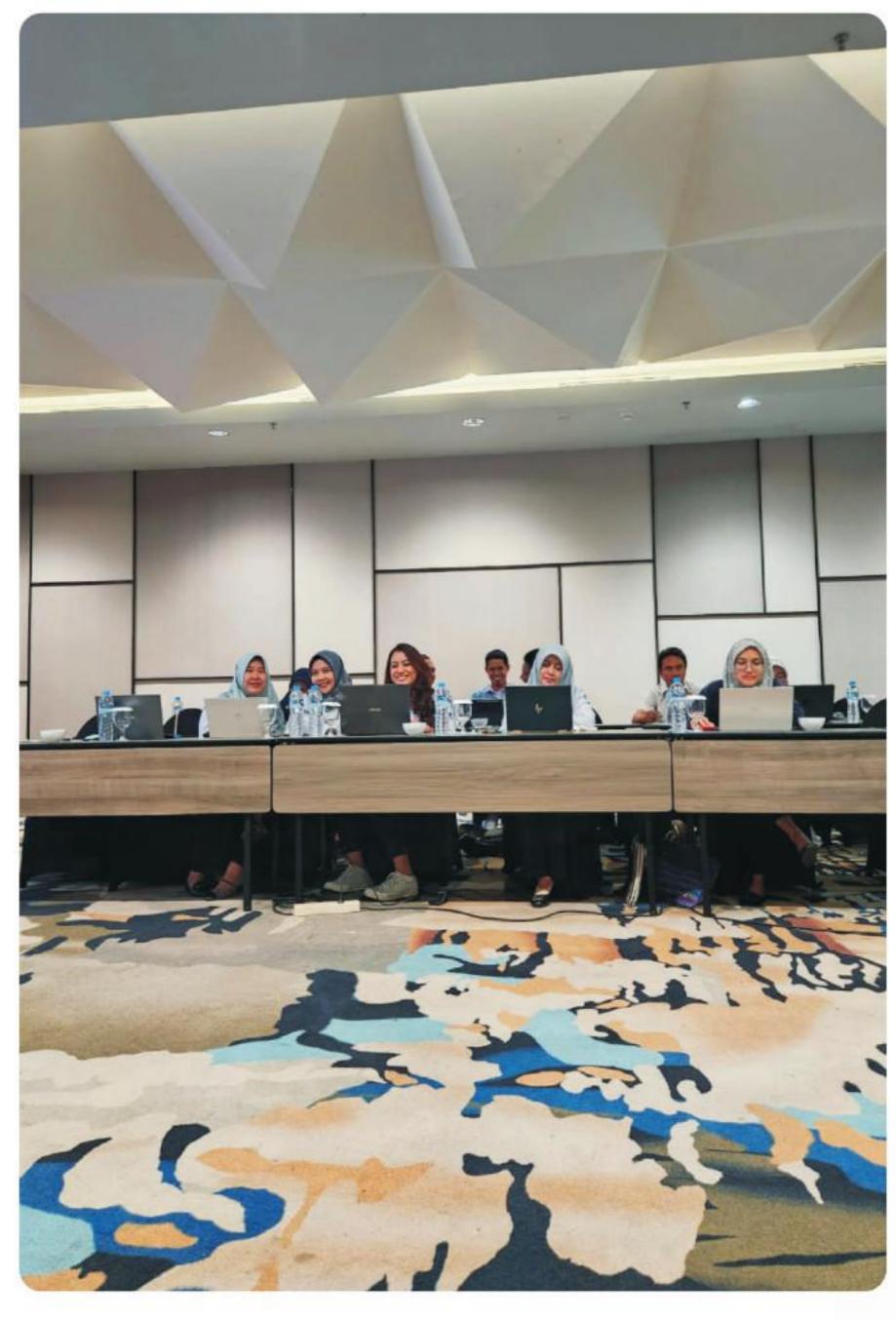
Realisasi Jangka Menengah

Sebagai tindak lanjut dari target jangka menengah yang telah ditetapkan, realisasi anggaran untuk tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Dengan capaian NKA 92.76, Balai Monitor Kelas I Surabaya berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan anggaran, khususnya dalam mempercepat proses pengadaan barang dan jasa, meningkatkan ketepatan waktu dalam pengelolaan UP dan TUP, serta memperkuat pelatihan dan pengembangan kapasitas pegawai untuk memperbaiki pengelolaan anggaran ke depan.

- g. Efisiensi
 - Pada tahun 2024, terdapat sejumlah upaya yang dilakukan untuk mencapainya, antara lain: optimalisasi pengelolaan belanja barang dan modal, pengurangan belanja yang tidak prioritas, dan pengelolaan UP dan TUP yang efisien
- h. Data Dukung dan Dokumentasi

Gambar 28. Pelaksanaan Kegiatan Terkait Pengelolaan Anggaran Tahun 2024





IK.2.2 Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2024

 a. Latar Belakang, Maksud, Tujuan
 Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, pemerintah perlu membuat

Laporan keuangan berbasis akrual. Di sisi lain, semakin besarnya sumber daya keuangan yang dikelola melalui APBN ditambah semakin kompleksnya pula transaksi keuangan pemerintah, akan membuka potensi resiko penurunan kualitas pengelolaan keuangan negara, sebagaimana tercermin salah satunya melalui status opini BPK yang dicapai. Upaya Kemkomdigi untuk mencapai opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tetap menjadi focus utama dari tahun ke tahun. Untuk itu dalam Perjanjian Kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya tahun 2024, ditetapkan indikator target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran Tahun 2023 sebesar 100, guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah melalui penguatan pemahaman akan pentingnya keandalan informasi laporan keuangan berbasis akrual sebagai dasar pengambilan keputusan, penyamaan persepsi untuk menyempurnakan manajemen keuangan negara dan akuntansi berbasis akrual, serta menjaga semangat, komitmen serta dukungan para pimpinan Kementerian Komunikasi dan Informatika khususnya UPT Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya agar tetap konsisten dan berkelanjutan.

b. Sasaran Kegiatan

Sasaran pencapaian target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran berupa Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan Balmon SFR kelas I Surabaya merupakan bahan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang akan dikonsolidasikan menjadi LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat) yang disusun dengan berdasarkan praktik terbaik internasional (best practice) dalam pengelolaan keuangan Negara.

c. Capaian Target

Pada Tahun 2024 target Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran tahun 2023 sebesar 100, di akhir tahun 2024 Balmon Surabaya berhasil mencatatkan Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 100, melebihi target yang telah ditetapkan.

Tabel 43. Hasil Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja

Hasil Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja atas Laporan Keuangan Tahun 2023 Kementerian Komunikasi dan Informatika

No	Indikator Penilaian Laporan Keuangan Satuan		Metode Per	nilaian	•	
	Kerja					UPT
	(1)					
		Bobot	Faktor Pengurang		lai urang	Balmon Kelas I Surabaya
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3) (5) = (4)		100
1	Jumlah transaksi koreksi audit	50%		(3) - (4)	X 100	
	1) Jumlah transaksi koreksi audit 0 s.d. 5		0%	0%	0	0
	2) Jumlah transaksi koreksi audit 6 s.d. 10		-5%	-3%	-2,5	
	3) Jumlah transaksi koreksi audit 11 s.d. 15		-15%	-8%	-7,5	
	4) Jumlah transaksi koreksi audit 16 s.d. 20		-30%	-15%	-15	
	5) Jumlah transaksi koreksi audit lebih dari 20		-50%	-25%	-25	
2	Kesalahan penganggaran berdasarkan LHP BPK	20%				
	1) Kesalahan akun Rp 0 – Rp 150jt		0%	0%	0	0
	2) Kesalahan akun di atas Rp 150jt –Rp 300jt		-5%	-1%	-1	
	3) Kesalahan akun di atas Rp 300jt – Rp 600jt		-15%	-3%	-3	
	4) Kesalahan akun di atas Rp 600jt – Rp1,2Miliar		-30%	-6%	-6	
	5) Kesalahan akun lebih dari Rp 1,2Miliar		-50%	-10%	-10	
3	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan akhir tahun	10%				
	1) Tidak terdapat saldo kas		0%	0%	0	0
	2) Terdapat saldo kas		-100%	-10%	-10	
	Katanatan Waktu Danyamnaian Lanavan	E0/				
4	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%				
	1) Sesuai/ sebelum tanggal yang ditetapkan		0%	0%	0	0
	2) Melebihi tanggal yang ditetapkan		-100%	-5%	-5	
5	Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan	10%				
	Keuangan 1) Efektif		0%	0%	0	0
	2) Efektif dengan Pengecualian		-30%	-3%	-3	
	Mengandung Kelemahan Material		-70%	-7%	-7	
6	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ke Entitas Pelaporan	5%				
			00/	00/	0	
	 Sesuai/ sebelum tanggal yang ditetapkan Melebihi tanggal yang ditetapkan 		0% -100%	0% -5%	0 -5	0
	Nille Lebin					
	Nilai akhir					100

- d. Inovasi/Analisa Keberhasilan/Ketidaktercapaian Berikut beberapa strategi peningkatan kualitas laporan keuangan yang telah dilakukan dalam rangka mencapai target opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2024:
 - Melakukan telaah LK mulai dari tingkat Satker,
 Wilayah, Eselon I, hingga K/L
 - Memastikan saldo kas di Bendahara Pengeluaran sama dengan LPJ Bendahara dan Aplikasi SAKTI
 - Memastikan saldo persediaan adalah nilai hasil inventarisasi fisik per 31 Desember 2024
 - Menatausahakan dan mendigitalisasi seluruh dokumen sumber transaksi termasuk Memo Penyesuaian
 - Memanfaatkan menu Rekonsiliasi Monsakti (to do list) pada Aplikasi SAKTI untuk monitoring dan evaluasi atas kepatuhan, kelengkapan, serta validitas data LK
 - Menerapkan PIPK pada setiap jenjang pelaporan keuangan sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu PIPK Pemerintah Pusat
 - Mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta berkoordinasi secara intensif dengan bagian/pic Keuangan SDPPI dalam menjaga keandalan penyajian dan kualitas LKKL.
 - Meningkatkan kompetensi operator/ PIC Laporan Keuangan (GLP) melalui berbagai macam diklat/seminar/sosialisasi.
- e. Tindak lanjut/pemanfaatan laporan kinerja sebelumnya
 - Laporan Kinerja tahun 2024 mendapatkan opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). Oleh karena itu kami berupaya agar LK di tahun 2024 mencapai opini WTP dengan cara meningkatkan kualitas pelaporan keuangan secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan. Salah satu upaya yang laksanakan adalah:
 - Meningkatkan monitoring realisasi anggaran
 - Melaksanakan evaluasi pelaksanaan anggaran setiap triwulan agar ketepatan RPD (Rencana Penarikan Dana) dan realisasi anggaran semakin selaras.
 - Ketepatan waktu penyampaian data kontrak dioptimalkan agar nilai IKPA juga meningkat.

- Melakukan revolving GUP minimal 1x setiap bulannya tidak melebihi batas waktu
- Melakukan penutupan periode secara permanen modul persediaan, modul aset, modul GLP secara tepat waktu
- Rekonsiliasi secara tepat waktu. Menyelesaikan To do list bulanan + triwulanan + tahunan, Tutup permanen GLP, sehingga terbit Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)
- f. Target realisasi Jangka Menengah (2020-2024)
 Target realisasi Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan
 Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran tahun
 2024 diupayakan sama dengan tahun 2023 yaitu
 100.

Dengan bobot penilaian optimal tercapai sebagai berikut:

- Jumlah transaksi koreksi audit mencapai bobot optimal sebesar 50%
- Kesalahan penganggaran berdasarkan LHP BPK mencapai bobot optimal sebesar 20%
- Saldo kas di bendahara pengeluaran akhir tahun mencapai bobot optimal sebesar 10%
- Ketepatan waktu penyampaian LK ke entitas pelaporan mencapai bobot optimal sebesar 5%
- Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan mencapai bobot optimal sebesar 10%
- Ketepatan waktu penyampaian Laporan Hasil Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan ke entitas Pelaporan mencapai bobot optimal sebesar 5%

g. Efisiensi

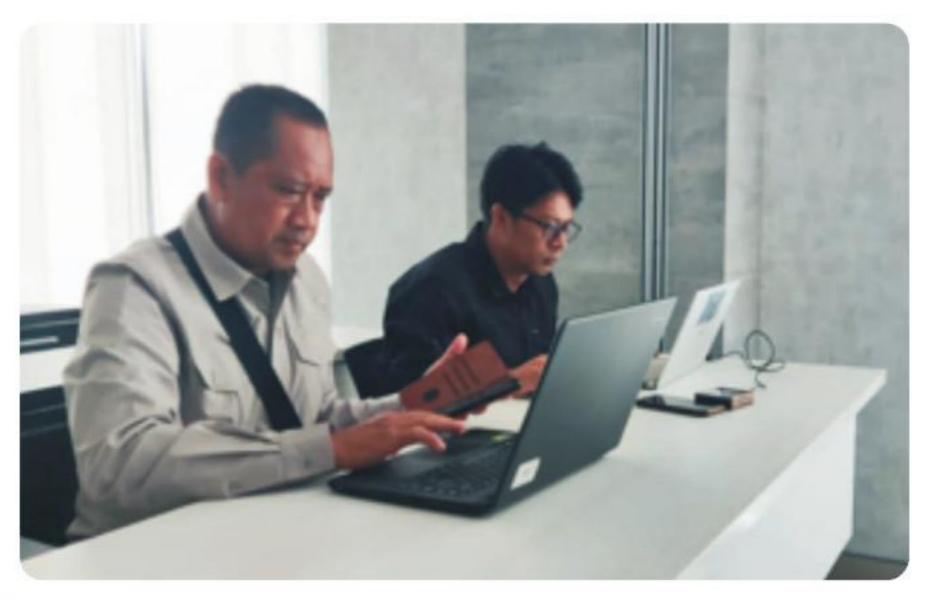
Penyusunan Laporan Keuangan Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya mampu melebihi target yang diharapkan dengan tingkat deviasi/error rendah serta minim temuan. Namun demikian Kualitas dan efektifitas laporan keuangan pemerintah sangat dipengaruhi oleh faktor kepatuhan terhadap standar akuntansi, kapabilitas sumber daya manusia, serta dukungan sistem akuntansi yang ada, juga dipengaruhi oleh dinamika perubahan eksternal yang tidak dapat dikendalikan oleh organisasi.

h. Data Dukung dan Dokumentasi

Gambar 29. Kegiatan kegiatan penyusunan LK Semester II Unaudited TA 2024 yang dilaksanakan di Depok Jawa Barat









Tabel 44. SHR (Hasil Rekonsiliasi SAKTI -SPAN) sampai dengan periode 31 Desember 2024 dengan hasil yang bersih/ clear tanpa selisih.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANWIL PROVINSI JAWA TIMUR KPPN SURABAYA II

PADA SATKER 613413 SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-12

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	28,898,113,000	28,898,113,000	0
2	Belanja	27,928,456,855	27,928,456,855	0
3	Pengembalian Belanja	-3,457,591	-3,457,591	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	9,718,168	9,718,168	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 24-JAN-25

KEGIATAN PENTING LAINNYA

1. Peremajan Interior dan Meubelair Kantor Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya

Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif, nyaman, dan sesuai dengan perkembangan zaman, peremajaan interior serta meubelair kantor menjadi sebuah kebutuhan yang mendesak. Saat ini, kondisi ruang kerja yang ada masih menggunakan konsep lama dengan tata letak yang kurang fleksibel, furnitur yang sudah usang, serta keterbatasan ruang kolaborasi yang menghambat interaksi dan kreativitas tim.

Konsep Co working space diusulkan sebagai solusi untuk menciptakan suasana kerja yang lebih dinamis, kolaboratif, dan efisien. Dengan desain yang lebih terbuka, penggunaan ruang dapat dioptimalkan, komunikasi antarpegawai menjadi lebih lancar, serta tercipta lingkungan yang lebih modern dan ergonomis. Adapun ruang pelayanan

yang berada di lantai 1 juga di desain dengan konsep "one stop service" atau disebut ruang pelayanan terpadu dimana berbagai layanan dan fasilitas umum seperti Ruang laktasi, Ruang Bermain, Musholla dan Ruang Baca tersedia dalam satu tempat. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan kemudahan bagi masyarakat

Adapun manfaat utama dari peremajaan interior dan meubelair ini antara lain:

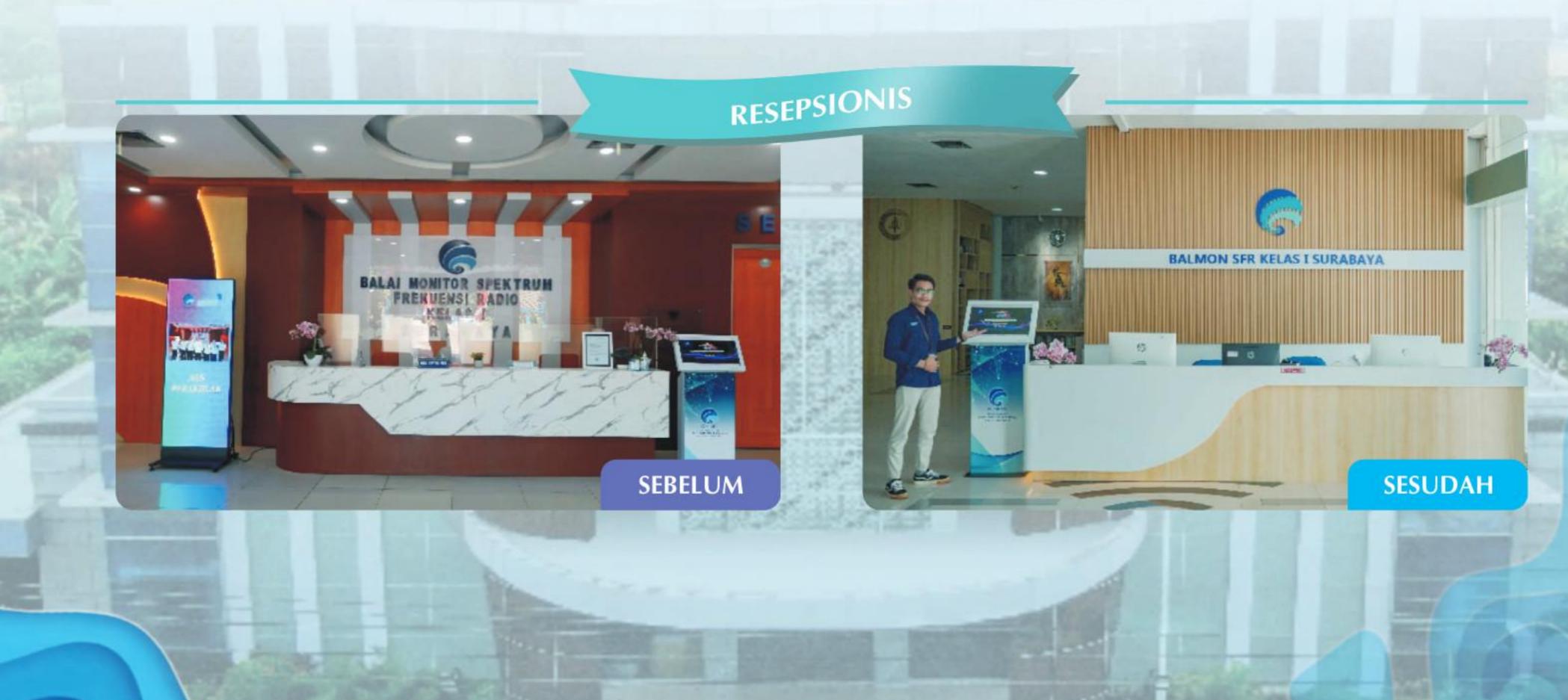
Meningkatkan produktivitas dan kreativitas melalui ruang kerja yang lebih terbuka dan interaktif.

- Meningkatkan efisiensi ruang dengan tata letak yang fleksibel dan modular.
- Meningkatkan kenyamanan dan fokus pegawai melalui penggunaan meubelair yang ergonomis dan sesuai standar.
- Menciptakan citra institusi yang lebih profesional dan modern, sejalan dengan transformasi digital dan tuntutan kerja masa kini.

LAKIN TAHUN 2024 - BALMON SFR KELAS I SURABAYA

Gambar 30. Peremajaan Interior Kantor Sebelum dan Sesudah





LOBBY / RUANG TUNGGU





MEJA PELAYANAN



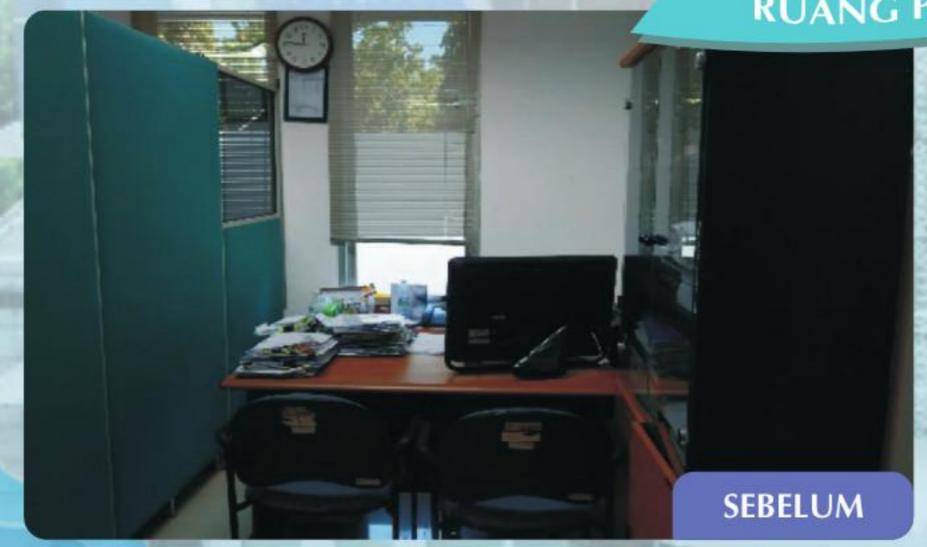


RUANG AUDITORIUM





RUANG PEMERIKSAAN





RUANG GMDSS - RUANG BERMAIN





RUANG KABALMON





RUANG KASUBAG UMUM





RUANG RAPAT BROMO





RUANG PERPUSTAKAAN



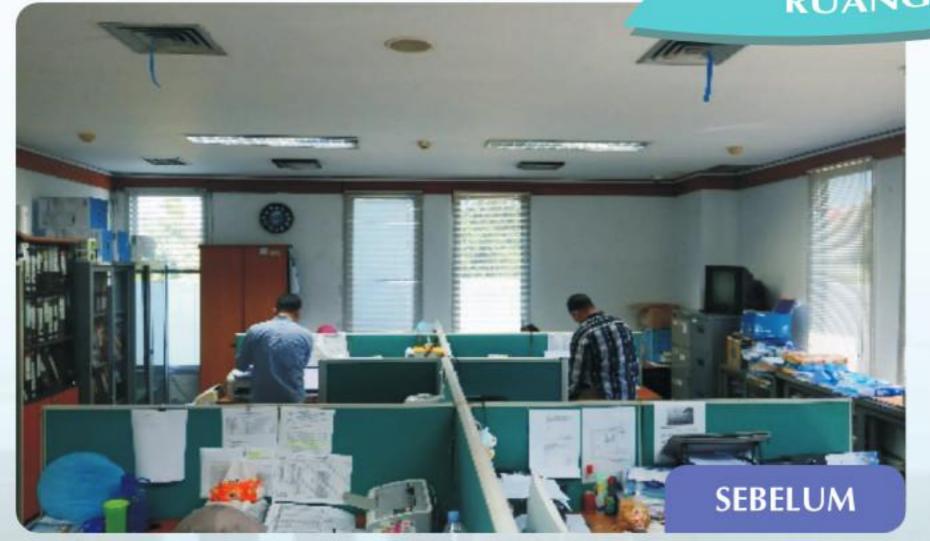


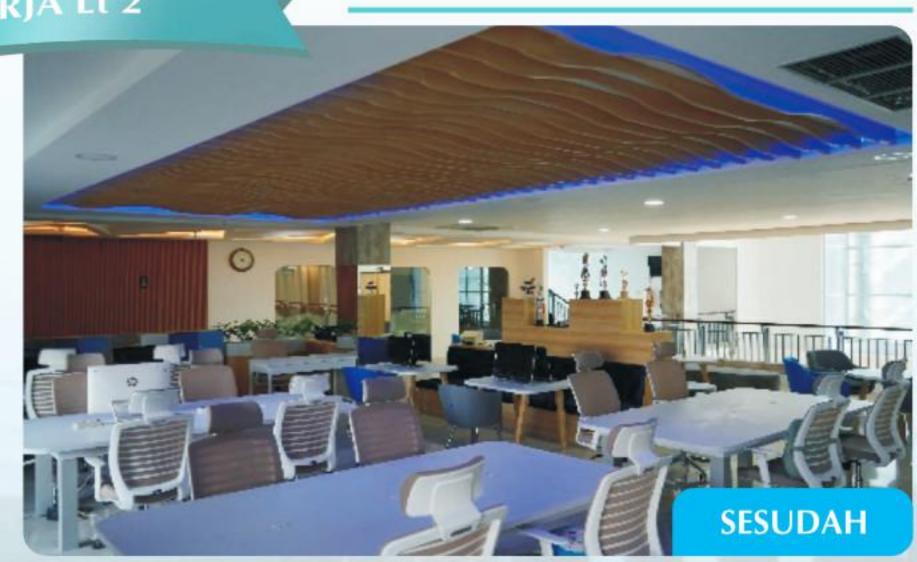
RUANG BENDAHARA





RUANG KERJA Lt 2



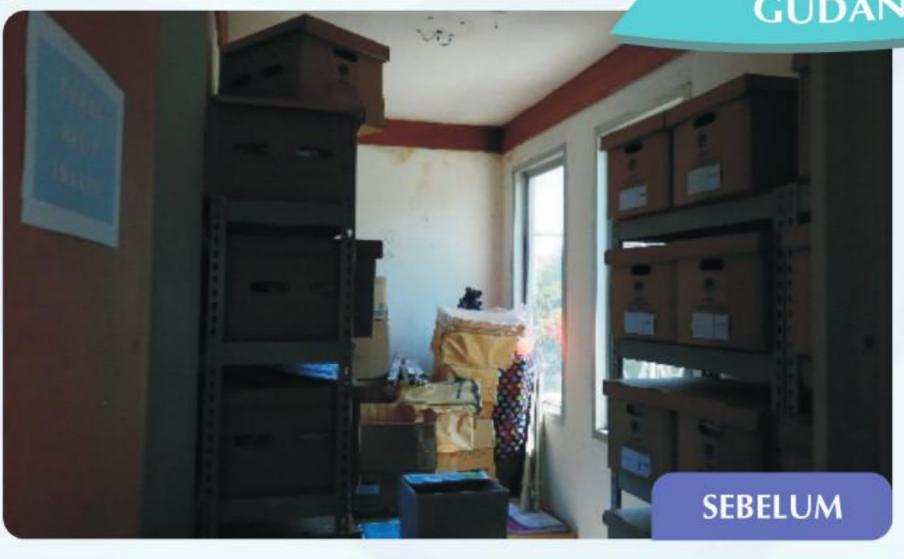


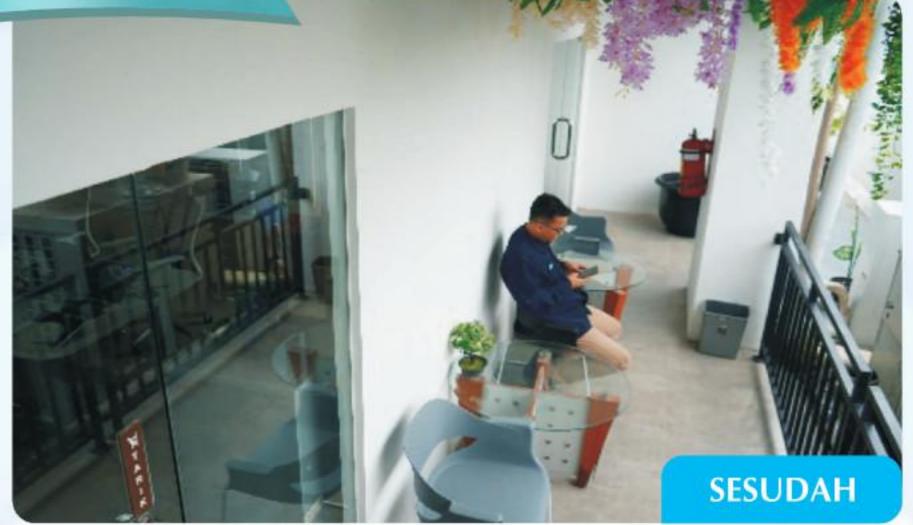
RUANG KERJA - RUANG TAMU Lt 2





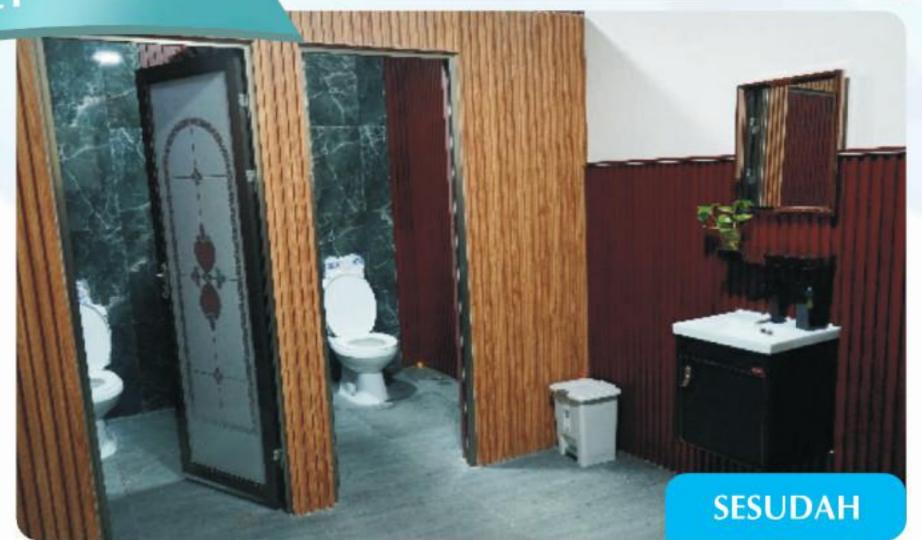
GUDANG - BALKON





TOILET





PANTRY





RUANG TAMU Lt 3







RUANG KERJA Lt 3

SEBELUM





RUANG KERJA Lt 3





RUANG RAPAT LAWU













2. Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur

Gambar 31. Kegiatan Pengamanan Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur





PENGAMANAN NATAL DAN TAHUN BARU DI JAWA TIMUR

Untuk memastikan arus Komunikasi tetap lancar pada periode Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, utamanya pada sektor Komunikasi transportasi, komunikasi keamanan dan telekomunikasi seluler maupun internet, Balmon SFR Kelas I surabaya melaksanakan kegialan Moniloring & Observasi Frekuensi Radio di beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Timur. Langkah ini bertujuan untuk menjaga kestabilan konektivitas, pada masa-masa padat kegiatan masyarakat event natal 2024 dan Tahun Baru 2025

PELAKSAHAAN

DESEMBER >>>



JANUARI

JUMLAH PERSONIL

FOKUS PENGAMANAN



Antisipasi dan penanganan gangguan, serta pengamanan selama perayaan natal dan pergantian lahun

LOKASI PENGAMANAN



AIRNAV

STASIUN KAI

BMKG

PELABUHAN

ORARI

TERMINAL



PELAKSANAAN



KOORDINASI



OBSERVASI DAN MONITORING SFR



POSKO BERSAMA

KABUPATEN DAN KOTA



SURABAYA SIDOARJO

MALANG

KEDIRI MOJOKERTO

MADIUN

"Selamat Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. semoga Perayaan Natal dan Tahun Baru membawa kedamaian, Kebahagiaan, dan berkah yang melimpah. Komunikasi Lancar, Nataru Damai"

Adi Nugroho Plt. Kepala Balai Monitor spektrum Frekuensi Radio Kelas i surabaya

3. Medical Check-up Th 2024

Balai Monitor SFR kelas I Surabaya telah melaksanakan kegiatan Medical Check Up pada hari Senin 26 Februari 2024. Kegiatan tersebut rutin di laksanakan setiap tahunnya untuk mengontrol dan memantau kondisi kesehatan para pegawai

sehingga akan terus siap sedia dalam melayani masyarakat.

Gambar 32. Pelaksanaan Medical Check-Up Tahun 2024



4. Sosialisasi dan Talk Show di Media TV dan Radio

Selain kegiatan sosialisasi secara langsung kepada para pengguna frekuensi radio Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya di Tahun 2024 juga melakukan sosialisasi melalui media massa dan media digital berupa televisi, radio siaran dan media sosial lainnya. Kegiatan dilakukan dengan harapan dapat menjangkau lapisan masyarakat yang lebih luas. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan antara lain:

a. Hukum di Tengah Kita: Penegakan Hukum di Bidang Telekomunikasi
Disiarkan langsung dari JTV pada tanggal 4 Juni 2024 pada rubrik Penegakan Hukum di Tengah Kita bertema Penegakan Hukum di Bidang Telekomunikasi, sosialisasi ini menghadirkan narasumber Kepala Balai dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya antara lain Bapak Agus Ashari, Ibu Dewi Rosiyana Umami dan Ibu Ifit Citraningtyas yang juga merupakan fungsional PFR Ahli Muda. Melalui acara ini diharapkan masyarakat lebih paham terkait Hukum dan Perundangundangan di Bidang Telekomunikasi.

Gambar 33. Hukum di Tengah Kita bersama JTV Tahun 2024



b. Cangkruk'an: Frekuensi Aman Komunikasi Nyaman

Rubrik Cangkruk'an melalui stasiun televisi JTV mengemas acara sosialisasi dengan suasana yang santai. Bertema Frekuensi Aman Komunikasi Nyaman adanya tanya jawab antara pembawa acara dan para narasumber diharapkan mampu menjangkau lebih luas lapisan masyarakat melalui dialog santai ala Jawa (cangkruk). Hadir sebagai narasumber antara lain KaBalai Monitor SFR Kelas I Surabaya, Ketua APJII Jatim, Manajer Fasilitas Teknik AirNav, dan PFR Terampil Penyelia (Adhi Cahyono) sosialisasi ini dilaksanakan pada 10 Juni 2024.

Gambar 34. Sosialisasi bersama JTV Tahun 2024



c. Dialog Khusus: Nelayan Yuk Kenalan dengan IKRAN

Masih bekerja sama dengan stasiun televisi JTV, melalui program Dialog Khusus pada 10 Juni 2024, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dengan narasumber KaBalai Monitor SFR Kelas I Surabaya, Bapak Sular, dan Tim Pemeliharaan dan Konsultasi Publik, Bapak Bambang Siswanto dan Pimpinan Lemdik Bharuna Bhakti Utama, Bapak Mey Prayoga menyampaikan pesan kepada para nelayan untuk mengenal lebih jauh tentang IKRAN (Ijin Komunikasi Radio Perikanan).

Gambar 35. Sosialisasi Peran Balmon Dalam Pengawasan Frekuensi Radio



d. Ruang Publik: Frekuensi Asik Ijin Sik Pada Senin, 10 Juni 2024, program sosialisasi bersama media patner dengan narasumber KaBalai Monitor SFR Kelas I Surabaya (Bapak Sular), Ketua KPID Jatim (Bapak Immanuel Yosua), dan Kepala Bidang Informasi dan komunikasi public Diskominfo Jawa Timur (Bapak Putut Darmawan) dan PFR Ahli Muda (Bapak Arya Satrya) dilaksanakan di TVRI tepatnya di Program Ruang Publik. Acara ini mengusung tentang pentingnya penggunaan frekuensi radio dan alat perangkat telekomunikasi yang berijin dan bersertifikasi. Selain disiarkan melalui media Televisi TVRI, acara ini juga disiarkan melalui live streaming Youtube milik TVRI.

Gambar 36. Sosialisasi dengan Tema Era Penyiaran Digital yang Aman dan Bersih



e. Frekuensi Aman Komunikasi Nyaman Masih mengusung Tema Frekuensi Aman Frekuensi Nyaman selain melalui media televisi JTV, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya juga bekerja sama dengan Suara Surabaya, acara sosialisasi ini ditayangkan secara live melalui kanal radio 100 FM Suara Surabaya dan juga kanal Youtube Suara Surabaya pada Jumat, 14 Juni 2024. KaBalai Monitor SFR Kelas I Surabaya, Bapak Supriadi, dan Pengendali Frekuensi radio Ahli Muda, Bapak Herdhias Mujiantoko dan Arya Satrya menjadi narasumber acara ini.

Gambar 37. Sosialisasi Peran Balmon Dalam Pengawasan Frekuensi Radio

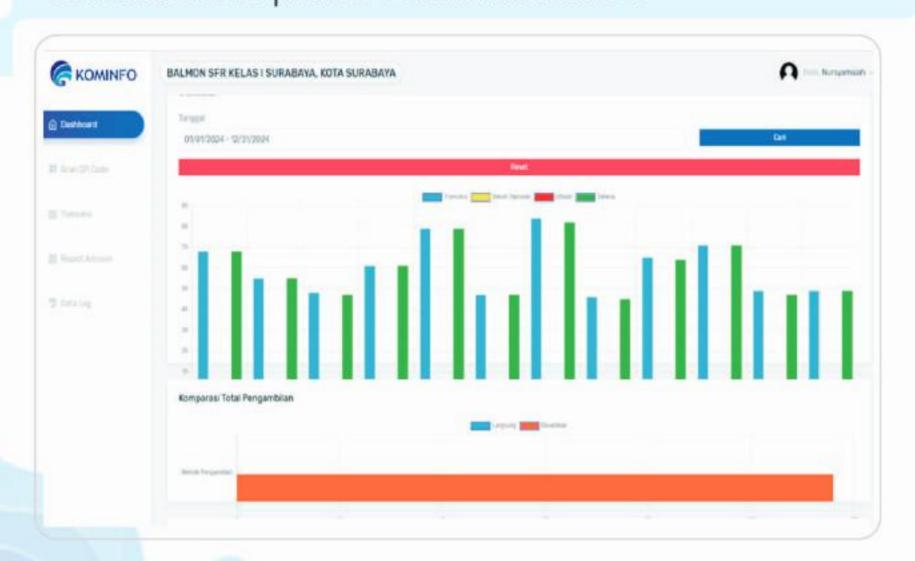


5. Ujian Negara REOR

Sertifikat Radio Elektronika dan Operator Radio Global (REOR) merupakan salah satu sertifikat yang wajib dimiliki oleh pelaut ataupun mualim yang akan mengoperasikan alat dan perangkat khusus maritim. Operator idealnya memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan di bidangnya untuk melakukan kegiatan operasional komunikasi radio pelayanan (maritime) di kapal atau stasiun pantai.

Direktorat Jendral DJID mengadakan ujian secara rutin untuk melakukan sertifikasi tersebut. Di wilayah Jawa Timur, pengujian sertifikasi bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Bharuna Bhakti Utama dan dibantu oleh Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dalam pengawasannya. Sepanjang tahun 2024, terdapat 707 sertifikat REOR yang telah diterbitkan, dengan pengambilan sertifikat secara langsung sejumlah 594 sertifikat dan diwakilkan sejumlah 113 sertifikat.

Grafik 29. Rekapitulasi Pelaksanaan REOR



Gambar 38. Pelaksanaan Kegiatan Ujian REOR 2024







6. Tindak Lanjut Hasil kegiatan Operasi Penertiban

Menindaklanjuti hasil kegiatan penertiban yang dilakukan sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan dan penggunaan spektrum frekuensi radio dan alat/perangkat telekomunikasi serta mencari solusi terhadap berbagai kendala / hambatan yang dihadapi selama kegiatan penertiban di wilayah Jawa Timur, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan tindak lanjut hasil operasi penertiban, dengan sasaran:

- Melakukan diskusi dan pembahasan kendala serta permasalahan dalam proses pelaksanaan kegiatan penertiban.
- Mendapatkan bahan saran dan masukan yang lebih rinci / akurat terhadap kegiatan penertiban yang ditangani

- 3. Menentukan tindak lanjut berikutnya yang akan dilakukan dengan melihat hasil operasi penertiban yang dilakukan di wilayah Jawa Timur
- 4. Sebagai wadah / forum koordinasi dan komunikasi hukum Kegiatan tindak lanjut hasil penertiban dilaksanakan sebanyak 5 kali dalam tahun 2024 terdiri dari 4 kegiatan tindak lanjut

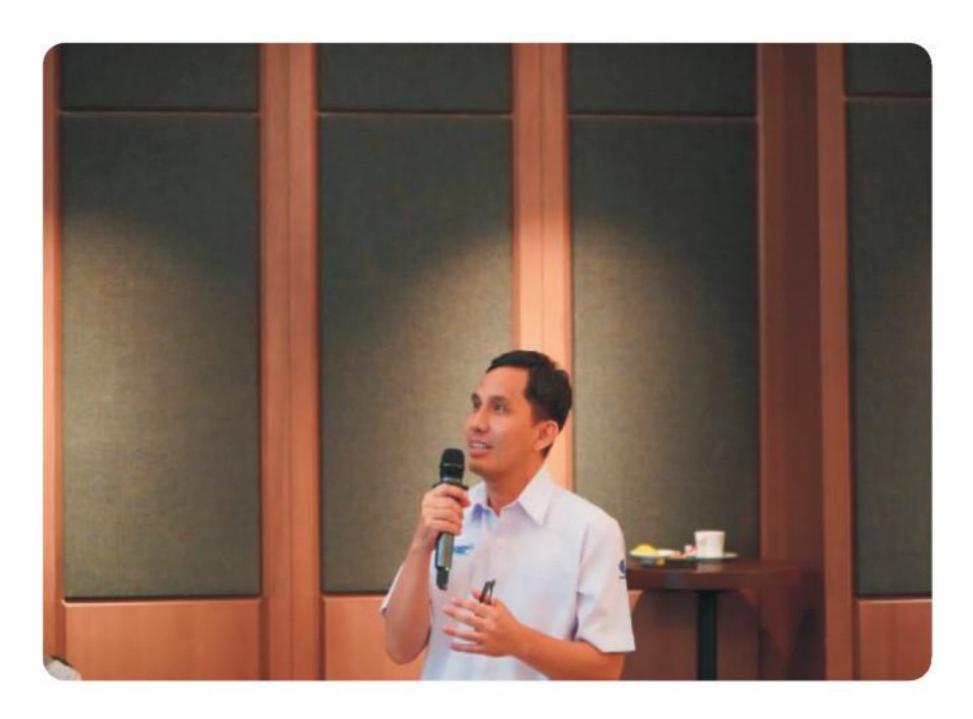
hasil penertiban dan 1 kali kegiatan pemusnahan alat/perangkat telekomunikasi hasil operasi penertiban periode tahun 2023 s.d 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang narasumber dari Korwas PPNS Polda Jatim.

Gambar 39. Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Penertiban













7. Upacara Bendera 17 Agustus 2024

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, UPT Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya menyelenggarakan Upacara Bendera pada tanggal 17 Agustus 2024 dengan tema "Nusantara Baru, Indonesia Maju". Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, meningkatkan rasa kebangsaan, serta mempererat solidaritas antar pegawai dalam menjalankan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara.

Upacara berlangsung dengan khidmat dan tertib, dilaksanakan oleh pegawai Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dengan menggunakan baju adat daerah masing-masing, serta diwarnai dengan momen istimewa berupa penyerahan simbolis penghargaan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai yang telah mengabdi dengan dedikasi tinggi. Penghargaan Satyalancana Karya Satya XX Tahun diberikan kepada Bapak Bambang Siswanto, Bapak Dedy Ratsetijawan, dan Ibu Umi Wakhyuni, sementara penghargaan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun diterima oleh Bapak Agus Ashari. Penghargaan ini

menjadi bentuk apresiasi atas loyalitas dan pengabdian mereka dalam mendukung tugas dan fungsi Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya. Bapak Sular (Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya) selaku Pembina Upacara menyampaikan amanat yang mencerminkan semangat transformasi digital dan pembangunan berkelanjutan di era modern, serta mengapresiasi dedikasi para pegawai yang telah mengabdi dengan penuh tanggung jawab. Sebagaimana disampaikan dalam amanat Menteri Komunikasi dan Informatika, "Dengan semangat Nusantara Baru, kita dorong percepatan transformasi digital dan inovasi teknologi demi mewujudkan Indonesia Maju yang lebih inklusif, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global."

Semoga peringatan kemerdekaan ini menjadi inspirasi bagi seluruh Pegawai Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan Bangsa dan Negara.

Gambar 40. Suasana Upacara Bendera Peringatan HUT RI Ke-79

















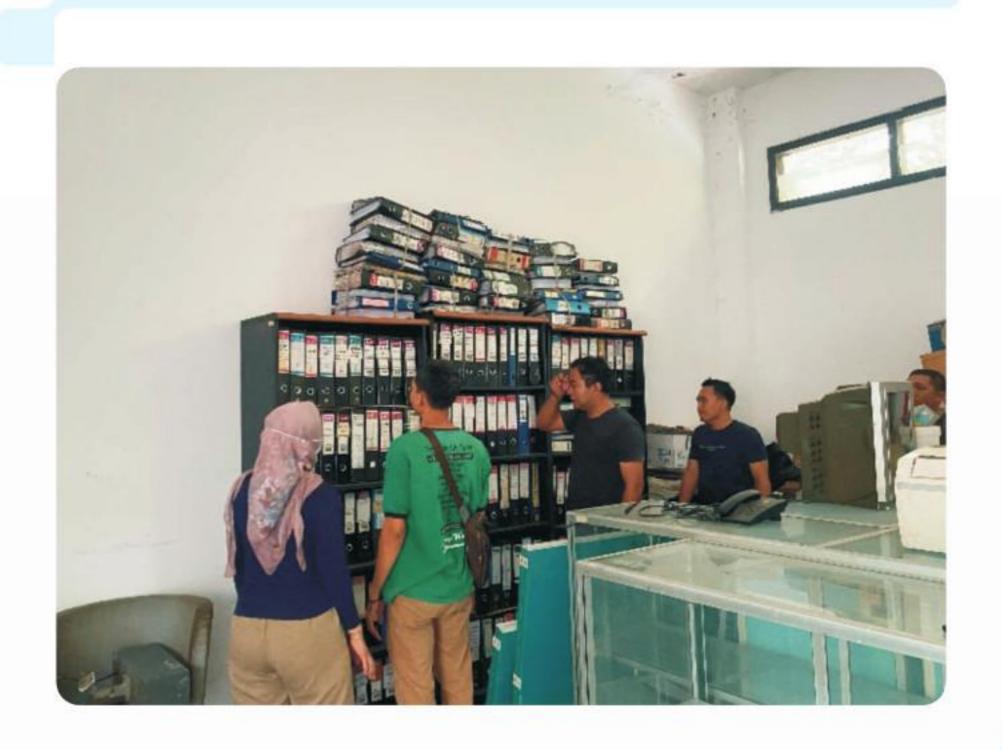
8. Pemusnahan Arsip

Pada tahun 2024, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya melaksanakan proses pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan arsip yang tidak diperlukan, melindungi informasi sensitif, dan mematuhi peraturan kearsipan yang berlaku. Sebelum pemusnahan, dilakukan peninjauan terhadap kondisi arsip, termasuk arsip di kantor Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya yang telah rusak dan layak untuk disusutkan atau dimusnahkan.

Pada Tahun 2024 Tim kami melaksanakan inventarisasi Arsip Inaktif dan proses pencatatan arsip inaktif periode tahun 2007 s/d 2017 yang akan diajukan kepada Sesditjen SDPPI untuk selanjutnya dinilai kembali.

Dalam pelaksanaannya, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya bekerja sama dengan pihak ketiga yang profesional dalam jasa pemusnahan dokumen. Pihak ketiga ini memastikan bahwa proses pencatatan arsip inaktid dilakukan dengan aman dan terstruktur sehingga informasi sensitif tidak jatuh ke tangan yang salah.

Gambar 41. Suasana Inventarisasi Arsip Inaktif







9. Peringatan Hari Bakti Postel 2024

Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya menggelar rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari Bakti Postel ke-79 pada tanggal 27 s.d 28 September 2024. Kegiatan diawali dengan upacara di Lapangan Balai Monitor, yang dihadiri oleh Komunitas Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postel Siar) Jawa Timur. Peringatan ini mengusung tema Nusantara Digital untuk Indonesia Maju sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan Angkatan Muda Pos Telegrap dan Telepon (AMPTT) dalam merebut kembali Jawatan Pos dan Telepon pada 27 September 1945.

Sebagai wujud kepedulian sosial, Komunitas Postel Jawa Timur mengadakan Bakti Sosial di Panti Asuhan Rif'atus Sholihah Surabaya, dan Panti Asuhan Muzdalifah Sidoarjo. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat solidaritas serta memberikan manfaat bagi anak-anak yang membutuhkan.

Selain itu, pada 28 September 2024, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya menyelenggarakan *Fun Walk* yang mencakup jalan santai, senam zumba, hiburan, serta pembagian doorprize. Kepala Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya, Bapak Sular, S.H., M.H., menyampaikan bahwa peringatan tahun ini

menjadi momentum optimalisasi Spektrum Frekuensi Radio guna mendukung kemajuan Indonesia.

Hari Bakti Postel yang diperingati setiap tanggal 27 September merupakan pengingat perjuangan dalam merebut kembali sektor Pos dan Telekomunikasi dari kekuasaan Jepang. Dengan semangat Nusantara Digital untuk Indonesia Maju, diharapkan Industri Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran semakin berkembang dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

Gambar 42. Peringatan Hari Bhakti Postel ke -79













10. Audit Eksternal ISO 9001:2015 Tahun 2024

Audit Eksternal ISO 9001:2015 kembali dilaksanakan pada 14 Oktober 2024 di Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya. Predikat yang didapatkan yaitu masih dinyatakan berhasil mempertahankan pengimplementasian standar sistem manajemen mutu dengan baik dapat terbukti dengan diterbitkannya dan telah diserahkannya sertifikat nomor 210889 oleh Global Group Indonesia yang berlaku sejak 18 Oktober 2022 s.d. 17 Oktober 2025 kepada KaBalai Monitor SFR Kelas I Surabaya.

Gambar 43. Situasi Audit Eksternal ISO 9001:2015 Tahun 2024





11. Evaluasi Capaian Kinerja

Peningkatan kualitas SDM merupakan salah satu fokus utama dalam pengembangan individu dan lingkungan kerja. Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya juga memiliki tanggungjawab besar dalam menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, terus berupaya mengoptimalkan proses dalam bekerja dan pengembangan potensi para pegawai. Dalam rangka memastikan tercapainya tujuan tersebut maka dilakukanlah kegiatan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan mengusung tema "Berubah Lebih Baik itu Mudah" yang dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Kegiatan ini berupa sharing session dari masing-masing Tim Kerja dan Subag Umum. Selain itu juga menjadi ajang berkumpul untuk memupuk kebersanaa, kekompokan dan sinergritas seluruh pegawai Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya.

Gambar 44. Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2024















82 LAKIN TAHUN 2024 - BALMON SFR KELAS I SURABAYA



12. Pemusnahan Alat/Perangkat Telekomunikasi Hasil Operasi Penertiban Periode 2023 s.d. 2024

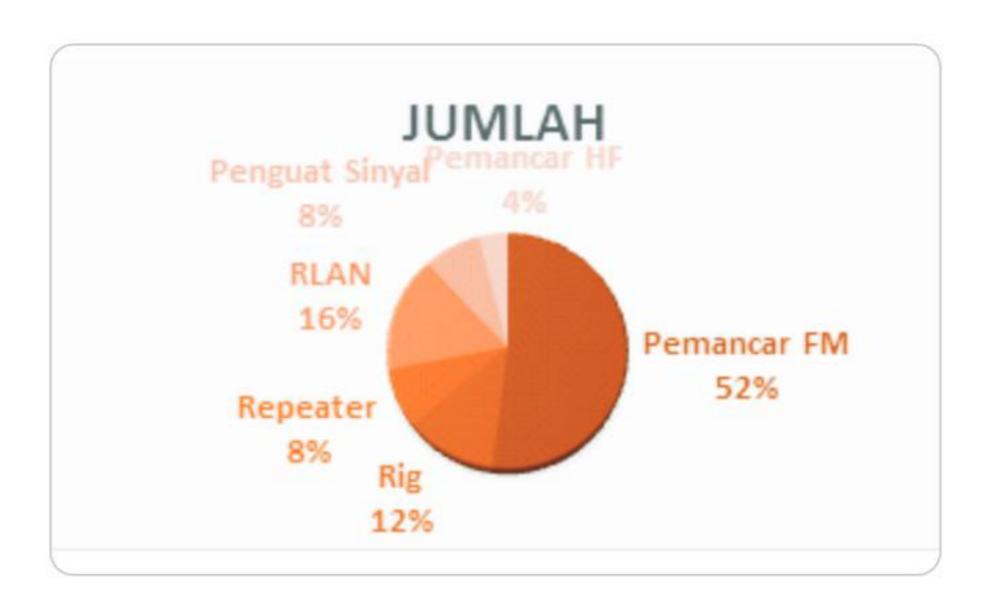
Pemusnahan Alat/Perangkat Telekomunikasi Hasil Operasi Penertiban Periode 2023 s.d 2024 di Surabaya dalam wilayah Kerja Jawa Timur tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2024.

Tujuan dari kegiatan pemusnahan kali ini adalah untuk mengurangi penumpukan barang telekomunikasi, karena kapasitas ruang penyimpanan yang terbatas dan barang-barang tersebut bersifat terlarang untuk diedarkan dan digunakan, juga karena tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak tersertifikasi. Hal ini juga bermaksud untuk memberi efek jera terhadap

pengguna frekuensi radio yang tidak memiliki Izin Stasiun Radio (ISR) agar tertib administrasi dan tertib hukum.

Alat/Perangkat Telekomunikasi Hasil Penertiban yang akan dimusnahkan selama periode tahun 2023 s.d 2024 adalah berjumlah 25 unit, dengan rincian sebagai berikut: pemancar radio FM 13 unit dan alat komunikasi radio Rig 3 unit, RPU 2 unit, Perangkat penguat sinyal 2 unit dan Perangkat RLAN 4 unit, perangkat pemancar HF 1 unit.

Gambar 45. Pemusnahan Alat/Perangkat Telekomunikasi Hasil Operasi Penertiban











BENCHMARKING SEBUAH STUDI BANDING ANTARA BALMON KLS I SURABAYA DAN BALMON KLS I YOGYAKARTA.

Dalam upaya mendorong peningkatan kualitas layanan dan kinerja kelembagaan, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Kelas I Surabaya mengadakan studi banding ke Balmon Kelas I Yogyakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk mencari terobosan dalam konsep "continuous improvement", mengingat kedua UPT ini memiliki tugas, fungsi, dan proses bisnis yang serupa dalam pengelolaan spektrum frekuensi radio.

Melalui studi banding ini, diharapkan terjadi pertukaran wawasan, pengalaman, serta praktik terbaik (best practices) dalam berbagai aspek, termasuk optimalisasi sumber daya, peningkatan efisiensi operasional, penerapan teknologi terbaru, hingga strategi dalam menghadapi tantangan regulasi dan dinamika spektrum frekuensi.

Selain itu, diskusi mendalam dan sesi benchmarking yang dilakukan, akan menjadi wadah untuk mengidentifikasi inovasi yang dapat diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut di masing-masing unit kerja. Dengan semangat kolaborasi dan pembelajaran, studi banding ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperkuat peran Balmon dalam menjaga ketertiban dan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja masing-masing.



Tabel 45. Benchmarking Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dan Balai Monitor SFR Kelas I Yogyakarta Terkait Capaian Kinerja 2024

No	Item B	enchmarking	Balmon SFR Kelas Yogyakarta	Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya
1.	Luas Wilayah		8.023,71 Km ²	47.963 Km ²
2.	Jumlah Penduduk		8.650.247 jiwa	41.644.099 jiwa (2023)
3.	Total Wilayah Layanan		10 Kabupaten/Kota	38 Kabupaten/Kota
4.	Jumlah Pegawai		ASN: 37 Pegawai	ASN: 34 Pegawai
1,500			PPNPN : 28 Pegawai	PPNPN: 30 Pegawai
			Total: 65 Pegawai	Total : 64 Pegawai
5.	Jenis Layanan	Jenis layanan	Jumlah	Jumlah
	Jerns Layanan	Aeronautical	41	84
		Broadcast	224	345
	E CONTRACTOR DE CONTRACTOR	Fixed Service	3701	30084
		Land Mobile (Private)	900	3803
			3706	
		Land Mobile (Public)	With Contracts	12544
		Maritime	20	455
		Other Services	4	4
445		Satellite		31
5.	SBK		126 / 154	117 / 117
7.	Capaian Target PK			
3	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target dan Realisasi 2024	Target dan Realisasi 2024
	1. Meningkatnya Layanan	1. Persentase (%) Monitoring	100% / 100%	100% / 100%
	Monitoring, Pengukuran,	Penggunaan Spektrum Frekuensi		
	Inspeksi, Penertiban serta	Radio di Kab/Kota		
	Pelayanan Publik Spektrum	2. Persentase (%) Pemeriksaan Radio	100% / 100%	100% / 100%
	Frekuensi Radio dan	3. Persentase (%) Penanganan	100% / 100%	100% / 100%
	Perangkat Telekomunikasi	Gangguan Spektrum Frekuensi		
		Radio		
		4. Persentase (%) Penertiban	93% / 100%	93% / 100%
		Spektrum Frekuensi Radio dan	STEAMER BY AGENT HEL. ▼ UNIT AND SHOWING A DESCRIPTION OF A	11500-1150-1150-1150-1150-1150-1150-115
		Alat/Perangkat Telekomunikasi		
		5. Persentase (%) Terjaganya	95% / 100%	95% / 100%
		Operasional dan Fungsi Monitoring		
		dari Stasiun Monitor Frekuensi		
		Radio di UPT		
		6. Persentase (%) Peserta Ujian	100% / 222.73%	100% / 129,09%
		Negara Amatir Radio Berbasis CAT	100/0 / 222.73/0	100/0 / 123,03/0
		7. Persentase (%) Penanganan Piutang	100% / 100%	100% / 100%
		dan Koordinasi Pelimpahan ke	10070 / 10070	10070 / 10070
		KPKNL		
		8. Persentase (%) Sosialisasi Pelayanan	100% / 100%	100% / 100%
		Publik dan Survei Kepuasan	100% / 100%	100% / 100%
		The state of the s		
		Masyarakat (%) Socialisasi	1000/ / 502 010/	1000/ /1570/
		9. Persentase (%) Sosialisasi	100% / 503,01%	100% / 157%
		Bimbingan Teknis SRC/LRC	1000/ / 1040/	1000/ / 2400/
		10. Persentase (%) ISR Maritim Nelayan	100% / 104%	100% / 340%
		Program MOTS-IKRAN	4000/ /4000/	4000/ /4000/
		11. Persentase (%) Verifikasi Data	100% / 100%	100% / 100%
	일 및 23 172년 1월 - 9500 9550 125-156	koordinasi Site ISR		
	2. Meningkatnya Kualitas Tata	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT IKPA		90 / 92,76
	Kelola Birokrasi yang Efektif	2024	96,93	95,73
	dan Efisien	2. Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan	98 / 100	100 / 100
		Unit Akuntansi Pengguna Anggaran		
		(UAKPA)		
			47 465 670 000 /47 440 006 077	20 747 744 000 / 27 024 000 264
8.	Pagu dan Realisasi 2024		17.465.679.000 / 17.418.906.377	28.747.714.000 / 27.924.999.264

Analisa Hasil Benchmarking

Berikut adalah analisis benchmarking dan rekomendasi continuous improvement untuk Balai Monitoring SFR Kelas I Surabaya berdasarkan data di atas

Analisis Benchmarking Balmon Kls I Surabaya vs. Balmon Kls I Yogyakarta

1. Luas Wilayah & Jumlah Penduduk

- Jawa Timur memiliki luas wilayah 6 kali lebih besar dan jumlah penduduk 5 kali lebih banyak dibandingkan Yogyakarta.
- Implikasi: Beban kerja Balmon Surabaya lebih besar, membutuhkan alokasi sumber daya yang lebih optimal.

2. Total Wilayah Layanan

- Surabaya mencakup 38 Kabupaten/Kota, sementara Yogyakarta hanya 10 Kabupaten/Kota.
- Implikasi: Balmon Surabaya menghadapi kompleksitas yang lebih tinggi dalam pengawasan spektrum frekuensi.

3. Jumlah Pegawai

- Jumlah pegawai setara, dengan perbedaan kecil antara ASN dan PPNPN.
- Implikasi: Beban kerja per pegawai di Surabaya lebih tinggi dibandingkan Yogyakarta.

4. Jenis Layanan

- Surabaya menangani lebih banyak layanan dibanding Yogyakarta, dengan jumlah layanan pada beberapa kategori 2 hingga 23 kali lebih banyak.
- Implikasi: Balmon Surabaya memerlukan strategi manajemen beban kerja dan optimalisasi sumber daya, misalnya dengan strategi WFO (Work Force Optimization) berbasis prioritas dan Automasi yang akan memberi banyak manfaat seperti efisiensi waktu dan tenaga, mengurangi kelelahan pegawai, respon penangan gangguan yang lebih cepat, peningkatan kinerja dan kepuasan pegawai.

5. Capaian Target Kinerja

- Sebagian besar target kinerja tercapai dengan persentase yang sama antara kedua wilayah.
- Beberapa indikator menonjol:
 - O Peserta Ujian Negara Amatir Radio berbasis CAT: Yogyakarta memiliki jumlah peserta 2 kali lebih banyak. Hal ini dimungkinkan mengingat Jogja memiliki inovasi berupa Bis UNAR yang dapat melayani peserta UNAR

- sampai ke pelosok tanpa memerlukan gedung untuk tempat ujian.
- Sosialisasi Bimbingan Teknis SRC/LRC: Yogyakarta melaksanakan 4,5 kali lebih banyak.
- Program MOTS-IKRAN (Maritim Nelayan):
 Surabaya melaksanakan 3,5 kali lebih banyak.
- Nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran): Yogyakarta lebih tinggi sekitar 1,2 poin.
- o **Kualitas Pelaporan Keuangan**: Surabaya berhasil mencapai **100%**.

6. Pagu dan Realisasi Anggaran

- Pagu anggaran Surabaya lebih besar 1,5 kali lipat dibandingkan Yogyakarta.
- Persentase realisasi anggaran Surabaya lebih kecil (97,14% vs. 99,73%) akibat hambatan pengadaan barang/jasa dan perencanaan proyek yang kurang matang terutama untuk pekerjaan Peremajaan interior dan Meubelair kantor yang memiliki nilai cukup besar (± 4 M). Balmon Surabaya juga menerapkan prinsip selektif berdasarkan kebutuhan dalam mencairkan anggaran sehingga anggaran yg diserap adalah anggaran yg dibutuhkan untuk mencapai target saja.

7. Tantangan dan Hambatan

Balmon SFR Kelas I Surabaya dan juga Balmon SFR Kelas I Yogyakarta cenderung memiliki kendala yang sama, yaitu:

- a. Dikarenakan adanya perubahan peraturan terkait PM Kominfo Nomor 9 Tahun 2023 terkait sanksi denda yang menyebabkan mundurnya realisasi anggaran.
- Revisi DJA harus menunggu keseluruhan Satker SDPPI, yang menyebabkan proses revisi lebih lama.
- c. Manajemen/ Pengelolaan SDM , dimana ada beberapa persoalan yang sering dihadapi antara lain:
 - o Banyak pegawai yang tidak memiliki keterampilan yang relevan dengan tuntutan kerja saat ini.
 - o Kinerja yang kurang terukur dengan jelas,masih menggunakan sistem penilaian subjektif/hanya dinilai BAIK/KURANG BAIK
 - o Beban kerja yang kurang merata di antara pegawai dalam satu instansi, hal ini disebabkan oleh skill dan kompetensi SDM yang juga tidak merata serta fixed mindset yang menghambat etos kerja baik
 - o Resistensi terhadap perubahan juga literasi

teknologi digital yang rendah.Namun terkadang resistensi ini juga disebabkan aplikasi/teknologi digital yang dilaunching pemerintah juga belum siap sepenuhnya sehingga petugas pelaksana kesulitan dalam menerapkannya.

Rekomendasi Continuous Improvement untuk Balmon Kls I Surabaya

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia

- Evaluasi beban kerja per pegawai: Menyesuaikan jumlah pegawai dengan luas wilayah layanan yang lebih besar.
- Pelatihan dan pengembangan kompetensi: Meningkatkan efisiensi dan keterampilan teknis pegawai untuk mengelola volume layanan yang lebih besar.

2. Peningkatan Efisiensi Layanan

Penguatan sistem monitoring berbasis digital untuk efisiensi dalam inspeksi dan pengawasan frekuensi.

3. Strategi Peningkatan Kinerja

- Belajar dari Yogyakarta dalam meningkatkan jumlah peserta ujian dan sosialisasi teknis agar capaian lebih optimal.

Mengadopsi praktik manajemen keuangan yang lebih fleksibel untuk mengurangi kendala realisasi anggaran.

4. Perbaikan Perencanaan Proyek dan Pengadaan

- Perencanaan proyek lebih matang dan berbasis data untuk menghindari kendala dalam realisasi anggaran.
- Penyederhanaan proses pengadaan barang/jasa dengan sistem prioritas berbasis kebutuhan real-time.

5. Penguatan Program Maritim dan Komunikasi **Publik**

- Melanjutkan keberhasilan dalam program MOTS-IKRAN dengan memperluas cakupan ke lebih banyak nelayan.
- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi publik terkait pentingnya pengelolaan spektrum frekuensi.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, Balmon Surabaya dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat realisasi anggaran, dan memastikan pelayanan yang lebih baik sesuai dengan beban kerja yang lebih besar.

Gambar 46. Dokumentasi Kegiatan Benchmarking







PENGHARGAAN DAN PRESTASI LAINNYA

Senin 21 Oktober 2024, bertempat di Aula Lt.4 GKN II Surabaya, dalam acara Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Periode Bulan Oktober Tahun 2024, Pendalaman Langkah- Langkah Akhir Tahun serta Apresiasi Penghargaan Satuan Kerja, KPPN Surabaya II memberikan penghargaan kepada Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya Atas pencapaian prestasi sebagai peringkat 1 Satker terbaik atas Laporan Keuangan semester 1, Tahun 2024.

Gambar 47. Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya Peringkat 1 Satker Terbaik atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024





BABIV

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tersebut, laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dicapai serta sebagai instrumen evaluasi untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Bab ini menyajikan refleksi atas capaian kinerja Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya selama tahun 2024 serta analisis dampaknya terhadap pengelolaan spektrum frekuensi radio di Jawa Timur. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Infrastuktur digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio. Berbagai program strategis telah dijalankan guna meningkatkan kepatuhan penggunaan spektrum, efektivitas pengawasan, serta optimalisasi layanan publik.

Bab ini juga akan menguraikan dampak dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, menyajikan kesimpulan utama dari capaian kinerja tahun ini, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan spektrum frekuensi radio di tahun-tahun mendatang.

4.1 Dampak

Selama tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya telah menunjukkan capaian kinerja yang signifikan. Dampak utama dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dikategorikan sebagai berikut:

- 1. Dampak terhadap Ketertiban Spektrum Frekuensi
 - Monitoring spektrum frekuensi radio di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur berhasil meningkatkan tingkat okupansi dan kepatuhan pengguna terhadap izin frekuensi.
 - Penertiban spektrum frekuensi radio dan perangkat telekomunikasi ilegal mencapai

100% dari target, yang berkontribusi dalam mengurangi gangguan komunikasi serta memastikan pemanfaatan spektrum yang lebih efisien.

2. Dampak terhadap Kualitas Layanan Publik

- Peningkatan kenyamanan pengguna spektrum frekuensi radio dengan tercapainya target tertanganinya semua aduan gangguan spektrum frekuensi radio sebesar 100%.
- Peningkatan layanan publik, seperti Ujian Negara Amatir Radio (UNAR), bimbingan teknis, serta sosialisasi layanan frekuensi radio, telah memperkuat kesadaran masyarakat terhadap regulasi spektrum dan kepatuhan izin penggunaan frekuensi.
- Program Maritime On The Spot (MOTS) yang melampaui target menunjukkan tingginya kebutuhan dan antusiasme masyarakat, khususnya di sektor perikanan dan maritim, terhadap legalisasi izin frekuensi radio.
- 3. Dampak terhadap Tren Teknologi dan Regulasi
 - Memastikan kondisi dan ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk penerapan teknologi 5G dan peningkatan adopsi Internet of Things (IoT) sehingga memerlukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi spektrum frekuensi.
 - Regulasi yang semakin kompleks serta tuntutan masyarakat terhadap layanan komunikasi yang cepat dan bebas gangguan menuntut peningkatan kualitas pengawasan serta peralatan monitoring yang lebih modern.
- 4. Dampak terhadap Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas
 - Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 95,73% menunjukkan aspek penyerapan anggaran, kesesuaian perencanaan serta ketepatan waktu dan kualitas belanja negara yang baik.
 - Capaian Nilai Kinerja Anggaran Tahun 2024 sebesar 92,76% menunjukkan kinerja anggaran yang telah memenuhi kriteria efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara untuk mencapai target yang ditetapkan.

- Nilai Kualitas Pelaporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran sebesar 100% menunjukkan bahwa tata kelola keuangan Balmon kelas I Surabaya telah memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi keuangan secara baik dan minim resiko penyimpangan
- Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan skor 3,66 (Sangat Baik) menunjukkan adanya kepuasan terhadap layanan yang diberikan, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam aspek pelayanan publik.

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi terhadap capaian kinerja Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya selama tahun 2024, beberapa kesimpulan utama dapat diambil:

- 1. Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Regulasi
 - Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya berhasil mencapai target monitoring, inspeksi, dan penertiban spektrum frekuensi radio dengan hasil yang optimal.
 - Identifikasi dan penanganan gangguan frekuensi radio terlaksana secara efisien, dengan 100% penyelesaian kasus dalam rentang waktu sesuai ketentuan, yang mencerminkan respons cepat terhadap gangguan komunikasi.
- 2. Kesiapan dalam Menghadapi Tantangan Teknologi dan Regulasi
 - Meningkatnya adopsi teknologi baru seperti 5G, IoT, dan komunikasi satelit menuntut metode monitoring yang lebih inovatif.
 - Perubahan regulasi yang dinamis memerlukan peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi alat monitoring agar pengawasan tetap relevan dengan perkembangan industri telekomunikasi.
- 3. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat
 - Antusiasme masyarakat dalam memperoleh sertifikasi UNAR dan ISR Maritim menunjukkan peningkatan pemahaman terhadap pentingnya izin penggunaan spektrum frekuensi.
 - Sosialisasi dan bimbingan teknis yang telah dilakukan berdampak positif dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi spektrum frekuensi radio.
- 4. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran dan Akuntabilitas

- Capaian IKPA dan pengelolaan anggaran yang efisien menunjukkan tata kelola yang baik.
- Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam pelayanan publik guna mencapai tingkat kepuasan masyarakat yang lebih tinggi.

4.3 Saran

Untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya pada tahun-tahun mendatang, beberapa saran strategis yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan Infrastruktur Monitoring dan Pengukuran
 - Mengembangkan teknologi AI-based *Spectrum Monitoring* untuk otomatisasi dalam mendeteksi penggunaan spektrum ilegal dan gangguan frekuensi.
 - Menambah jumlah Stasiun Monitoring Tetap dan Mobile guna meningkatkan cakupan pengawasan di wilayah yang sulit dijangkau.
- Adaptasi terhadap Tren Teknologi dan Regulasi Baru
 - Menyesuaikan strategi pengawasan dengan perkembangan 5G, IoT, dan komunikasi satelit, termasuk penyusunan kebijakan dan metodologi pemantauan yang lebih canggih.
 - Membangun kerja sama dengan lembaga riset dan universitas dalam pengembangan metode monitoring berbasis Big Data dan Machine Learning.
- 3. Peningkatan Kualitas SDM
 - Mengadakan pelatihan lanjutan bagi pegawai di bidang analisis data spektrum, forensik frekuensi, dan teknologi komunikasi terbaru.
 - Meningkatkan pemahaman pegawai terhadap regulasi internasional terkait pengelolaan spektrum frekuensi radio guna menghadapi persaingan global.
- 4. Optimalisasi Pelayanan Publik dan Edukasi Masyarakat
 - Mengembangkan platform digital interaktif untuk layanan ISR, UNAR, dan pengaduan masyarakat, guna meningkatkan aksesibilitas layanan.
 - Meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi, khususnya kepada komunitas pengguna spektrum (nelayan, operator radio, penyiar, dll.), agar kepatuhan terhadap regulasi semakin meningkat.

- 5. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran
 - Memastikan seluruh program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan prinsip Good Governance, dengan penguatan sistem audit dan evaluasi berbasis teknologi digital.
 - Mengoptimalkan sinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital, Kepolisian, dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efektivitas pengawasan spektrum frekuensi radio.

Dengan berbagai pencapaian yang telah diraih selama tahun 2024, Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Surabaya telah menunjukkan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.

Namun, dinamika teknologi dan regulasi yang terus berkembang menuntut

peningkatan kapasitas dalam berbagai aspek. Dengan strategi yang tepat, inovasi teknologi, serta peningkatan kualitas layanan publik, Balai Monitor SFR Kelas I Surabaya dapat terus berkontribusi dalam menciptakan tata kelola spektrum frekuensi yang lebih baik dan mendukung ekosistem telekomunikasi yang sehat di Indonesia.







LAPORAN KINERJA

2024

DIREKTORAT JENDERAL INERASTRUKTUR DIGITAL

balmon.suroboyo

Balmon Surabaya